



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP**

LAPORAN KINERJA AKHIR TAHUN

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut



2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2024 ini.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Selama tahun 2024, Direktorat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, di antaranya meningkatnya indeks kualitas ekosistem gambut, meningkatnya luas lahan gambut di areal masyarakat yang terbasahi, meningkatnya jumlah desa mandiri peduli gambut, dan peningkatan kualitas data dan informasi terkait ekosistem gambut.

Namun demikian, kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan kejadian tidak terduga seperti banjir.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Direktorat selama tahun 2024 dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025
Direktur,



M. Noor Andi Kusumah, ST., M.Sc.,
NIP. 19750608 200003 1 001

DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 - PENDAHULUAN.....	5
1. Latar Belakang	5
2. Tugas dan Fungsi.....	5
3. Struktur Organisasi.....	7
4. Sumber Daya Manusia.....	7
5. Keuangan.....	8
BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA	10
1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	10
2. Rencana Kerja Tahun 2024	11
BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA	13
METODE PENGUKURAN	13
1. Pengukuran Kinerja.....	13
2. Pengukuran Penyerapan Anggaran.....	13
3. Efektifitas dan Efisiensi.....	13
CAPAIAN KINERJA.....	14
1. Capaian Kinerja Eselon II	14
2. Capaian Kinerja Eselon III	15
2.1. Kelompok Kerja Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000).....	15
2.1.1. Dasar Hukum.....	15
2.1.2. Bisnis Proses	15
2.1.3. Capaian Inventarisasi KEG (Skala 1:50.000) Tahun 2015 - 2024	16
2.1.4. Capaian Penetapan FEG (Skala 1:50.000) Tahun 2015 - 2024	24
2.2. Kelompok Kerja Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	29
2.2.1. Dasar Hukum Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	29
2.2.2. Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.....	29
2.2.3. Capaian Indeks Kualitas Ekosistem Gambut 2020 – 2024	29
2.3. Kelompok Kerja Indeks Respon Lingkungan Hidup.....	34
2.3.1. Dasar Hukum Indeks Respon Lingkungan Hidup – Gambut Lestari	34
2.3.2. Capaian Indeks Respon Kinerja Daerah / Indeks Respon Lingkungan Hidup Tahun 2024	34
2.4. Kelompok Kerja RPPEG.....	39
2.4.1. Dasar Hukum Kelompok Kerja RPPEG	39
2.5. Capaian RPPEG	39
2.6. Kelompok Kerja Desa Mandiri Peduli Gambut.....	41
2.6.1. Dasar Hukum Kelompok Kerja Desa Mandiri Peduli Gambut	41
2.6.2. Bisnis Proses Desa Mandiri Peduli Gambut.....	41
2.6.3. Capaian DMPG 2024	42

2.6.4.	Karakteristik DMPG	48
2.6.5.	Tantangan, Kendala, dan Saran Pelaksanaan Fasilitasi	50
2.6.6.	<i>Success Story</i> DMPG.....	51
2.7.	Kelompok Kerja Pemulihan Ekosistem Gambut	55
2.7.1.	Dasar Hukum Pemulihan Ekosistem Gambut.....	55
2.7.2.	Capaian Pemulihan - Kumulatif 2024.....	55
2.8.	Kelompok Kerja Sekat Kanal.....	56
2.8.1.	Dasar Hukum Kelompok Kerja Sekat Kanal	56
2.8.2.	Dasar dan Lingkup Kegiatan Sekat Kanal	56
2.8.3.	Capaian Pembangunan Sekat Kanal 2020 - 2024.....	57
2.9.	Kelompok Kerja Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah.....	59
2.9.1.	Dasar Hukum Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah	59
2.9.2.	SiMATAG.....	59
2.9.3.	Stasiun Pemantauan TMT di Areal Masyarakat.....	59
2.10.	Kelompok Kerja PROPER Gambut.....	62
2.10.1.	Dasar Hukum PROPER Gambut	62
2.10.2.	Aspek Penilaian PROPER Gambut	62
2.10.3.	Hasil Evaluasi PROPER Gambut.....	63
2.11.	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	64
2.11.1.	Dasar Hukum Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.....	64
2.11.2.	Program Kegiatan Pengarusutamaan Gender	64
2.11.3.	Hasil Pengarusutamaan Gender	64
2.12.	NSPK.....	66
2.13.	Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri.....	67
2.13.1.	GIZ SUPA.....	67
2.13.2.	KIFC	68
2.13.3.	GEF 6 - IMPLI	71
2.13.4.	GIZ PROPEAT	76
2.13.5.	GEF 7 - COPLI	78
2.13.6.	GIZ PROMANGROPEAT	79
2.13.7.	Conference of the Parties (COP-29), Baku - Azerbaijan	81
2.13.8.	Pilot Project dengan Pemerintah Jepang	85
PENUTUP		89
1.	Kesimpulan.....	89
2.	Kendala	89
3.	Tindak Lanjut	89

BAB 1 - PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut merupakan salah satu unit eselon II di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2023. Penetapan kinerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan ekosistem gambut;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;

3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Subbagian Tata Usaha

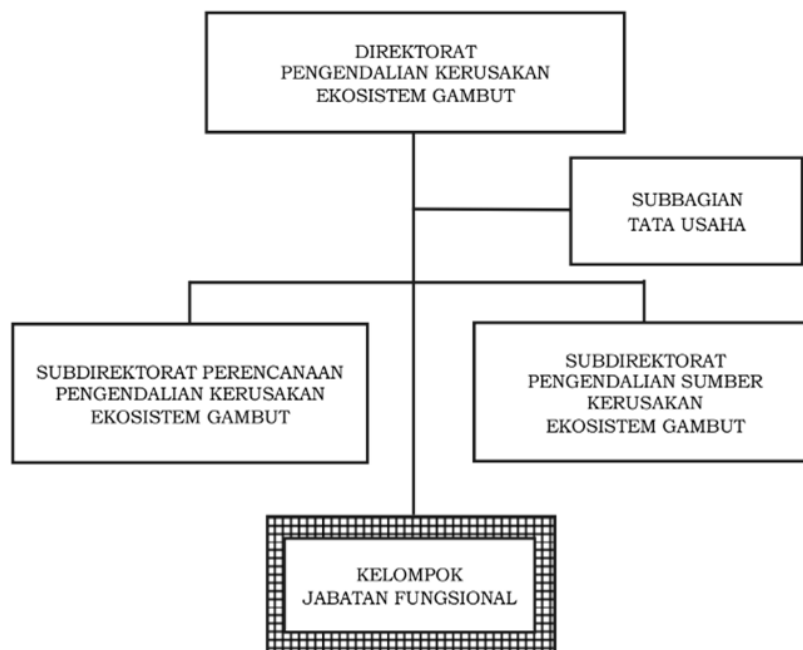
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.

3. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MenLHK/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut;
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dapat dilihat pada diagram berikut ini.



4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2024 adalah sebanyak 41 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III (2 orang Kasubdit.), 1 orang pejabat eselon IV (1 orang Kasubbag.), 28 orang fungsional tertentu, dan 9 orang pelaksana. Berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 1 orang Strata III, 7 orang Strata II, 28 orang Strata I, 3 orang DIII, dan 2 orang SLTA. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini.

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	1	7	28	3	2	-	-	41

5. Keuangan

Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut untuk tahun **2024** yakni sebesar **Rp. 25.677.751.000,-** (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk **APBN Murni** atau **Rp. 44.547.583.000,-** (empat puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk **APBN dan Hibah** dengan rincian alokasi dan capaian penyerapan sebagai berikut.

APBN MURNI - 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH	Realisasi	Sisa Dana	Persen (%)
Direktorat Pengendalian Kerusakan Eksosistem Gambut		25,677,751,000	25,623,249,231	54,501,769	99.79
6033.QMA.006	Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	2,123,569,000	2,119,910,251	3,658,749	99.8
051	Pembuatan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala 1:50.000	1,923,672,000	1,921,547,346	2,124,654	99.9
A	<i>Tersedianya peta kesatuan hidrologis gambut skala 1:50.000</i>	<i>1,923,672,000</i>	<i>1,921,547,346</i>	<i>2,124,654</i>	<i>99.9</i>
052	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	199,897,000	198,362,905	1,534,095	99.2
A	<i>Fasilitasi dan Supervisi Penyusunan RPPEG di Tk Prop dan/atau Kab/Kota</i>	<i>199,897,000</i>	<i>198,362,905</i>	<i>1,534,095</i>	<i>99.2</i>
6034.QDI.004	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	1,576,236,000	1,565,721,812	10,514,188	99.3
051	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	1,576,236,000	1,565,721,812	10,514,188	99.3
A	<i>Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Penaatan Pengelolaan Lingkungan (PROPER)</i>	<i>859,447,000</i>	<i>852,830,302</i>	<i>6,616,698</i>	<i>99.2</i>
B	<i>Pemulihan Ekosistem Gambut</i>	<i>716,789,000</i>	<i>712,891,510</i>	<i>3,897,490</i>	<i>99.5</i>
6035.REA.002	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	9,832,488,000	9,822,053,742	10,434,258	99.9
051	Pemulihan Lahan Gambut yang Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	9,832,488,000	9,822,053,742	10,434,258	99.9
A	<i>Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat</i>	<i>9,832,488,000</i>	<i>9,822,053,742</i>	<i>10,434,258</i>	<i>99.9</i>
6035.UBA.002	Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	978,766,000	959,695,177	19,070,823	98.1
051	Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	978,766,000	959,695,177	19,070,823	98.1
A	<i>Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD)</i>	<i>206,266,000</i>	<i>202,449,741</i>	<i>3,816,259</i>	<i>98.1</i>
B	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</i>	<i>656,367,000</i>	<i>641,500,937</i>	<i>14,866,063</i>	<i>97.7</i>
C	<i>Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut</i>	<i>116,133,000</i>	<i>115,744,499</i>	<i>388,501</i>	<i>99.7</i>
6035.UBB.001	Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi	11,166,692,000	11,155,868,249	10,823,751	99.9
051	Fasilitasi Desa dalam Menjaga Ekosistem Gambut	11,166,692,000	11,155,868,249	10,823,751	99.9
A	<i>Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut</i>	<i>11,166,692,000</i>	<i>11,155,868,249</i>	<i>10,823,751</i>	<i>99.9</i>

APBN DAN HIBAH - 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH	Realisasi	Sisa Dana	Persen (%)
Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut		44,547,583,000	44,460,096,918	87,486,082	99.80
6033.QMA.006	Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	20,993,401,000	20,956,757,938	36,643,062	99.8
051	Pembuatan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala 1:50.000	1,923,672,000	1,921,547,346	2,124,654	99.9
A	<i>Tersedianya peta kesatuan hidrologis gambut skala 1:50.000</i>	<i>1,923,672,000</i>	<i>1,921,547,346</i>	<i>2,124,654</i>	<i>99.9</i>
052	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	19,069,729,000	19,035,210,592	34,518,408	99.8
A	<i>Fasilitasi dan Supervisi Penyusunan RPPEG di Tk Prop dan/atau Kab/Kota</i>	<i>199,897,000</i>	<i>199,342,905</i>	<i>554,095</i>	<i>99.7</i>
B	<i>INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.1 Kapasitas Kelembagaan, kerangka kerja Kemitraan untuk meningkatkan operasional restorasi lahan gambut yang berkelanjutan</i>	<i>1,868,590,000</i>	<i>1,861,827,942</i>	<i>6,762,058</i>	<i>99.6</i>
C	<i>INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.2 Pengelolaan terpadu Kesatuan Hidrologis Gambut prioritas di provinsi Proyek berkelanjutan</i>	<i>16,047,377,000</i>	<i>16,020,736,272</i>	<i>26,640,728</i>	<i>99.8</i>
D	<i>INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI) C.3 PMO Pengetahuan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, teknologi, dan pasar dikembangkan dan diperluas</i>	<i>140,100,000</i>	<i>140,100,000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
E	<i>INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.4 PMO Project Managemen</i>	<i>813,765,000</i>	<i>813,203,473</i>	<i>561,527</i>	<i>99.9</i>
B	<i>Pemulihan Ekosistem Gambut</i>	<i>716,789,000</i>	<i>712,891,510</i>	<i>3,897,490</i>	<i>99.5</i>
6035.REA.002	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	9,832,488,000	9,822,053,742	10,434,258	99.9
051	Pemulihan Lahan Gambut yang Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	9,832,488,000	9,822,053,742	10,434,258	99.9
A	<i>Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat</i>	<i>9,832,488,000</i>	<i>9,822,053,742</i>	<i>10,434,258</i>	<i>99.9</i>
6035.UBA.002	Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	978,766,000	959,695,177	19,070,823	98.1
051	Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	978,766,000	959,695,177	19,070,823	98.1
A	<i>Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD)</i>	<i>206,266,000</i>	<i>202,449,741</i>	<i>3,816,259</i>	<i>98.1</i>
B	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</i>	<i>656,367,000</i>	<i>641,500,937</i>	<i>14,866,063</i>	<i>97.7</i>
C	<i>Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut</i>	<i>116,133,000</i>	<i>115,744,499</i>	<i>388,501</i>	<i>99.7</i>
6035.UBB.001	Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi	11,166,692,000	11,155,868,249	10,823,751	99.9
051	Fasilitasi Desa dalam Menjaga Ekosistem Gambut	11,166,692,000	11,155,868,249	10,823,751	99.9
A	<i>Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut</i>	<i>11,166,692,000</i>	<i>11,155,868,249</i>	<i>10,823,751</i>	<i>99.9</i>

BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020–2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan Sasaran Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020–2024, Sasaran Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2020–2024 adalah melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran program Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun yaitu 1.800 Ha pada tahun 2020, 18.200 Ha pada tahun 2021, 25.000 Ha pada tahun 2022, 25.000 Ha pada tahun 2023 dan 30.000 Ha pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 maka komitmen Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut untuk mewujudkan tercapainya sasaran program tersebut dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut yang memuat Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut disampaikan pada tabel berikut.

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 – 2024
--

“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”

Indikator Tujuan

1. Tercapainya kualitas udara yang sehat;
2. Tercapainya peningkatan kualitas air;
3. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka;
4. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan;
5. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut;
6. Terlaksananya reformasi birokrasi.

Sasaran Program

1. Meningkatnya kualitas udara;
2. Meningkatnya kualitas air;
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
5. **Meningkatnya kualitas ekosistem gambut;**
6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut

Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Efektifitas fasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
4. Efektifitas pemantauan TMAP yang dikelola langsung;
5. Efektifitas pemulihan ekosistem gambut;
6. Efektifitas penilaian kinerja pengendalian kerusakan ekosistem gambut

2. Rencana Kerja Tahun 2024

Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan indikator kinerja utamanya adalah:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	IKEG = 67,85	IKEG = 69,94	103,08%
2.	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut-nya pada skala 1:50.000	33 KHG	32 KHG baru + pemutakhiran KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	100%
		Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000	34 KHG	usulan 34 KHG	100%
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)	12 layanan	12 layanan	100%
		Jumlah stasiun pemantauan TMAP yang dikelola langsung	47 stasiun	36 stasiun lama + 11 stasiun baru	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
3.	Terlaksananya layanan penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut (PROPER)	400 perusahaan	400 perusahaan peserta proper	100%
		Kumulatif jumlah industri yang difasilitasi pemulihan Ekosistem Gambut nya	401 dokumen pemulihan	401 dokumen pemulihan	100%
4.	Terpulihkannya KHG yang terdegradasi	Luas KHG (Ha) yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya (lahan masyarakat)	6.030 hektar	6.030 hektar	100%
5.	Terfasilitasinya dan terbinanya pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menjaga Ekosistem Gambut	60 desa	60 desa	100%
		Tersedianya Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di provinsi dan kabupaten/kota	23 provinsi 125 kab/kot	23 provinsi 125 kab/kot	100%
		Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan program Gambut Lestari	23 provinsi 125 kab/kot	23 provinsi 125 kab/kot	100%
6.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat PKEG	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP = 82,00	Nilai SAKIP = 83,08	101,31%
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan SPIP tahun 2024	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
8.	Terlaksananya Dialog Kinerja	Jumlah pelaksanaan Dialog Kinerja	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100%

BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA

METODE PENGUKURAN

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja. Rumus pengukuran kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

2. Pengukuran Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya. Rumus perhitungan capaian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

3. Efektifitas dan Efisiensi

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Tetapi apabila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka capaian kinerja tahun ini kurang efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun Ini (\%)}}{\text{Capaian Kinerja Tahun Lalu (\%)}}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien, sedangkan bila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka pelaksanaan kegiatan tidak efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)}}$$

CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Eselon II

Salah satu indikator kinerja pada perjanjian kinerja Ditjen PPKL tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas Ekosistem Gambut dengan indikator Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Perbandingan capaian IKEG pada tahun 2024 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 dan Targen Renja PPKL 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Ekosistem Gambut Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target RPJMN 2024	Target Renstra KLHK 2024	Target Renstra PPKL 2024	Target Renja PPKL 2024	PK 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	65,70	-	-	67,85	67,85	67,85	69,94	103,08

Dapat diamati bahwa persentase capaian adalah sebesar **103,08%** terhadap target pada Perjanjian Kinerja 2024 dan Renja PPKL 2024. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di 23 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota dapat dilihat di pembahasan sub-bab Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Jika dilihat dari persentase penyerapannya, maka Direktorat PKEG telah berhasil menyerap anggaran sebesar Rp.44.460.096.918 (empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta sembilan puuh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dari total anggaran (APBN + Hibah) sebesar Rp.44.547.583.000 (empat puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) (persentase penyerapan **99,80%**) dengan sisa anggaran sebesar Rp.87.486.082 (depalan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah).

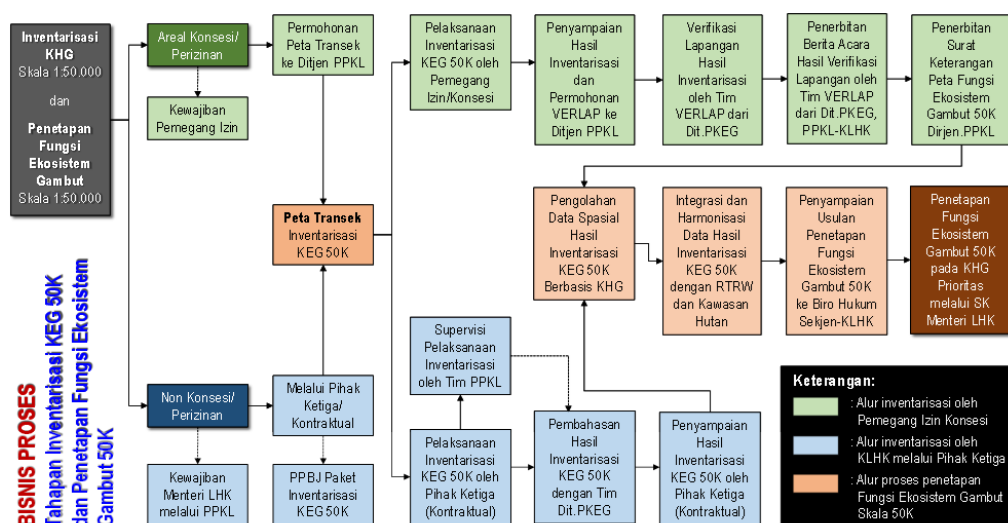
2. Capaian Kinerja Eselon III

2.1. Kelompok Kerja Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000)

2.1.1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut;
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Data Spasial Karakteristik Ekosistem Gambut.

2.1.2. Bisnis Proses

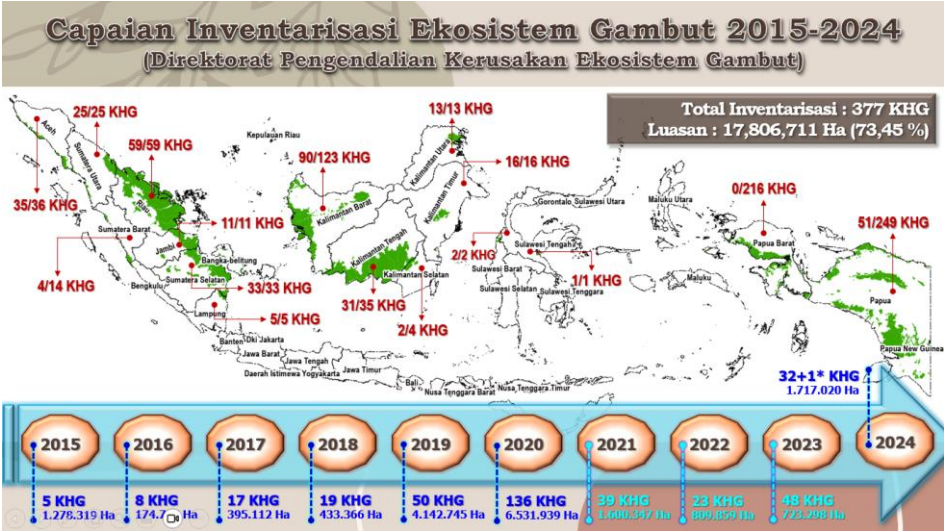


Tahapan Bisnis Proses dalam kegiatan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut (skala 1:50.000) ini terbagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu (1). Pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut (skala 1:50.000) di areal non konsesi/perusahaan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta (2). Pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut (skala 1:50.000) di areal konsesi/perizinan, dimana sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, disebutkan

bahwa “Survei lapangan dan inventarisasi karekteristik Ekosistem Gambut pada areal usaha dan/atau kegiatan diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan supervisi Direktur Jenderal”, sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemegang izin usaha dan/atau kegiatan.

2.1.3. Capaian Inventarisasi KEG (Skala 1:50.000) Tahun 2015 - 2024

Selama periode 2015-2024, telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000) pada 377 KHG dengan luasan ±17.806.711 Ha (73,40 %) dari total luasan KHG di Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
1	2020	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	Barito Selatan, Barito Timur	Kalimantan Tengah	APBN-2020
2	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Murui	Kapuas	Kalimantan Tengah	APBN-2020
3	2020	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	APBN-2020
4	2020	KHG Sungai Lamandau - Sungai Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	SMPEI IFAD-2020
5	2020	KHG Sungai Lamandau - Sungai Sematu	Kotawaringin Barat, Lamandau	Kalimantan Tengah	SMPEI IFAD-2020
6	2020	KHG Sungai Rungan - Sungai Kahayan	Palangkaraya, Pulangpisau	Kalimantan Tengah	SMPEI IFAD-2020
7	2020	KHG Aek Sebatik - Aek Musi	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
8	2020	KHG Air Banyuasin - Sungai Musi	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
9	2020	KHG Delta Talang	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
10	2020	KHG Sungai Alur - Sungai Lintang	Musirawas Utara	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
11	2020	KHG Sungai Musi - Sungai Empasan	Musi Banyuasin, Musirawas	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
12	2020	KHG Sungai Musi - Sungai Saleh	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
13	2020	KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
14	2020	KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
15	2020	KHG Batang Merangin - Batang Tembesi	Merangin, Sarolangun	Jambi	SMPEI IFAD-2020
16	2020	KHG Sungai Batanghari - Sungai Mandahara	Kota Jambi, Muarojambi	Jambi	SMPEI IFAD-2020
17	2020	KHG Sungai Mesao - Aek Rawas	Sarolangun	Jambi	SMPEI IFAD-2020
18	2020	KHG Sungai Baung - Sungai Betara	Tanjung Jabung Barat	Jambi	SMPEI IFAD-2020

No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
19	2020	KHG Sungai Betara - Sungai Mendahara	Muarojambi Tanjabbar, Tanjabtim	Jambi	SMPEI IFAD-2020
20	2020	KHG Sungai Batanghari - Sungai Kampeh	Muarojambi	Jambi	SMPEI IFAD-2020
21	2020	KHG Sungai Batangalis - Sungai Maday	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
22	2020	KHG Sungai Embalon - Sungai Palin	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
23	2020	KHG Sungai Embau - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
24	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Embau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
25	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Maday	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
26	2020	KHG Sungai Mendalam - Sungai Sambus	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
27	2020	KHG Air Banyuasin – Air Lalang	Banyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
28	2020	KHG Sungai Air Hitam Laut – Sungai Buntu Kecil	Banyuasin, Muba, MuaroJambi, Tj Jabung Timur	Sumatera Selatan - Jambi	APBN-PEN-2020
29	2020	KHG Sungai Beberi – Sungai Way Mesuji	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
30	2020	KHG Sungai Burnai – Sungai Sibumbang,	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
31	2020	KHG Sungai Burung – Sungai Way Mesuji	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
32	2020	KHG Sungai Kalumpang	Musirawas Utara	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
33	2020	KHG Sungai Medak – Sungai Lalan	Musibanyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
34	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Aek Lematang	Muara Enim, PALI	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
35	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Blida	Ogan Ilir,Musi Banyuasin, dan Banyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
36	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Penu	Musi Banyuasin, PALI	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
37	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Rawas	Musi Banyuasin, Musirawas, dan Musirawas Utara	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
38	2020	KHG Sungai Penu – Sungai Abah	Musi Banyuasin, PALI	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
39	2020	KHG Sungai Rumpit – Sungai Rawas	Musirawas Utara, Musi Rawas	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
40	2020	KHG Sungai Sembilang – Sungai Lalan	Banyuasin, Musibanyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
41	2020	KHG Sungai Sibumbang – Sungai Talangrimba	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
42	2020	KHG Sungai Talang – Sungai Ulakkedondong	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
43	2020	KHG Sungai Ulakkedondong – Sungai Lumpur	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
44	2020	KHG Sungai Aleki Eli – Sungai Aleki Mafe	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
45	2020	KHG Sungai Aleki Male – Sungai Ifuleki Bian	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
46	2020	KHG Sungai Alekikos Bakian – Sungai Ifuleki Bian	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
47	2020	KHG Sungai Alekikosi Soap – Sungai Alekikosi Seghab	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
48	2020	KHG Sungai Alik Alo – Sungai Alik Mauwk Ere	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
49	2020	KHG Sungai Bob Buraka – Sungai Aleki Buraka	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
50	2020	KHG Sungai Bobburaka – Sungai Alik Anaw	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
51	2020	KHG Sungai Ifileki Bian – Sungai Lekiage Sentuf	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
52	2020	KHG Sungai Ifuleki Berapto – Sungai Ifuleki Obat	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
53	2020	KHG Sungai Ifuleki Bian – Sungai Dalik	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
54	2020	KHG Sungai Ifuleki Kumbe – Sungai Lekiage Ser	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
55	2020	KHG Sungai Ifuleki Kumbe – Sungai Lekiasi	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
56	2020	KHG Sungai Ifuleki Obathrow – Sungai Ifuleki Berapto	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020

No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
57	2020	KHG Sungai Ifuleki Onam – Sungai Fly	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
58	2020	KHG Sungai Ifuleki Onam – Sungai Lekiage Wagini	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
59	2020	KHG Sungai Kumbe – Sungai Bian	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
60	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Udi Lebah	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
61	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Kauh	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
62	2020	KHG Sungai Buru Miyaman - Sungai Buru Mappi	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
63	2020	KHG Sungai Udi Edera - Sungai Samaleki Digul	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
64	2020	KHG Sungai Wade Passue - Sungai Jo Dairam	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
65	2020	KHG Sungai Alekikos Kauh - Sungai Ifuleki Mati	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
66	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Aleki Seme, Merauke	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
67	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Bagon	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
68	2020	KHG Sungai Alekikosi Kaswari - Sungai Alekikosi Digoel	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
69	2020	KHG Sungai Alekikosi Sia - Sungai Alekikosi Digoel	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
70	2020	KHG Sungai Alekikosi Yang - Sungai Alekikosi Digoel	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
71	2020	KHG Sungai Alekokosi Kaswari - Sungai Alekikosi Dawe	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
72	2020	KHG Sungai Buru Bayeni - Sungai Buru Mappi	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
73	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Mangguno	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
74	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Udi Afu	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
75	2020	KHG Sungai Buru Mappi II	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
76	2020	KHG Sungai Ivo - Sungai Fly, Merauke	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
77	2020	KHG Sungai Kanggu - Sungai Fly	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
78	2020	KHG Sungai Mappi - Sungai Edera	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
79	2020	KHG Sungai Muyu	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
80	2020	KHG Sungai Udi Aifo - Sungai Buru Mappi	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
81	2020	KHG Sungai Wade Kowo - Sungai Buru Bayeni	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
82	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Buru Obaa	Mappi, Asmat	Papua	APBN-PEN-2020
83	2020	KHG Sungai Wade Nanu - Sungai Wade Assue	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
84	2020	KHG Aek Garoga - Batang Toru	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
85	2020	KHG Aek Maraitgadang - Batang Maraitgodang	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
86	2020	KHG Aek Maros - Aek Pandan	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
87	2020	KHG Aek Panggainsira - Aek Arong	Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
88	2020	KHG Aek Silang - Lae Renun	Samosir	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
89	2020	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
90	2020	KHG Aek Sordang - Aek Kalang	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
91	2020	KHG Aek Sulpi - Aek Sibundong	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
92	2020	KHG Batang Batahan - Batang Tamak	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
93	2020	KHG Batang Singkuang - Nainjan Nu Godang	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
94	2020	KHG Lae Rapus - Aek Pardomuan	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020

No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
95	2020	KHG Lae Sibungkuang,	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
96	2020	KHG Lae Sibungkuang - Aek Tarutungol	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
97	2020	KHG Sungai Asahan - Sungai Leidong	Asahan, Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
98	2020	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
99	2020	KHG Sungai Barumun - Sungai Mabar	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
100	2020	KHG Sungai Kuo - Sungai Kualuh Bilah	Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
101	2020	KHG Sungai Leidong - Sungai Kuala	Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
102	2020	KHG Sungai Marbau - Sungai Kualuh Bilah	Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
103	2020	KHG Sungai Nata - Sungai Sinunukan	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
104	2020	KHG Sungai Mentaya - Sungai Seranau Kiri	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
105	2020	KHG Sungai Pukun - Sungai Kelua Besar	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
106	2020	KHG Sungai Pukun - Sungai Seruyan	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
107	2020	KHG Sungai Seruyan - Sungai Kelua Besar	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
108	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
109	2020	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	Kapuas	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
110	2020	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
111	2020	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Katingan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
112	2020	KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
113	2020	KHG Sungai Kuis - Sungai Bapai	Asmat	Papua	APBN-PEN-2020
114	2020	KHG Sungai Buru Bagaram	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
115	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Siakha Homo	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
116	2020	KHG Sungai Buru Mappi I	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
117	2020	KHG Sungai Buru Obaa - Sungai Buru Mappi	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
118	2020	KHG Sungai Jaman Kawarga - Sungai Samaleki Digul	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
119	2020	KHG Sungai Jo Dairam	Asmat, Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
120	2020	KHG Sungai Jo Vriendschaps - Sungai Jo Siret	Asmat, Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
121	2020	KHG Sungai Ju Siret- Sungai Wade Assue	Asmat, Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
122	2020	KHG Sungai Wade Passue	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
123	2020	KHG Sungai Keeme - Sungai Bayeni	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
124	2020	KHG Sungai Bangkudulis	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
125	2020	KHG Sungai Bangkudulis - Sungai Umbus	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
126	2020	KHG Sungai Belanyu - Sungai Balai	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
127	2020	KHG Sungai Belanyu - Sungai Barang	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
128	2020	KHG Sungai Mentarang - Sungai Belayu	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
129	2020	KHG Sungai Mentarang - Sungai Siduyun	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
130	2020	KHG Sungai Mentarang- Sungai Sembakung	Malinau, Nunukan, Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
131	2020	KHG Sungai Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
132	2020	KHG Sungai Sebuku - Sungai Sembakung	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
133	2020	KHG Sungai Sedaung - Sungai Itai	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020

No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
134	2020	KHG Sungai Seputuk - Sungai Rian	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
135	2020	KHG Sungai Sumbal - Sungai Samadik	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
136	2020	KHG Sungai Terusan Teladan	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
137	2021	KHG Sungai Ambawang - Sungai Landak	Kuburaya, Landak, Sanggau	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
138	2021	KHG Sungai Kapuas - Sungai Ambawang	Kota Pontianak, Kuburaya, Sanggau	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
139	2021	KHG Sungai Kapuas - Sungai Mandor	Kota Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Landak	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
140	2021	KHG Sungai Suruk - Sungai Mentebah	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
141	2021	KHG Sungai Mandor - Sungai Temila	Kuburaya, Landak	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
142	2021	KHG Sungai Temila - Sungai Mandor	Landak	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
143	2021	KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Ambawang	Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
144	2021	KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Kapuas	Kota Pontianak, Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
145	2021	KHG Sungai Terentang - Sungai Kapuas	Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
146	2021	KHG Sungai Mempawah - Sungai Duri	Bengkayang, Mempawah	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
147	2021	KHG Sungai Duri - Sungai Raya	Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
148	2021	KHG Sungai Raya - Sungai Pangnilang	Bengkayang, Kota Singkawang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
149	2021	KHG Sungai Selakau	Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
150	2021	KHG Sungai Selakau - Sungai Sebangkau	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
151	2021	KHG Sungai Mange - Sungai Dadau	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
152	2021	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Sijang	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
153	2021	KHG Sungai Sijang - Sungai Bantan	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
154	2021	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Kumba	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
155	2021	KHG Sungai Sentinok - Sungai Kumba	Sambas, Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
156	2021	KHG Sungai Sambas Kecil - Sungai Sambas Besar	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
157	2021	KHG Sungai Kumba - Sungai Setap	Sambas, Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
158	2021	KHG Sungai Teberau - Sungai Sambas Kecil	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
159	2021	KHG Sungai Samabas Kecil - Sungai Teberau	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
160	2021	KHG Sungai Sedawar - Sungai Sambas Besar	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
161	2021	KHG Sungai Labai - Sungai Ambawang Besar	Sanggau	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
162	2021	KHG Sungai Labai - Sungai Bantilkecil	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
163	2021	KHG Sungai Durian - Sungai Labai	Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
164	2021	KHG Sungai Durian - Sungai Kualan	Kayong Utara, Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
165	2021	KHG Sungai Selat Maya - Sungai Aping	Kayong Utara	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
166	2021	KHG Sungai Siduk - Sungai Rantaupanjang	Kayong Utara	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
167	2021	KHG Sungai Tolak - Sungai Siduk	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
168	2021	KHG Sungai Pawan - Sungai Tolak	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
169	2021	KHG Sungai Pawan - Sungai Kepulu	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
170	2021	KHG Sungai Pasang Kayu - Sungai Bambalamotu	Mamuju Utara, Donggala	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah	SMPEI IFAD-2021
171	2021	KHG Sungai Salo Lariang - Sungai Pasang Kayu	Mamuju Utara, Donggala	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah	SMPEI IFAD-2021

No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
172	2021	KHG Sungai Laa - Sungai Petasia	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	SMPEI IFAD-2021
173	2022	KHG Pulau Tanbuayabuaya	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
174	2022	KHG Pulau Tanjungbuaya-buaya	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
175	2022	KHG Sei Batu Putih	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
176	2022	KHG Sungai Belayan - Sungai Kelinjau	Kutai Timur, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
177	2022	KHG Sungai Belayan - Sungai Melintang	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
178	2022	KHG Sungai Jempang - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat	Kalimantan Timur	GIZ-2022
179	2022	KHG Sungai Kariabu	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
180	2022	KHG Sungai Kedupan - Sungai Layah	Kutai Barat, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
181	2022	KHG Sungai Lenggo	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
182	2022	KHG Sungai Mahakam - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat	Kalimantan Timur	GIZ-2022
183	2022	KHG Sungai Mahakam - Sungai Sabintulung	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
184	2022	KHG Sungai Melintang - Sungai Layah	Kutai Barat, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
185	2022	KHG Sungai Pasir - Sungai Kuaro	Paser	Kalimantan Timur	GIZ-2022
186	2022	KHG Sungai Tanbuayabuaya - Sungai Domaring	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
187	2022	KHG Sungai Leko - Sungai Minas	Siak	Riau	SMPEI-IFAD 2022
188	2022	KHG Sungai Mandiangin - Sungai Siak	Siak	Riau	SMPEI-IFAD 2022
189	2022	KHG Sungai Nilo - Sungai Napuh	Pelalawan	Riau	SMPEI-IFAD 2022
190	2022	KHG Sungai Rokan - Sungai Kubu	Rokan Hilir	Riau	SMPEI-IFAD 2022
191	2022	KHG Sungai Siak Kecil - Sungai Siak	Bengkalis, Siak	Riau	SMPEI-IFAD 2022
192	2022	KHG Sungai Mading - Sungai Jelai	Ketapang	Kalimantan Barat	APBN 2022
193	2022	KHG Sungai Belitung - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	APBN 2022
194	2022	KHG Sungai Kapuas - Sungai Biangantuk (Kabupaten Sintang)	Sintang	Kalimantan Barat	APBN 2022
195	2022	KHG Sungai Keramat - Sungai Jelai (Kabupaten Ketapang)	Ketapang	Kalimantan Barat	APBN 2022
196	2023	KHG Batang Rokan Kiri - Batang Sosa	Kab. Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Riau	APBN 2023
197	2023	KHG Sungai Gonggan - Sungai Nilo	Kab. Pelalawan	Riau	APBN 2023
198	2023	KHG Sungai Indragiri - Sungai Cenaku	Kab. Indragiri Hulu	Riau	APBN 2023
199	2023	KHG Sungai Rokan Kiri - Sungai Mandau	Kab. Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Siak	Riau	GEF6-IMPLI 2022
200	2023	KHG Sungai Bangko - Sungai Rokan Kanan	Kab. Rokan Hilir	Riau	GEF6-IMPLI 2022
201	2023	KHG Batang Tembei - Sungai Merak	Kab. Merangin, Sarolangun	Jambi	GEF6-IMPLI 2022
202	2023	KHG Sungai Pengabuan - Sungai Baung	Kab. Tanjung Jabung Barat	Jambi	GEF6-IMPLI 2022
203	2023	KHG Sungai Mesuji - Sungai Kebumangah	Kab. Mesuji	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
204	2023	KHG Sungai Mesuji - Sungai Tulangbawang	Kab. Mesuji	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
205	2023	KHG Way Seputih	Kab. Tulangbawang	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
206	2023	KHG Way Terusan	Lampung Tengah	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
207	2023	KHG Way Wako - Way Kambas	Lampung Timur	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
208	2023	KHG Sungai Jenu - Sungai Labai	Kab. Kuburaya	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
209	2023	KHG Sungai Kapuas	Kab. Kuburaya	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
210	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Dawak	Kab. Kuburaya	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022

No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
211	2023	KHG Sungai Ketungau - Sungai Berau	Kab. Kapuas Hulu, Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
212	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Jentu	Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
213	2023	KHG Sungai Yebour - Sungai Landak	Kab. Kuburaya, Landak, Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
214	2023	KHG Sungai Nahaya - Sungai Landak	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
215	2023	KHG Sungai Sabuak - Sungai Landak	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
216	2023	KHG Sungai Sambih	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
217	2023	KHG Sungai Sengah - Sungai Landak	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
218	2023	KHG Sungai Inggis - Sungai Kapuas	Kab. Sanggau, Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
219	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Menukung	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
220	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Campedik	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
221	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Dekan Besar	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
222	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Muna	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
223	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Segelam	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
224	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Tayan	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
225	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Tembaga	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
226	2023	KHG Sungai Mias - Sungai Perogang	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
227	2023	KHG Sungai Tayan	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
228	2023	KHG Sungai Tayan - Sungai Muna	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
229	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Rusan	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
230	2023	KHG Sungai Rambai - Sungai Meliau	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
231	2023	KHG Sungai Akar	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
232	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Ayak	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
233	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Kubu	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
234	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Sebidau	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
235	2023	KHG Sungai Sekadau - Sungai Kenawan	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
236	2023	KHG Sungai Sekadau - Sungai Menterap	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
237	2023	KHG Sungai Menterap - Sungai Kerabat	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
238	2023	KHG Sungai Melawi - Sungai Batunanta	Kab. Melawi, Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
239	2023	KHG Sungai Melawi - Sungai Belimbing	Kab. Melawi	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
240	2023	KHG Sungai Melawi - Sungai Takelak	Kab. Melawi	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
241	2023	KHG Sungai Jerora - Sungai Majau	Kab. Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
242	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Jelawat Besar	Kab. Kapuas Hulu, Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
243	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Beran	Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
244	2024	KHG Alue Baksukon - Alue Semerah	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
245	2024	KHG Alue Getah - Krueng Le Mirah	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Nagan Raya	Aceh	APBN 2024
246	2024	KHG Alue Semerah - Krueng Batee	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
247	2024	KHG Krueng Baru - Krueng Aluetho	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
248	2024	KHG Krueng Batee - Krueng Kluet	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
249	2024	KHG Krueng Gubon - Krueng Meureubo	Kab. Aceh Barat	Aceh	APBN 2024

No	Tahun	KHG Inventarisasi Tahun 2020 – 2024 (Dit PKEG)	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
250	2024	KHG Krueng Kluet - Krueng Lembang	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
251	2024	KHG Krueng Lembang - Krueng Bakongan	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
252	2024	KHG Krueng Ligan - Krueng Masem	Kab. Aceh Jaya	Aceh	APBN 2024
253	2024	KHG Krueng Manggeng - Krueng Baru	Kab. Aceh Barat Daya	Aceh	APBN 2024
254	2024	KHG Krueng Masem	Kab. Aceh Jaya	Aceh	APBN 2024
255	2024	KHG Krueng Naca - Krueng Kapaksesak	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
256	2024	KHG Krueng On - Krueng Pneunom	Kab. Aceh Jaya	Aceh	APBN 2024
257	2024	KHG Krueng Pango - Krueng On	Kab. Aceh Jaya	Aceh	APBN 2024
258	2024	KHG Krueng Peungapet	Kab. Aceh Jaya	Aceh	APBN 2024
259	2024	KHG Krueng Pneunom - Krueng Lambalik	Aceh Barat, Aceh Jaya	Aceh	APBN 2024
260	2024	KHG Krueng Surin - Krueng Batee	Aceh Barat Daya, Nagan Raya	Aceh	APBN 2024
261	2024	KHG Krueng Susoh	Kab. Aceh Barat Daya	Aceh	APBN 2024
262	2024	KHG Krueng Susoh - Krueng Batee	Kab. Aceh Barat Daya	Aceh	APBN 2024
263	2024	KHG Krueng Tadu - Krueng Tripa	Kab. Nagan Raya	Aceh	APBN 2024
264	2024	KHG Krueng Teumiyee - Krueng Tadu	Kab. Nagan Raya	Aceh	APBN 2024
265	2024	KHG Krueng Trumon	Kab. Aceh Selatan	Aceh	APBN 2024
266	2024	KHG Lae Kumbi	Kota Subulussalam	Aceh	APBN 2024
267	2024	KHG Lae Puncu - Lae Tarap	Kota Subulussalam	Aceh	APBN 2024
268	2024	KHG Lae Rih - Lae Puncu	Kota Subulussalam	Aceh	APBN 2024
269	2024	KHG Lae Silabuhan - Lae Tambiski	Kab. Aceh Singkil	Aceh	APBN 2024
270	2024	KHG Lae Sulampi - Lae Gosong	Kab. Aceh Singkil	Aceh	APBN 2024
271	2024	KHG Lae Sulampi - Lae Rimo	Kab. Aceh Singkil	Aceh	APBN 2024
272	2024	KHG Lae Tarap - Lae Kumbi	Kota Subulussalam	Aceh	APBN 2024
273	2024	KHG Lae Tarap - Lae Sulampi	Kab. Aceh Singkil, Subulussalam	Aceh	APBN 2024
274	2024	KHG Sungai Barumon - Sungai Kubu	Kab. Rokan Hilir	Riau	GEF6-IMPLI 2024
275	2024	KHG Sungai Siak - Sungai Kampar	Kab. Pelalawan, Kab. Siak	Riau	GEF6-IMPLI 2024
276	2024	KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil	Kab. Bengkalis, Kota Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Riau	GEF6-IMPLI 2024

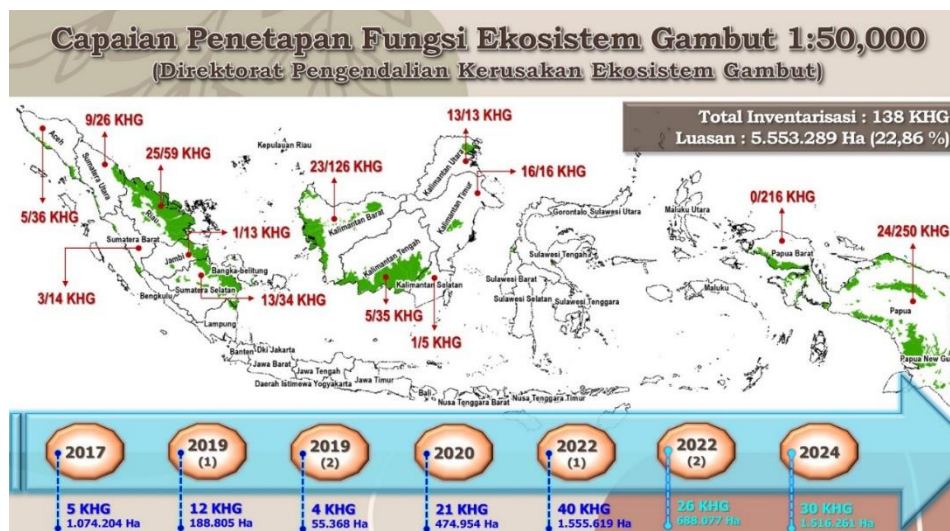
Pada Tahun 2024 ini telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada 30 KHG di Provinsi Aceh dengan pendanaan dari APBN murni 2024, serta 3 KHG di Provinsi Riau dengan sumber pendanaan dari GEF-6 IMPLI Project. Sebaran KHG dan pagu anggaran pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut sebagaimana disajikan pada berikut.

Sumber Dana	No.	Nama KHG	Luasan (Hektar)	Pagu Anggaran (Rp.)
APBN murni 2024	1.	KHG Alue Baksukon - Alue Semerah (Kab. Aceh Selatan)	598	1.275.520.536
	2.	KHG Alue Getah - Krueng Le Mirah (Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Nagan Raya)	3.185	
	3.	KHG Alue Semerah - Krueng Batee (Kab. Aceh Selatan)	1.470	
	4.	KHG Krueng Baru - Krueng Aluetho (Kab. Aceh Selatan)	968	
	5.	KHG Krueng Batee - Krueng Kluet (Kab. Aceh Selatan)	1.081	
	6.	KHG Krueng Gubon - Krueng Meureubo (Kab. Aceh Barat)	12.459	
	7.	KHG Krueng Kluet - Krueng Lembang (Kab. Aceh Selatan)	435	

Sumber Dana	No.	Nama KHG	Luasan (Hektar)	Pagu Anggaran (Rp.)
	8.	KHG Krueng Lembang - Krueng Bakongan (Kab. Aceh Selatan)	15.702	
	9.	KHG Krueng Ligan - Krueng Masem (Kab. Aceh Jaya)	3.015	
	10.	KHG Krueng Manggeng - Krueng Baru (Kab. Aceh Barat Daya)	1.340	
	11.	KHG Krueng Masem (Kab. Aceh Jaya)	2.860	
	12.	KHG Krueng Naca - Krueng Kapaksesak (Kab. Aceh Selatan)	1.395	
	13.	KHG Krueng On - Krueng Pneunom (Kab. Aceh Jaya)	4.848	
	14.	KHG Krueng Pango - Krueng On (Kab. Aceh Jaya)	5.861	
	15.	KHG Krueng Peungapet (Kab. Aceh Jaya)	4.081	
	16.	KHG Krueng Pneunom - Krueng Lambalik (Aceh Barat, Aceh Jaya)	7.860	
	17.	KHG Krueng Surin - Krueng Batee (Aceh Barat Daya, Nagan Raya)	12.890	
	18.	KHG Krueng Susoh (Kab. Aceh Barat Daya)	1.688	
	19.	KHG Krueng Susoh - Krueng Batee (Kab. Aceh Barat Daya)	482	
	20.	KHG Krueng Tadu - Krueng Tripa (Kab. Nagan Raya)	8.308	
	21.	KHG Krueng Teumiyee - Krueng Tadu (Kab. Nagan Raya)	5.625	
	22.	KHG Krueng Trumon (Kab. Aceh Selatan)	849	
	23.	KHG Lae Kumbi (Kota Subulussalam)	1.096	
	24.	KHG Lae Puncu - Lae Tarap (Kota Subulussalam)	1.826	
	25.	KHG Lae Rih - Lae Puncu (Kota Subulussalam)	1.322	
	26.	KHG Lae Silabuhan - Lae Tambiski (Kab. Aceh Singkil)	5.214	
	27.	KHG Lae Sulampi - Lae Gosong (Kab. Aceh Singkil)	9.545	
	28.	KHG Lae Sulampi - Lae Rimo (Kab. Aceh Singkil)	721	
	29.	KHG Lae Tarap - Lae Kumbi (Kota Subulussalam)	2.024	
	30.	KHG Lae Tarap - Lae Sulampi (Kab. Aceh Singkil, Subulussalam)	3.975	
Luas Total Inventarisasi dengan Sumber Dana APBN 2024			122.721	1.275.520.536
GEF-6 IMPLI Project	1.	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu (Kab. Rokan Hilir)	136.632	1.138.143.800
	2.	KHG Sungai Siak - Sungai Kampar (Kab. Pelalawan, Kab. Siak)	182.818	1.401.130.600
	3.	KHG Sungai Rokan - Sungai Siak Kecil (Kab. Bengkalis, Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak)	569.136	4.392.571.000
Luas Total Inventarisasi dengan Sumber Dana GEF-6 IMPLI Project			888.586	6.931.845.400

2.1.4. Capaian Penetapan FEG (Skala 1:50.000) Tahun 2015 - 2024

Sedangkan capaian penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000) periode 2015-2024, sebanyak 138 KHG dengan luasan $\pm 5.553.289$ Ha (22,86 %) dari total luasan KHG di Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



No.	Nomor Surat Keputusan	Tahun Penetapan	Kesatuan Hidrologis Gambut	Provinsi
1	SK.295/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/6/2017	2017 (5 KHG)	KHG Pulau Bengkalis	Riau
2			KHG Pulau Tebing Tinggi	Riau
3			KHG Sungai Kampar Sungai Gaung	Riau
4			KHG Sungai Gaung - Sungai Batang Tuaka	Riau
5			KHG Sungai Kapuas - Sungai Terentang	Kalimantan Barat
6	SK 938/MENLHK/SETJEN/ PKL.1/10/2019	2019 (4 KHG)	KHG Sungai Dadau - Sungai Sikan	Kalimantan Barat
7			KHG Aek Musi - Sungai Upang	Sumatera Selatan
8			KHG Krueng Meureubo - Krueng Matee	Aceh
9			KHG Krueng Wonki - Krueng Gubon	Aceh
10	SK.296/MENLHK/SET JEN/ KUM.1/4/2019	2019 (12 KHG)	KHG Krueng Matee - Krueng Tumiye	Aceh
11			KHG Krueng Surin - Krueng Muling	Aceh
12			KHG Krueng Tripa - Krung Seuneuam	Aceh
13			KHG Aek Maraitgadang - Aek Sikapas	Sumatera Utara
14			KHG Batang Toru - Aek Maraitgadang	Sumatera Utara
15			KHG Sungai Kanopan - Sungai Kuala	Sumatera Utara
16			KHG Sungai Kuala - Sungai Kuo	Sumatera Utara
17			KHG Aek Lunang - Aek Sidang	Sumatera Barat
18			KHG Aek Ubar - Aek Lunang	Sumatera Barat
19			KHG Batang Ampu - Bah Mandiangin	Sumatera Barat
20			KHG Sungai Kedangyantau - Sungai Sabintulung	Kalimantan Timur
21			KHG Sungai Kelinjau - Sungai Kedangyantau	Kalimantan Timur
22	SK.446/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2020	2020 (40 KHG)	KHG Sungai Indragiri - Sungai Enok	Riau
23			KHG Sungai Indragiri - Sungai Tuana	Riau
24			KHG Sungai Kanan - Sungai Buluh	Riau
25			KHG Sungai Nidir - Sungai Enok	Riau
26			KHG Sungai Pergam - Sungai Pucuk Besar	Riau
27			KHG Sungai Senama Kecil - Sungai Rajaelok	Riau
28			KHG Pulau Labu	Riau
29			KHG Pulau Merbau	Riau
30			KHG Pulau Serapung	Riau
31			KHG Pulau Topang	Riau
32			KHG Sungai Boang - Sungai Basira	Riau
33			KHG Sungai Indragiri	Riau
34			KHG Sungai Indragiri - Sungai Ekok	Riau
35			KHG Sungai Merusi - Sungai Belanak	Riau
36			KHG Sungai Rotoh - Sungai Bang	Riau
37			KHG Sungai Kampar Kiri - Sungai Segati	Riau
38			KHG Sungai Penyangkat - Sungai Selat Maya	Kalimantan Barat
39			KHG Sungai Mempawah - Sungai Peniti	Kalimantan Barat
40			KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung	Kalimantan Barat
41			KHG Sungai Lamandau - Sungai Arut	Kalimantan Tengah
42			KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan	Sumatera Selatan
43			KHG Aek Sebatik - Aek Musi	Sumatera Selatan
44			KHG Delta Talang	Sumatera Selatan
45			KHG Sungai Sedaung - Sungai Itai	Kalimantan Utara
46			KHG Sungai Batangkalis - Sungai Manday	Kalimantan Barat
47			KHG Sungai Embau - Sungai Kapuas	Kalimantan Barat
48			KHG Sungai Kapuas - Sungai Embau	Kalimantan Barat
49			KHG Sungai Musi - Sungai Rawas	Sumatera Selatan
50			KHG Sungai Aleki Eli - Sungai Aleki Mafe	Papua
51			KHG Sungai Aleki Male - Sungai Ifuleki Bian	Papua
52			KHG Sungai Alekikos Bakian - Sungai Ifuleki Bian	Papua
53			KHG Sungai Alik Alo - Sungai Alik Mauwk Ere	Papua
54			KHG Sungai Bob Buraka - Sungai Aleki Buraka	Papua
55			KHG Sungai Ifileki Bian - Sungai Lekiage Sentuf	Papua

No.	Nomor Surat Keputusan	Tahun Penetapan	Kesatuan Hidrologis Gambut	Provinsi
56			KHG Sungai Ifuleki Berapto - Sungai Ifuleki Obat	Papua
57			KHG Sungai Ifuleki Bian - Sungai Dalik	Papua
58			KHG Sungai Ifuleki Kumbe - Sungai Lekiage Ser	Papua
59			KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Bagon	Papua
60			KHG Sungai Alekikosi Kaswari - Sungai Alekikosi Digoel	Papua
61			KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Seme	Papua
62	SK.270/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2022	2022 (21 KHG)	KHG Sungai Wade Nanu - Sungai Wade Assue	Papua
63			KHG Sungai Bangkudulis - Sungai Umbus	Kalimantan Utara
64			KHG Sungai Bangkudulis	Kalimantan Utara
65			KHG Sungai Belanyu - Sungai Balai	Kalimantan Utara
66			KHG Sungai Terusan Teladan	Kalimantan Utara
67			KHG Sungai Kuis - Sungai Bapai	Papua
68			KHG Sungai Buru Bagaram	Papua
69			KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Siakha Homo	Papua
70			KHG Sungai Buru Mappi I	Papua
71			KHG Sungai Buru Obaa - Sungai Buru Mappi	Papua
72			KHG Sungai Jaman Kawarga - Sungai Samaleki Digul	Papua
73			KHG Sungai Jo Dairam	Papua
74			KHG Sungai Jo Vriendschaps - Sungai Jo Siret	Papua
75			KHG Sungai Ju Siret - Sungai Wade Assue	Papua
76			KHG Sungai Wade Passue	Papua
77			KHG Sungai Keeme - Sungai Bayeni	Papua
78			KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi	Sumatera Selatan
79			KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji	Sumatera Selatan
80			KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji	Sumatera Selatan
81			KHG Sungai Penu - Sungai Abah	Sumatera Selatan
82			KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	Kalimantan Selatan
83	SK.1152/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2022	2022 (26 KHG)	KHG Aek Garoga - Batang Toru	Sumatera Utara
84			KHG Aek Maraitgadang - Batang Maraitgodang	Sumatera Utara
85			KHG Aek Panggainsira - Aek Arong	Sumatera Utara
86			KHG Aek Sordang - Aek Kalang	Sumatera Utara
87			KHG Aek Sulpi - Aek Sibundong	Sumatera Utara
88			KHG Sungai Indragiri - Sungai Belilas	Riau
89			KHG Pulau Padang	Riau
90			KHG Pulau Rupa	Riau
91			KHG Sungai Mesao - Aek Rawas	Jambi
92			KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas	Sumatera Selatan
93			KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan	Sumatera Selatan
94			KHG Sungai Embalon - Sungai Palin	Kalimantan Barat
95			KHG Sungai Mendalam - Sungai Sambus	Kalimantan Barat
96			KHG Sungai Labai - Sungai Ambawang Besar	Kalimantan Barat
97			KHG Sungai Labai - Sungai Bantilkecil	Kalimantan Barat
98			KHG Sungai Mandor - Sungai Temila	Kalimantan Barat
99			KHG Sungai Mange - Sungai Dadau	Kalimantan Barat
100			KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Kumba	Kalimantan Barat
101			KHG Sungai Selakau	Kalimantan Barat
102			KHG Sungai Selakau - Sungai Sebangkau	Kalimantan Barat
103			KHG Sungai Selat Maya - Sungai Aping	Kalimantan Barat
104			KHG Sungai Siduk - Sungai Rantaupanjang	Kalimantan Barat
105			KHG Sungai Suruk - Sungai Mentebah	Kalimantan Barat
106			KHG Sungai Barito - Sungai Napu	Kalimantan Tengah
107			KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	Kalimantan Tengah
108			KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	Kalimantan Tengah
109	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2023-2024 (30 KHG)	KHG Sungai Mading - Sungai Jelai	Kalimantan Barat
110			KHG Sungai Belitung - Sungai Kapuas	Kalimantan Barat

No.	Nomor Surat Keputusan	Tahun Penetapan	Kesatuan Hidrologis Gambut	Provinsi
111	Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 2024		KHG Sungai Kapuas - Sungai Biangantuk	Kalimantan Barat
112			KHG Pulau Tanbuayabuaya	Kalimantan Timur
113			KHG Pulau Tanjungbuaya buaya	Kalimantan Timur
114			KHG Sei Batu Putih	Kalimantan Timur
115			KHG Sungai Belayan - Sungai Kelinjau	Kalimantan Timur
116			KHG Sungai Belayan - Sungai Melintang	Kalimantan Timur
117			KHG Sungai Jempang - Sungai Kedangpahu	Kalimantan Timur
118			KHG Sungai Kariabu	Kalimantan Timur
119			KHG Sungai Kedupan - Sungai Layah	Kalimantan Timur
120			KHG Sungai Lenggo	Kalimantan Timur
121			KHG Sungai Mahakam - Sungai Kedangpahu	Kalimantan Timur
122			KHG Sungai Mahakam - Sungai Sabintulung	Kalimantan Timur
123			KHG Sungai Melintang - Sungai Layah	Kalimantan Timur
124			KHG Sungai Pasir - Sungai Kuaro	Kalimantan Timur
125			KHG Sungai Tanbuayabuaya - Sungai Domaring	Kalimantan Timur
126			KHG Sungai Belanyu - Sungai Barang	Kalimantan Utara
127			KHG Sungai Mentarang - Sungai Belayu	Kalimantan Utara
128			KHG Sungai Mentarang - Sungai Siduyun	Kalimantan Utara
129			KHG Sungai Mentarang Sungai Sembakung	Kalimantan Utara
130			KHG Sungai Sebuku	Kalimantan Utara
131			KHG Sungai Sebuku - Sungai Sembakung	Kalimantan Utara
132			KHG Sungai Seputuk - Sungai Rian	Kalimantan Utara
133			KHG Sungai Sumbal - Sungai Samadik	Kalimantan Utara
134			KHG Sungai Ulakkedondong - Sungai Lumpur	Sumatera Selatan
135			KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	Sumatera Selatan
136			KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	Kalimantan Tengah
137			KHG Sungai Gasip - Sungai Siak	Riau
138			KHG Sungai Mendawai - Sungai Gasip	Riau

Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000) Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 34 KHG yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Provinsi	No.	Usulan KHG Penetapan 2024 (34 KHG)
Aceh	1.	KHG Alue Baksukon - Alue Semerah
	2.	KHG Krueng Alue Semerah - Krueng Bate
	3.	KHG Krueng Baru - Krueng Aluetho
Sumatera Utara	1.	KHG Aek Silang - Lae Renun
Jambi	1.	KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil
	2.	KHG Sungai Batang - Sungai Tungkal
	3.	KHG Sungai Baung - Sungai Betara
	4.	KHG Sungai Pengabuan - Sungai Baung
Riau	1.	KHG Sungai Bunut - Sungai Umban
	2.	KHG Sungai Kampar Kiri - Sungai Lipai
	3.	KHG Sungai Leko - Sungai Minas
	4.	KHG Sungai Mandiangin - Sungai Siak
	5.	KHG Sungai Minas - Sungai Mandiangin
	6.	KHG Sungai Nilo - Sungai Napuh
	7.	KHG Sungai Siak Kecil - Sungai Siak
	8.	KHG Sungai Tapung Kiri - Sungai Kiyap
Kalimantan Barat	1.	KHG Sungai Durian - Sungai Labai
	2.	KHG Sungai Inggis - Sungai Kapuas
	3.	KHG Sungai Jenu - Sungai Labai
	4.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Campedik

Provinsi	No.	Usulan KHG Penetapan 2024 (34 KHG)
	5.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Dekan Besar
	6.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Mandor
	7.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Muna
	8.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Tembaga
	9.	KHG Sungai Kualan - Sungai Lelayang
	10.	KHG Sungai Kualan - Sungai Sekucing
	11.	KHG Sungai Mias - Sungai Perogang
	12.	KHG Sungai Nahaya - Sungai Landak
	13.	KHG Sungai Sentinok - Sungai Kumba
Kalimantan Tengah	1.	KHG Sungai Mentaya - Sungai Seranau Kiri
	2.	KHG Sungai Pukun - Sungai Kelua Besar
Sulawesi Barat – Sulawesi Tengah	1.	KHG Sungai Laa – Sungai Petasia
	2.	KHG Sungai Lariang - Sungai Pasangkayu
	3.	KHG Sungai Pasangkayu - Sungai Bambalamotu

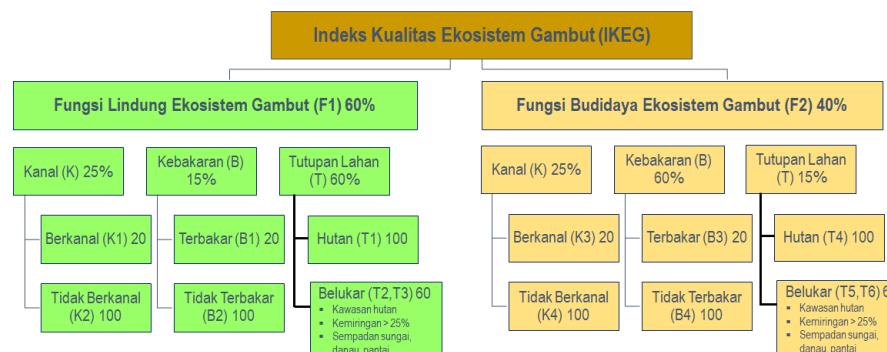
2.2. Kelompok Kerja Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

2.2.1. Dasar Hukum Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2.2.2. Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi ekosistem gambut, yaitu fungsi lindung atau fungsi budidaya. Parameter yang digunakan adalah kanal, kejadian kebakaran hutan/lahan serta penutupan lahan. Formulasi perhitungan IKEG dapat dilihat pada gambar berikut.



Perhitungan IKEG dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IKEG} = w1 * \text{Kanal} + w2 * \text{Areal Terbakar} + w3 * \text{Tutupan Lahan}$$

Keterangan:

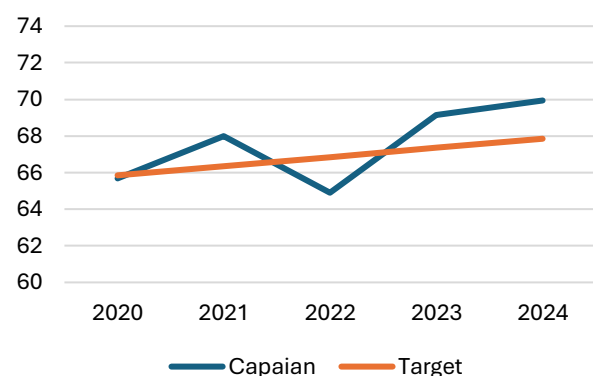
$w1-3$ = bobot tiap parameter

Data yang digunakan dalam perhitungan IKEG adalah Peta FEG skala 1:50.000 olahan Tahun 2024, Peta Area Terdampak Kanal, Data Areal Terbakar pada tahun 2023, dan Data Penutupan Lahan tahun 2023.

2.2.3. Capaian Indeks Kualitas Ekosistem Gambut 2020 – 2024

Berdasarkan data yang-data yang digunakan tersebut, didapatkan bahwa nilai IKEG Nasional pada tahun 2024 adalah 69,94 dengan target yakni 67,85. Adapun perbandingan target dan capain IKEG dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tahun	Rata-rata IKEG Nasional	Target
2020	65,70	65,85
2021	67,98	66,35
2022	64,90	66,85
2023	69,13	67,35
2024	69,94	67,85



Diidentifikasi bahwa kenaikan nilai IKEG terjadi karena adanya pemekaran 4 provinsi baru di region Papua, perbaikan penutupan lahan, dan pendetailan peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Pada tahun 2024, sudah dilakukan proses perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) pada 23 provinsi disajikan pada tabel berikut.

Matriks Perubahan Status IKEG tahun 2020 ke 2024		2024				
		sangat kurang	kurang	sedang	baik	sangat baik
2020	sangat kurang	0	0	0	0	0
	kurang	0	2	0	0	0
	sedang	0	4	5	1	0
	baik	0	0	0	5	1
	sangat baik	0	0	0	0	1
		0	0	0	0	4

Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	57.81	71.45	71.15	69.53	71.37
Bengkulu	58.50	58.50	44.44	43.99	43.99
Jambi	69.14	71.10	64.09	60.85	63.45
Kep. Bangka Belitung	79.51	78.93	78.39	75.52	76.71
Kep. Riau	63.08	63.34	63.58	63.7	63.77
Lampung	45.38	46.58	43.22	41.43	43.28
Riau	67.49	72.21	66.54	66.19	66.65
Sumatera Barat	52.91	51.97	46.64	44.09	45.81
Sumatera Selatan	61.70	66.18	64.34	61.85	60.49
Sumatera Utara	46.20	46.27	42.35	42.38	42.41
Kalimantan Barat	74.26	75.22	77.25	70.55	70.72
Kalimantan Selatan	53.15	56.47	49.63	49.19	44.54
Kalimantan Tengah	78.97	80.42	79.10	75.75	78.49
Kalimantan Timur	71.35	72.33	71.17	69.72	80.63
Kalimantan Utara	84.04	84.90	79.49	79.20	79.61
Sulawesi Barat	52.94	52.99	47.93	47.94	48.4
Sulawesi Tengah	51.75	51.75	52.55	53.48	51.46
Papua	84.53	94.05	94.78	96.14	96.94
Papua Barat	96.32	96.97	96.87	96.75	96.83
Papua Barat Daya				97.49	97.96
Papua Pegunungan				97.14	97.7
Papua Selatan				91.31	91.34
Papua Tengah				95.77	96.13

Rekapitulasi hasil perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut pada 125 kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Matriks Perubahan Status IKEG tahun 2020 ke 2024		2024				
		sangat kurang	kurang	sedang	baik	sangat baik
2020	sangat kurang	0	0	0	0	0
	kurang	0	21	2	0	0
	sedang	0	12	20	9	1
	baik	0	0	8	22	6
	sangat baik	0	0	0	1	20
		0	0	1	0	2

Provinsi	Kabupaten	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Kab. Aceh Barat	59.19	57.54	55.17	55.14	55.10
Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	50.22	50.07	45.83	45.71	45.82
Aceh	Kab. Aceh Jaya	58.28	57.26	55.74	56.85	56.27
Aceh	Kab. Aceh Selatan	63.48	86.29	87.27	84.73	87.39
Aceh	Kab. Aceh Singkil	55.86	73.85	74.65	71.65	74.90
Aceh	Kab. Nagan Raya	50.85	50.55	46.88	46.98	47.04
Aceh	Kota Subulussalam	54.99	70.09	70.30	66.63	72.80
Bengkulu	Kab. Muko Muko	58.50	58.50	44.44	43.99	43.99
Jambi	Kab. Merangin	43.13	44.36	40.07	38.58	40.18
Jambi	Kab. Muaro Jambi	69.91	73.70	66.35	60.24	63.85
Jambi	Kab. Sarolangun	42.60	43.36	39.85	39.90	39.90
Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	63.86	64.62	54.69	53.64	54.14
Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	74.44	75.30	69.09	67.57	70.82
Jambi	Kota Jambi	85.16	85.16	75.37	75.44	75.50
Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka	70.46	70.20	69.39	65.00	69.19
Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	78.90	79.55	78.97	76.94	80.39
Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	76.89	77.09	76.89	68.73	68.81
Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	85.01	82.99	82.42	82.51	82.64
Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	58.34	58.60	57.28	57.40	58.34
Kepulauan Riau	Kab. Karimun	63.08	63.34	63.58	63.70	63.77
Lampung	Kab. Mesuji	41.56	43.28	39.46	39.46	39.45
Riau	Kab. Bengkalis	70.13	75.66	68.06	67.90	68.87
Riau	Kab. Indragiri Hilir	60.64	61.77	58.25	58.50	58.86
Riau	Kab. Indragiri Hulu	57.30	80.24	74.79	73.18	73.73
Riau	Kab. Kampar	52.21	50.32	43.05	43.31	43.18
Riau	Kab. Kepulauan Meranti	74.43	82.44	75.62	70.98	72.84
Riau	Kab. Pelalawan	76.71	82.15	74.38	75.25	75.25
Riau	Kab. Rokan Hilir	61.59	62.31	55.00	53.81	53.17
Riau	Kab. Rokan Hulu	46.58	47.84	45.85	44.73	44.71
Riau	Kab. Siak	73.64	78.93	73.23	73.92	74.46
Riau	Kota Dumai	73.50	74.84	64.09	67.30	68.23
Riau	Kota Pekanbaru	57.94	58.01	54.04	53.98	53.97
Sumatera Barat	Kab. Agam	45.22	45.22	41.28	41.29	41.32
Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	44.66	44.68	40.43	40.46	40.43
Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	55.25	54.06	48.42	44.87	47.4
Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	57.03	58.77	59.84	53.17	58.75
Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	64.59	66.10	61.44	59.31	47.96
Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	54.03	63.44	61.72	60.11	60.14
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	67.77	53.02	49.54	50.84	50.83
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	47.74	47.15	43.53	43.13	41.3
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	67.59	72.96	69.06	68.49	63.12
Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	41.39	43.18	39.28	39.89	39.69
Sumatera Utara	Kab. Asahan	47.70	47.74	43.51	43.52	43.57
Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	58.00	58.00	58.00	84.54	85.02
Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	47.41	47.72	43.25	43.40	43.26
Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	42.46	42.46	38.99	38.96	38.96
Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	45.10	45.33	41.61	41.59	41.70
Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	42.97	42.68	40.13	40.18	40.16
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	54.28	49.26	46.05	46.05	48.45
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	45.93	45.80	43.29	42.93	42.76
Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	46.20	46.56	42.31	42.28	42.15
Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	90.82	90.42	90.28	89.83	91.13
Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	81.71	82.93	77.97	77.68	77.18
Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	76.46	80.19	76.55	74.87	75.04
Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	68.60	69.65	64.8	64.92	65.02
Kalimantan Barat	Kab. Landak	64.64	64.2	57.56	56.67	57.09
Kalimantan Barat	Kab. Melawi	46.91	50.43	47.71	50.64	50.05
Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	71.67	71.95	61.67	60.44	60.55

Provinsi	Kabupaten	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	Kab. Sambas	58.02	58.32	48.18	48.79	48.65
Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	74.34	74.29	71.71	72.39	73.03
Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	52.91	52.91	50.88	50.78	50.73
Kalimantan Barat	Kab. Sintang	57.23	57.22	54.96	55.24	54.28
Kalimantan Barat	Kota Pontianak	49.97	50.83	38.65	25.59	45.07
Kalimantan Barat	Kota Singkawang	53.41	57.91	46.97	41.47	40.30
Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	47.9	51.02	40.81	40.82	38.21
Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	32.06	38.89	57.37	45.85	38.68
Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	44.39	49.73	39.44	39.39	28.79
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	54.35	61.12	53.34	54.79	47.79
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	48.64	52.71	40.75	40.78	38.59
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	63.22	66.29	45.93	46.09	41.73
Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	66.31	66.52	76.71	76.67	74.58
Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	47.00	48.63	43.46	43.59	41.10
Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru			69.99	67.34	54.58
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	85.42	86.97	85.38	82.74	84.93
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	83.36	84.81	91.40	91.26	92.05
Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	74.27	77.88	76.10	74.72	76.94
Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	90.06	91.67	90.85	89.57	92.18
Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	78.67	82.04	78.77	70.62	76.36
Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	67.61	68.93	65.10	65.62	64.45
Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	76.4	80.03	75.65	72.36	75.74
Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	76.35	76.97	74.47	66.70	68.97
Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	67.64	74.79	77.32	75.02	75.47
Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	82.85	85.64	80.44	77.00	80.50
Kalimantan Timur	Kab. Berau	93.83	94.45	94.96	95.83	99.55
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	52.98	53.84	51.71	53.04	77.34
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	70.35	71.16	74.01	73.04	81.18
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	85.94	88.46	85.45	85.06	79.94
Kalimantan Utara	Kab. Malinau	97.56	97.83	97.83	94.32	94.32
Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	90.43	89.93	87.52	87.10	87.08
Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	73.50	76.60	66.22	66.07	67.15
Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	52.94	52.99	47.93	47.94	48.40
Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	48.27	48.27	52.45	53.79	50.90
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	54.03	54.03	51.89	52.11	51.66
Papua	Kab. Jayapura	74.09	95.51	96.49	96.75	96.99
Papua	Kab. Keerom	98.76	98.75	98.76	98.76	98.76
Papua	Kab. Mamberamo Raya	75.11	96.40	97.69	96.25	97.05
Papua	Kab. Sarmi	82.00	98.26	97.93	97.42	97.87
Papua	Kab. Waropen	97.17	97.30	95.95	93.53	96.37
Papua	Kota Jayapura	79.44	79.35	74.74	73.28	73.17
Papua Barat	Kab. Fak Fak	87.16	86.64	85.43	85.67	85.75
Papua Barat	Kab. Kaimana	97.97	98.59	98.64	98.88	98.82
Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	67.07	68.17	67.78	67.96	68.20
Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	96.42	97.24	97.12	97.12	97.23
Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	96.23	96.39	96.25	96.66	97.07
Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	96.80	96.92		99.99	99.99
Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	99.29	99.47	99.38	99.37	99.57
Papua Barat Daya	Kab. Sorong	98.03	98.53	97.96	98.25	97.94
Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	96.41	97.05	96.93	97.24	97.94
Papua Barat Daya	Kab. Tambrau	63.87	72.17	73.01	72.47	72.5
Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah		91.00	91.90	94.37	95.29
Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	66.62	96.48	97.39	98.68	99.08
Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	99.04	99.04	89.84	99.81	93.79
Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	70.22	92.54	93.16	91.72	92.52
Papua Selatan	Kab. Asmat	97.05	96.85	96.36	96.00	96.27
Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	92.87	92.88	93.03	92.83	92.91
Papua Selatan	Kab. Mappi	87.22	87.40	87.60	88.06	88.16

Provinsi	Kabupaten	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Papua Selatan	Kab. Merauke	70.48	74.13	74.57	73.77	71.25
Papua Tengah	Kab. Deiyai	99.18	99.18	99.75	99.37	99.39
Papua Tengah	Kab. Dogiyai	70.37	70.41	64.25	62.70	63.99
Papua Tengah	Kab. Intan Jaya			99.99	100	100
Papua Tengah	Kab. Mimika	98.16	98.06	98.11	98.02	97.95
Papua Tengah	Kab. Nabire	94.85	94.88	94.59	94.60	94.58
Papua Tengah	Kab. Paniai	75.21	75.09	74.38	72.88	72.82
Papua Tengah	Kab. Puncak	94.75	97.71	98.14	97.38	98.34
Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	80.46	99.19	97.67	95.85	97.72

2.3. Kelompok Kerja Indeks Respon Lingkungan Hidup

2.3.1. Dasar Hukum Indeks Respon Lingkungan Hidup – Gambut Lestari

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2.3.2. Capaian Indeks Respon Kinerja Daerah / Indeks Respon Lingkungan Hidup Tahun 2024

Secara umum terdapat peningkatan respon pada Program Gambut Lestari baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun respon unggul terdapat di aspek peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan. Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, misalnya pada aspek implementasi dan inovasi. Adapun beberapa intisari yang dapat diambil dari respon-respon tersebut adalah:

- Peningkatan upaya pemantauan TMAP
- Peningkatan aktivitas pembahasan gambut
- Peningkatan kegiatan revegetasi
- Revitalisasi ekonomi masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat

No	Provinsi & Kab/Kota	Persentase Pengisian (%)	Hasil Evaluasi (Nilai)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	100.00%	14.75
2	Kabupaten Aceh Barat	100.00%	30.50
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	100.00%	16.00
4	Kabupaten Aceh Jaya	100.00%	21.50
5	Kabupaten Aceh Selatan	100.00%	24.00
6	Kabupaten Aceh Singkil	100.00%	28.50
7	Kabupaten Nagan Raya	100.00%	43.00
8	Kota Subulussalam	100.00%	17.50
9	Sumatera Utara	100.00%	23.21
10	Kabupaten Asahan	42.86%	5.00
11	Kabupaten Humbang Hasundutan	0.00%	0.00
12	Kabupaten Labuhanbatu	100.00%	53.50
13	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	0.00%	0.00
14	Kabupaten Labuhanbatu Utara	0.00%	0.00
15	Kabupaten Mandailing Natal	71.43%	0.00
16	Kabupaten Tapanuli Selatan	100.00%	35.00
17	Kabupaten Tapanuli Tengah	0.00%	0.00
18	Sumatera Barat	35.29%	12.50
19	Kabupaten Agam	100.00%	42.00
20	Kabupaten Pasaman Barat	100.00%	10.00
21	Kabupaten Pesisir Selatan	0.00%	0.00
22	Riau	100.00%	83.11
23	Kabupaten Bengkalis	100.00%	54.00
24	Kabupaten Indragiri Hilir	100.00%	0.00
25	Kabupaten Indragiri Hulu	100.00%	44.50
26	Kabupaten Kampar	100.00%	7.00
27	Kabupaten Kepulauan Meranti	100.00%	20.00
28	Kabupaten Pelalawan	100.00%	0.00
29	Kabupaten Rokan Hilir	100.00%	5.00
30	Kabupaten Rokan Hulu	71.43%	5.00
31	Kabupaten Siak	100.00%	13.50
32	Kota Dumai	100.00%	23.00
33	Kota Pekanbaru	100.00%	10.50
34	Kepulauan Riau	52.94%	0.00
35	Kabupaten Karimun	100.00%	17.00
36	Kepulauan Bangka Belitung	100.00%	26.00
37	Kabupaten Bangka	100.00%	5.00
38	Kabupaten Bangka Barat	100.00%	20.50

No	Provinsi & Kab/Kota	Persentase Pengisian (%)	Hasil Evaluasi (Nilai)
39	Kabupaten Bangka Selatan	100.00%	17.00
40	Kota Pangkal Pinang	100.00%	7.00
41	Kabupaten Bangka Tengah	100.00%	15.00
42	Jambi	70.59%	15.00
43	Kabupaten Merangin	0.00%	0.00
44	Kabupaten Sarolangun	100.00%	37.50
45	Kabupaten Muaro Jambi	57.14%	7.50
46	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0.00%	0.00
47	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	42.86%	0.00
48	Kota Jambi	0.00%	0.00
49	Bengkulu	0.00%	0.00
50	Kabupaten Mukomuko	100.00%	0.00
51	Sumatera Selatan	100.00%	10.00
52	Kabupaten Banyuasin	100.00%	33.25
53	Kabupaten Muara Enim	100.00%	55.50
54	Kabupaten Musi Banyu Asin	100.00%	28.00
55	Kabupaten Musi Rawas	100.00%	29.00
56	Kabupaten Ogan Komering Ilir	100.00%	26.00
57	Kabupaten Musi Rawas Utara	100.00%	54.00
58	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	100.00%	36.75
59	Lampung	100.00%	0.00
60	Kabupaten Mesuji	57.14%	0.00
61	Kalimantan Barat	100.00%	58.89
62	Kabupaten Bengkayang	71.43%	24.00
63	Kabupaten Kapuas Hulu	100.00%	40.00
64	Kabupaten Kayong Utara	100.00%	51.25
65	Kabupaten Ketapang	100.00%	42.25
66	Kabupaten Kubu Raya	0.00%	0.00
67	Kabupaten Landak	14.29%	0.00
68	Kabupaten Melawi	0.00%	0.00
69	Kabupaten Sambas	100.00%	62.25
70	Kabupaten Sanggau	0.00%	0.00
71	Kabupaten Sekadau	100.00%	20.00
72	Kabupaten Sintang	0.00%	0.00
73	Kota Pontianak	100.00%	70.00
74	Kota Singkawang	100.00%	10.00
75	Kabupaten Mempawah	92.86%	18.50
76	Kalimantan Tengah	100.00%	18.21
77	Kabupaten Barito Selatan	100.00%	36.25
78	Kabupaten Barito Timur	64.29%	4.50
79	Kabupaten Kapuas	100.00%	28.50
80	Kabupaten Katingan	14.29%	10.00
81	Kabupaten Kotawaringin Barat	57.14%	22.00
82	Kabupaten Kotawaringin Timur	100.00%	13.50
83	Kabupaten Pulang Pisau	0.00%	0.00
84	Kabupaten Seruyan	64.29%	29.25
85	Kabupaten Sukamara	100.00%	17.00
86	Kota Palangkaraya	100.00%	57.50
87	Kalimantan Selatan	100.00%	79.36
88	Kabupaten Balangan	100.00%	17.00
89	Kabupaten Banjar	100.00%	16.50
90	Kabupaten Barito Kuala	100.00%	3.00
91	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0.00%	0.00
92	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	64.29%	0.00
93	Kabupaten Hulu Sungai Utara	100.00%	9.00
94	Kabupaten Tabalong	0.00%	0.00
95	Kabupaten Tapin	92.86%	41.00
96	Kota Banjarbaru	0.00%	0.00
97	Kalimantan Timur	100.00%	72.89
98	Kabupaten Berau	100.00%	42.25
99	Kabupaten Kutai Barat	100.00%	34.75
100	Kabupaten Kutai Kartanegara	14.29%	5.00
101	Kabupaten Kutai Timur	100.00%	68.75
102	Sulawesi Tengah	88.24%	5.71
103	Kabupaten Donggala	100.00%	0.00

No	Provinsi & Kab/Kota	Persentase Pengisian (%)	Hasil Evaluasi (Nilai
104	Kabupaten Morowali Utara	100.00%	45.75
105	Sulawesi Barat	100.00%	43.64
106	Kabupaten Pasangkayu	100.00%	48.00
107	Papua Barat	100.00%	0.00
108	Kabupaten Fakfak	0.00%	0.00
109	Kabupaten Kaimana	100.00%	0.00
110	Kabupaten Teluk Bintuni	0.00%	0.00
111	Kabupaten Teluk Wondama	0.00%	0.00
112	Kabupaten Pegunungan Arfak	0.00%	0.00
113	Papua	35.29%	1.50
114	Kabupaten Sarmi	71.43%	3.50
115	Kabupaten Keerom	0.00%	0.00
116	Kabupaten Waropen	100.00%	0.00
117	Kabupaten Jayapura	0.00%	0.00
118	Kabupaten Mamberamo Raya	0.00%	0.00
119	Kota Jayapura	0.00%	0.00
120	Kalimantan Utara	88.24%	51.93
121	Kabupaten Tana Tidung	92.86%	56.00
122	Kabupaten Nunukan	100.00%	35.50
123	Kabupaten Malinau	0.00%	0.00
124	Papua Tengah	11.76%	0.00
125	Kabupaten Nabire	100.00%	0.00
126	Kabupaten Puncak jaya	0.00%	0.00
127	Kabupaten Paniai	0.00%	0.00
128	Kabupaten Mimika	100.00%	0.00
129	Kabupaten Puncak	0.00%	0.00
130	Kabupaten Dogiyai	0.00%	0.00
131	Kabupaten Intan jaya	0.00%	0.00
132	Kabupaten Deiyai	0.00%	0.00
133	Papua Pegunungan	100.00%	4.00
134	Kabupaten Yahukimo	0.00%	0.00
135	Kabupaten Tolikara	0.00%	0.00
136	Kabupaten Mamberamo Tengah	0.00%	0.00
137	Kabupaten Yalimo	0.00%	0.00
138	Papua Selatan	100.00%	8.71
139	Kabupaten Merauke	85.71%	0.00
140	Kabupaten Boven Digoel	100.00%	7.00
141	Kabupaten Mappi	100.00%	19.50
142	Kabupaten Asmat	100.00%	20.50
143	Papua Barat Daya	100.00%	0.00
144	Kabupaten Sorong Selatan	0.00%	0.00
145	Kabupaten Raja Ampat	100.00%	33.50
146	Kabupaten Tambrau	0.00%	0.00
147	Kabupaten Maybrat	0.00%	0.00
148	Kabupaten Sorong	28.57%	0.00

Pada tahun 2024 juga dilakukan kerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan LPPM Universitas Riau melalui swakelola tipe II. Kerja sama ini bertujuan guna penyediaan dokumen hasil kajian, evaluasi, dan peningkatan kapasitas dalam program peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan lokus studi adalah Regional Sumatera.

Evaluasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Regional Sumatera Tahun 2024 mengungkapkan capaian penting dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat indikasi peningkatan pada beberapa parameter utama seperti kualitas udara, restorasi ekosistem gambut, dan penurunan angka kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mencerminkan efektivitas implementasi program-program strategis yang dilandasi pada prinsip keberlanjutan.

Namun, analisis kritis terhadap data evaluasi juga menunjukkan adanya tantangan yang berulang, termasuk degradasi lahan, pencemaran air, dan tekanan antropogenik akibat alih fungsi lahan. Perubahan iklim global yang memperburuk kerentanan ekosistem regional semakin mempertegas urgensi pendekatan berbasis ilmiah dan inovasi kebijakan yang adaptif.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah Regional Sumatera Tahun 2024, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan di masa depan:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan dan pencemaran, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lingkungan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kerusakan lingkungan, termasuk pembakaran hutan dan lahan.
2. Implementasi Kebijakan Berbasis Data dan Teknologi Penggunaan teknologi pemantauan berbasis satelit dan sistem informasi geografis (SIG) harus diperluas untuk memonitor kondisi lingkungan secara real-time. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak kerusakan lingkungan.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu diperluas. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, terutama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan Diperlukan dukungan untuk pengembangan sektor ekonomi hijau yang ramah lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan industri berbasis sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan. Pengembangan ekonomi hijau ini harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang merusak lingkungan, seperti industri ekstraktif.
5. Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem Program restorasi ekosistem, terutama di kawasan gambut dan hutan, harus diperluas dengan memanfaatkan pendekatan berbasis ekosistem. Pendanaan dan dukungan teknis untuk program rehabilitasi ekosistem gambut perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan restorasi dan pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan.
6. Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor Untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks, perlu adanya kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga-lembaga penelitian. Pendekatan multi-pihak ini akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengelolaan lingkungan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
7. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan Pendidikan lingkungan harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kesadaran akan pentingnya

pelestarian lingkungan perlu ditanamkan sejak dini untuk menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

8. **Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala** Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga independen. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diterapkan serta untuk melakukan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan.

2.4. Kelompok Kerja RPPEG

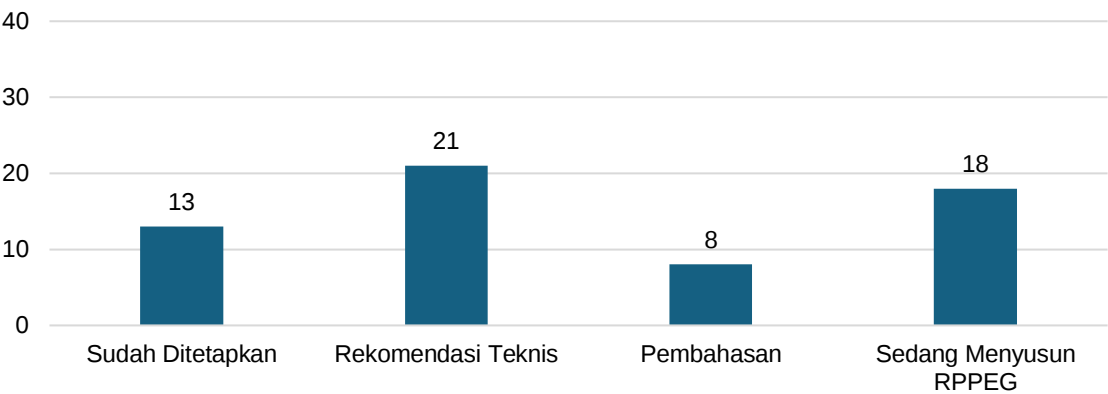
2.4.1. Dasar Hukum Kelompok Kerja RPPEG

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

2.5. Capaian RPPEG

Fasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sampai dengan Desember 2024 antara lain:

- 13 Daerah sudah menetapkan RPPEG
- 21 Rekomendasi Teknis (rekomtek) telah diterbitkan untuk RPPEG:
- 8 Daerah sedang proses pembahasan / perbaikan
- 18 Daerah sedang menyusun RPPEG
- Sosialisasi penyusunan RPPEG pada 91 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi



Rincian progres penyusunan dokumen RPPEG oleh Pemerintah Daerah selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

No.	Progres	Sedang Menyusun	Pembahasan	Rekomendasi Teknis	Ditetapkan
	Jumlah	18	8	21	13
1	Nama Daerah	Barito Selatan	Tanah Laut	Riau	Riau
2		Malinau	Kubu Raya	Pelalawan	Pelalawan
3		Kapuas Hulu	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
4		Kayong Utara	Seruyan	Kotawaringin Barat	Kotawaringin Barat
5		Ketapang	Sumatera Utara	Aceh	Aceh
6		Papua	Palangka Raya	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
7		Asmat	Kalimantan Barat	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
8		Boven Digoel		Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
9		Mappi		Indragiri Hulu	Indragiri Hulu
10		Merauke		Katingan	Katingan
11		Muaro Jambi		Tana Tidung	Tana Tidung
12		Tanjung Jabung Timur		Kutai Timur	Kutai Timur

No.	Progres	Sedang Menyusun	Pembahasan	Rekomendasi Teknis	Ditetapkan
13		Dumai		Jambi	Jambi
14		Siak		Indragiri Hilir	
15		Ogan Komering Ilir		Kalimantan Selatan	
16		Bengkalis		Aceh Barat	
17		Banyuasin		Nagan Raya	
18		Musi Banyuasin		Berau	
18				Kutai Kartanegara	
20				Papua Selatan	
21				Kutai Barat	

Sedangkan daerah yang sudah dilakukan sosialisasi penyusunan RPPEG Daerah antara lain:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Aceh | 32. Ogan Komering Ilir | 63. Kalimantan Barat |
| 2. Aceh Barat | 33. Penukal Abab Lematang Ilir | 64. Bengkayang |
| 3. Nagan Raya | 34. Jambi | 65. Kapuas Hulu |
| 4. Riau | 35. Kota Jambi | 66. Kayong Utara |
| 5. Bengkalis | 36. Merangin | 67. Ketapang |
| 6. Indragiri Hilir | 37. Muaro Jambi | 68. Kota Pontianak |
| 7. Indragiri Hulu | 38. Sarolangun | 69. Kota Singkawang |
| 8. Kampar | 39. Tanjung Jabung Barat | 70. Kubu Raya |
| 9. Kepulauan Meranti | 40. Tanjung Jabung Timur | 71. Landak |
| 10. Kota Dumai | 41. Kalimantan Tengah | 72. Melawi |
| 11. Kota Pekanbaru | 42. Barito Selatan | 73. Mempawah |
| 12. Pelalawan | 43. Barito Timur | 74. Sambas |
| 13. Rokan Hilir | 44. Kapuas | 75. Sanggau |
| 14. Rokan Hulu | 45. Katingan | 76. Sekadau |
| 15. Siak | 46. Kota Palangkaraya | 77. Sintang |
| 16. Sumatera Utara | 47. Kotawaringin Barat | 78. Kalimantan Selatan |
| 17. Asahan | 48. Kotawaringin Timur | 79. Balangan |
| 18. Humbang Hasundutan | 49. Lamandau | 80. Banjar |
| 19. Labuhanbatu | 50. Pulang Pisau | 81. Barito Kuala |
| 20. Labuhanbatu Selatan | 51. Seruyan | 82. Hulu Sungai Selatan |
| 21. Labuhanbatu Utara | 52. Sukamara | 83. Hulu Sungai Tengah |
| 22. Mandailing Natal | 53. Kalimantan Timur | 84. Hulu Sungai Utara |
| 23. Samosir | 54. Berau | 85. Tanah Laut |
| 24. Tapanuli Selatan | 55. Kutai Barat | 86. Papua |
| 25. Tapanuli Tengah | 56. Kutai Kartanegara | 87. Asmat |
| 26. Sumatera Selatan | 57. Kutai Timur | 88. Boven Digoel |
| 27. Banyuasin | 58. Paser | 89. Mappi |
| 28. Muara Enim | 59. Kalimantan Utara | 90. Papua Selatan |
| 29. Musi Banyuasin | 60. Malinau | 91. Merauke |
| 30. Musi Rawas | 61. Nunukan | |
| 31. Musi Rawas Utara | 62. Tana Tidung | |

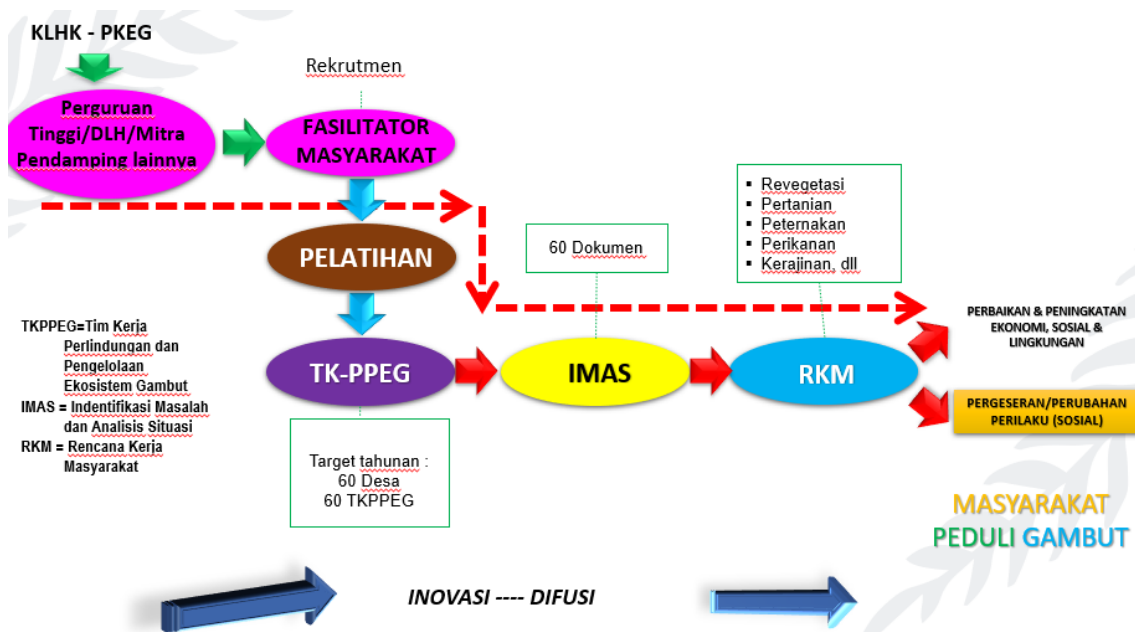
2.6. Kelompok Kerja Desa Mandiri Peduli Gambut

2.6.1. Dasar Hukum Kelompok Kerja Desa Mandiri Peduli Gambut

- Peraturan Direktur Jenderal PPKL Nomor 6 Tahun 2023 tentang Program Desa Mandiri Peduli Gambut

2.6.2. Bisnis Proses Desa Mandiri Peduli Gambut

Fasilitasi pembentukan/pengembangan DMPG di tahun 2024 telah dilaksanakan di 60 desa (terlampir). Pada Triwulan IV, alhamdulillah, tahapan keseluruhan relatif telah selesai. Masyarakat telah mengerjakan RKM yang diusulkan, dan melakukan pemeliharaan yang diperlukan sesuai dengan RKM usulan.



Uraian kegiatan dan aktivitas terkait tahapan pelaksanaan Fasilitasi tersebut, yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Penentuan dan Penetapan Lokasi Desa (Lampiran 1)
2. Penyusunan Kerjasama dengan 8 Universitas sebagai tim pendamping dalam Fasilitasi Pembentukan DMPG di Provinsi :
 - a. Sumatera Utara (Universitas Medan)
 - b. Sumatera Selatan (Universitas Sriwijaya)
 - c. Lampung (Universitas Lampung)
 - d. Kalimantan Timur (Universitas Mulawarman)
 - e. Kalimantan Barat (Universitas Tanjungpura)
 - f. Kalimantan Selatan (Universitas Lambung Mangkurat)
 - g. Sulawesi Barat (Universitas Sulawesi Barat)
 - h. Papua Selatan (Universitas Musamus)
3. Pendampingan DMPG oleh Universitas;
 - a. Penyusunan dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS)
 - b. Rekrutmen dan Pelatihan Fasilitator Masyarakat

- c. Pembentukan kelembagaan kelompok masyarakat yang dinamakan TKPPEG
- d. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
- e. Ekspose Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
- f. Monev Pelaksanaan RKM
4. Proses Pemberian Hibah (bantuan) kepada TKPPEG untuk Pelaksanaan RKM
5. Sosialisasi DMPG (Lampung, Sumsel, Kalbar, Sulbar, Papua Selatan)
6. Pemantauan dan Evaluasi (Monev) DMPG dilakukan di beberapa Provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua Selatan.
7. Pelaporan sudah berjalan dan/atau pada tahap penyelesaian

2.6.3. Capaian DMPG 2024

Berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatannya, maka proses **fasilitasi pembentukan DMPG di 60 desa di 8 Provinsi tahun 2024** telah mencapai **100%**. Seluruh desa telah memperoleh penyaluran bantuan pemerintah untuk **RKM senilai 6,588 milyar rupiah**.

Dalam perjalanan proses di tahun 2024, ruang lingkup kegiatan dalam kegiatan Fasilitasi Pembentukan DMPG ini bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan kelembagaan. Diantaranya adalah mendorong dan memfasilitasi partisipasi TKKPPEG dan/atau FM dari beberapa DMPG pada beberapa even, seperti Workshop Tata Kelola Perlindungan Ekosistem Gambut, Jambore DMPG, Festival PPKL dan Festival LIKE 2, dan beberapa kegiatan koordinasi dan Sosialisasi dengan sektor swasta untuk membangun dukungan dan kolaborasi dalam pengembangan DMPG.

Selengkapnya mengenai rincian aktivitas yang berkaitan dengan Fasilitasi DMPG, langsung maupun tidak langsung, yang dapat dilaporkan selama Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Bulan	Kegiatan dan Aktivitas Kelompok Kerja DMPG
Oktober	1) Pemantauan Evaluasi (MONEV) DMPG Provinsi Papua Selatan (1-3 Oktober) 2) Ekspos RKM DMPG Provinsi Sulawesi Barat (1 Oktober) 3) Ekspos RKM DMPG Prov. Kalbar (10 Oktober) 4) Ekspos RKM Provinsi Sumatera Utara (14 Oktober) 5) FGD tentang <i>Sustainable Value Creation</i> (SVC) untuk Program DMPG (16 Oktober)
November	1) Pemantauan Evaluasi (Monev) DMPG Prov. Kalsel (4-8Nov) 2) Survey (Kuesioner) SVC dengan Responden FM dan TKPPEG (Pekan ke-1 November) 3) Koordinasi penyiapan dokumen administrasi pencairan termin 2 kontrak pendampingan DMPG oleh Universitas dan pencairan tahap akhir bantuan Pemerintah kepada masyarakat (TKPPEG DMPG) 4) Penyusunan Laporan RB Tematik, TW 4, dan LKj PPKL (Pekan terakhir November)
Desember	1) Penyusunan Laporan; Laporan TW IV, Laporan RB Tematik, Kontribusi pada Laporan Kinerja PPKL

Desa-desa yang difasilitasi pembentukan DMPG berikut Rencana kegiatan masyarakat (RKM) dapat dilihat tabel berikut. Sebagaimana tahun lalu, maka target tahunan DMPG adalah 60 desa. Total Sebaran DMPG dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

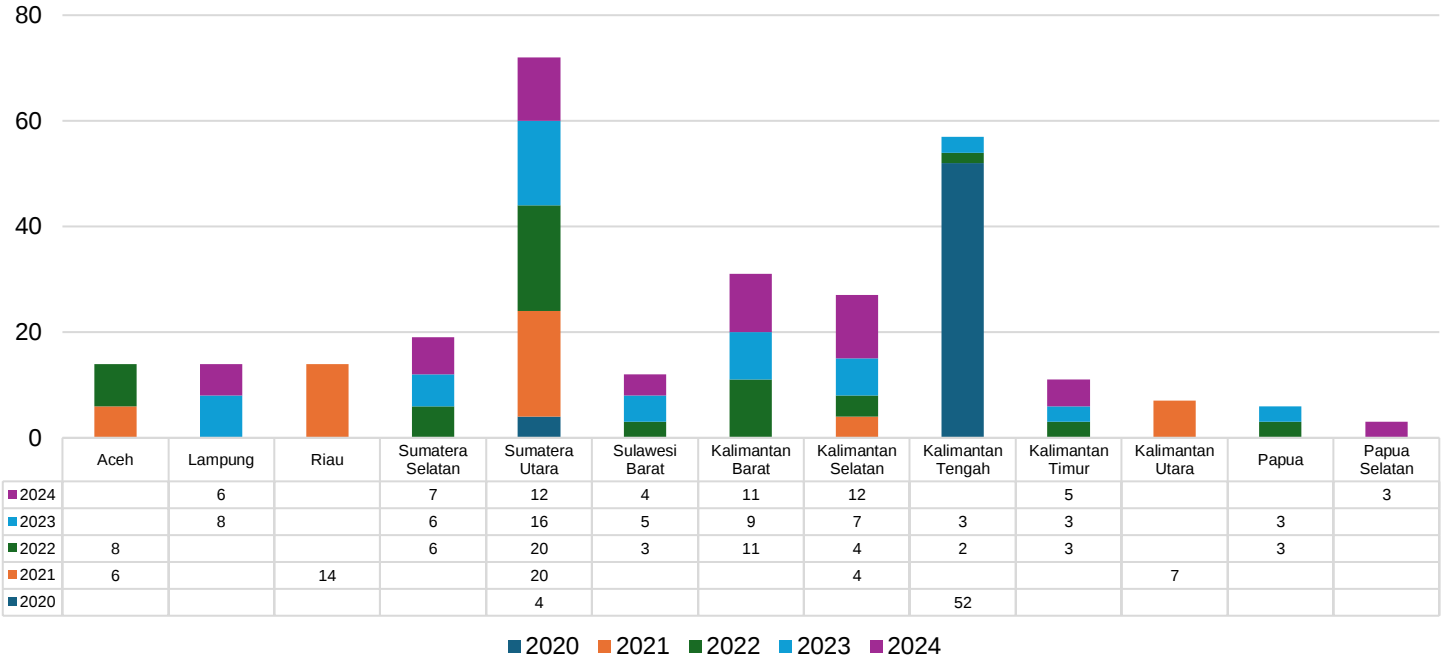
NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau
2	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya
3	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Jenamas	Tabatan
4	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Jenamas	Tampulang
5	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Karau Kuala	Babai
6	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Kalumpang
7	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Katimpun
8	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Katunjung
9	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Lahei Mangkutup
10	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Mantangai Hilir
11	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Mantangai Hulu
12	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Mantangai Tengah
13	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Pulau Kaladan
14	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Sei Ahas
15	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Tumbang Muroi
16	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Selat	Panamas
17	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Garung
18	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Henda
19	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Jabiren
20	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Pilang
21	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Sakakajang
22	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Simpur
23	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tanjung Taruna
24	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tumbang Nusa
25	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Buntoi
26	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Gohong
27	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Kalawa
28	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Mantaren I
29	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Mintin
30	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Bahaur Hilir
31	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Bahaur Tengah
32	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Cemantan
33	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Sei Rungun
34	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Tanjung Perawan
35	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Balukon
36	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Bukit Rawi
37	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Pamarunan
38	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Penda Barania
39	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Petuk Liti
40	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Tahawa
41	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Tanjung Sangalang
42	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Maliku	Kanamit
43	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Maliku	Kanamit Barat
44	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Maliku	Sei Baru Tewu
45	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Mekar Jaya
46	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Paduran Mulya
47	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Paduran Sebangau
48	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sebangau Jaya
49	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sebangau Mulya
50	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sebangau Permai
51	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sei Bakau
52	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sei Hambawang
53	2020	Sumatera Utara	Asahan	Sei Kepayang	Pertahanan
54	2020	Sumatera Utara	Asahan	Sei Kepayang	Sei Paham
55	2020	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Air Hitam
56	2020	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Kelapa Sebatang
57	2021	Aceh	Aceh Barat	Arongan Lambalek	Keub
58	2021	Aceh	Aceh Barat	Johan Pahlawan	Leuhan
59	2021	Aceh	Aceh Jaya	Sampoiniet	Jeumpheuk
60	2021	Aceh	Aceh Jaya	Teunom	Tanoh Anou
61	2021	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Kualo Baro
62	2021	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Padang Payang
63	2021	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pawalutan
64	2021	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pulau Damar

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
65	2021	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hulu
66	2021	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas
67	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Atap
68	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Lubakan
69	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Manuk Bungkul
70	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Pagar
71	2021	Kalimantan Utara	Tana' Tidung	Sesayap Hilir	Bandan Bikis
72	2021	Kalimantan Utara	Tana' Tidung	Sesayap Hilir	Bebatu
73	2021	Kalimantan Utara	Tana' Tidung	Sesayap Hilir	Sengkong
74	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Gaung	Simpang Gaung
75	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Gaung	Teluk Kabung
76	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Gaung Anak Serka	Rambaian
77	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Kempas	Bayas Jaya
78	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Kempas	Kerta Jaya
79	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Kempas	Sungai Rabit
80	2021	Riau	Indragiri Hulu	Kuala Cenaku	Pulau Jumat
81	2021	Riau	Indragiri Hulu	Rengat Barat	Redang
82	2021	Riau	Indragiri Hulu	Rengat Barat	Sialang Dua Dahan
83	2021	Riau	Indragiri Hulu	Tebing Tinggi Timur	Tanjung Sari
84	2021	Riau	Pelalawan	Kerumutan	Kerumutan
85	2021	Riau	Pelalawan	Kerumutan	Mak Teduh
86	2021	Riau	Pelalawan	Teluk Meranti	Pulau Muda
87	2021	Riau	Pelalawan	Teluk Meranti	Teluk Meranti
88	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Tanjung Mulia
89	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji
90	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji I
91	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji II
92	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji III
93	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji IV
94	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hilir	Sei Apung
95	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hilir	Teluk Binjai
96	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hulu	Sonomartani
97	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Air Hitam
98	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Kelapa Sebatang
99	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Pangkalan Lunang
100	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Teluk Pulau Dalam
101	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Kel. Pasar Baru Batahan
102	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Kuala Betahan
103	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar I Singkuang
104	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar II Singkuang
105	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Salebaru
106	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Tabayung
107	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Tabuyung
108	2022	Aceh	Aceh Barat	Johan Pahlawan	Leuhan
109	2022	Aceh	Aceh Barat	Kaway XVI	Peunia
110	2022	Aceh	Aceh Barat	Kaway XVI	Simpang
111	2022	Aceh	Aceh Jaya	Teunom	Batee Roo
112	2022	Aceh	Aceh Jaya	Teunom	Tanoh Anou
113	2022	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Kuala Baro
114	2022	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Kuala Trang
115	2022	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Padang Panyang
116	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Jongkat	Jongkat
117	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Jongkat	Sungai Nipah
118	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Jongkat	Wajok Hilir
119	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Hilir	Sengkubang
120	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Timur	Antibar
121	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Timur	Sejegi
122	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden
123	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Semudun
124	2022	Kalimantan Barat	Sanggau	Tayan Hilir	Lalang
125	2022	Kalimantan Barat	Sanggau	Toba	Balai Belungai
126	2022	Kalimantan Barat	Sintang	Dedai	Sungai Mali
127	2022	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pawalutan
128	2022	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pulau Damar
129	2022	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hulu
130	2022	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas
131	2022	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Pilang
132	2022	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tumbang Nusa
133	2022	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Puan Cepak
134	2022	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Muara Ancalong	Senyuir
135	2022	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Muara Bengkal	Mulupan
136	2022	Papua	Merauke	Jagebob	Jagebob Raya

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
137	2022	Papua	Merauke	Jagebob	Kartini
138	2022	Papua	Merauke	Tanah Miring	Sermayam Indah
139	2022	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Campaloga
140	2022	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Rantemario
141	2022	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Tommo
142	2022	Sumatera Selatan	Banyuasin	Air Salek	Saleh Jaya
143	2022	Sumatera Selatan	Banyuasin	Air Salek	Saleh Mulya
144	2022	Sumatera Selatan	Banyuasin	Makarti Jaya	Delta Upang
145	2022	Sumatera Selatan	PALI	Abab	Perambatan
146	2022	Sumatera Selatan	PALI	Penukal	Air Itam Timur
147	2022	Sumatera Selatan	PALI	Penukal Utara	Tempirai
148	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Desa Teluk Panji II
149	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Tanjung Mulia
150	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji 3
151	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji 4
152	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Aek Korsik
153	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid
154	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hilir	Sei Apung
155	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hilir	Sei Sentang
156	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hulu	Sonomartini
157	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hulu	Sukarame Baru
158	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Leidong	Air Hitam
159	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Leidong	Teluk Pulai Dalam
160	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Marbau	Aek Hitetoras
161	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Kuala Batahan
162	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Pasar Baru Batahan
163	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar Singkuang II
164	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Salibaru
165	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Tabuyung
166	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Tabuyung
167	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Natal	Desa Pasar V Natal
168	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hulu	Sukarame Baru
169	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Aek Korsik
170	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Aek Hitetoras
171	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Sei Sentang
172	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Pasar Tiga
173	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Telaga Suka
174	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Sei Nahodaris
175	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Bagan Bilah
176	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji II
177	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji III
178	2023	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Muara Batang Toru	Muara Manompas
179	2023	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Muara Batang Toru	Terapung Raya
180	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Sikapas
181	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Singkuang SP 1
182	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Singkuang SP 2
183	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Sali Baru
184	2023	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Tirtoraharjo
185	2023	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Air Gading
186	2023	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Sidomulyo
187	2023	Sumatera Selatan	PALI	Abab	Prambatan
188	2023	Sumatera Selatan	PALI	Penukal Utara	Tempirai
189	2023	Sumatera Selatan	PALI	Penukal	Air Itam Timur
190	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Bumi Ratu
191	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Gedung Karya Jitu
192	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Hargo Mulyo
193	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Hargo Rejo
194	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Karya Jitu Mukti
195	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Medasari
196	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Wono Agung
197	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Yudha Karya Jitu
198	2023	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pawalutan
199	2023	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pulau Damar
200	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas
201	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas Hulu
202	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Marampiau
203	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Baringin
204	2023	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Utara	Awang
205	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Retok
206	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Kuala Mandor A
207	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Teluk Bakung
208	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Lingga

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
209	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Sadaniang	Sekabuk
210	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Timur	Antibar
211	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden
212	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Hilir	Sengkubang
213	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Mendalok
214	2023	Kalimantan Tengah	Kapuas	Kapuas Barat	Pantai
215	2023	Kalimantan Tengah	Kapuas	Basarang	Batu Nindan
216	2023	Kalimantan Tengah	Kapuas	Bataguh	Budi Mufakat
217	2023	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sabintulung
218	2023	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sedulang
219	2023	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Liang Buaya
220	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Buana Sakti
221	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Tamemongga
222	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Tamejarra
223	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Leling Barat
224	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Leling Utara
225	2023	Papua	Merauke	Tanah Miring	Sermayam Indah
226	2023	Papua	Merauke	Kurik	Sumber Mulya
227	2023	Papua	Merauke	Kurik	Kaliki
228	2024	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Utara	Awang Baru
229	2024	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Utara	Awang
230	2024	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Utara	Telang
231	2024	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Utara	Batalas
232	2024	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Baringin B
233	2024	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Marampiau Hilir
234	2024	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Marampiau
235	2024	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Baringin A
236	2024	Kalimantan Selatan	Tapin	Tapin Selatan	Tandui
237	2024	Kalimantan Selatan	Tapin	Tapin Selatan	Lawahan
238	2024	Kalimantan Selatan	Balangan	Batu Mandi	Hamparaya
239	2024	Kalimantan Selatan	Balangan	Batu Mandi	Timbun Tulang
240	2024	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sabintulung
241	2024	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Puan Cepak
242	2024	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Liang Buaya
243	2024	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Kenohan	Tuana Tuha
244	2024	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Liang
245	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hulu	Sonomartini
246	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hilir	Teluk Binjai
247	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu	Panai Tengah	Bagan Bilah
248	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu	Panai Hulu	Meranti Paham
249	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu	Panai Hulu	Cinta Makmur
250	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu	Panai Tengah	Selat Beting
251	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Tanjung Mulia
252	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji II
253	2024	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji III
254	2024	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Singkungan SP1
255	2024	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Singkungan SP2
256	2024	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar 1 Singkuang
257	2024	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Campaloga
258	2024	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Rante Mario
259	2024	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Sandana
260	2024	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Leling
261	2024	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Sumber Makmur
262	2024	Sumatera Selatan	PALI	Tanah Abang	Harapan Jaya
263	2024	Sumatera Selatan	PALI	Abab	Betung Selatan
264	2024	Sumatera Selatan	PALI	Abab	Betung
265	2024	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Daya Utama
266	2024	Sumatera Selatan	Banyuasin	Sumber Marga Telang	Karang Baru
267	2024	Sumatera Selatan	Banyuasin	Tanjung Lago	Kuala Puntian
268	2024	Papua Selatan	Merauke	Kurik	Sumber Mulya
269	2024	Papua Selatan	Merauke	Kurik	Sumber Rejeki
270	2024	Papua Selatan	Merauke	Kurik	Jaya Makmur
271	2024	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Medasari
272	2024	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Wono Agung
273	2024	Lampung	Mesuji	Rawajitu Utara	Sidang Way Puji
274	2024	Lampung	Mesuji	Rawajitu Utara	Sidang Muara Jaya
275	2024	Lampung	Mesujii	Rawajitu Utara	Sidang Sido Rayahu
276	2024	Lampung	Mesuji	Rawajitu Utara	Sungai Sidang
277	2024	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Puguk
278	2024	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Pasak Piang
279	2024	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Sungai Enau
280	2024	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Raya	Sungai Asam

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
281	2024	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam
282	2024	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Raya	Parit Baru
283	2024	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Pinyuh	Peniraman
284	2024	Kalimantan Barat	Landak	Sengah Temila	Sebatih
285	2024	Kalimantan Barat	Landak	Sengah Temila	Pahauman
286	2024	Kalimantan Barat	Sambas	Tebas	Serindang
287	2024	Kalimantan Barat	Sambas	Selakau	Bentunai

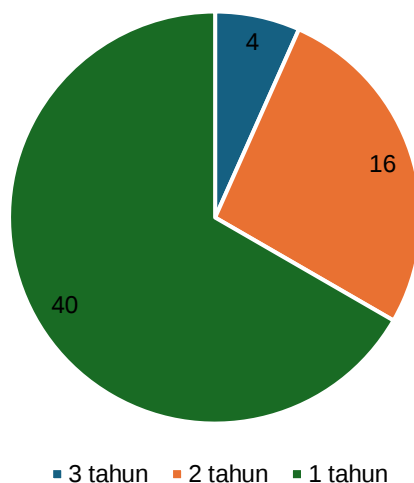


NO	DESA 2024	KABUPATEN	PROVINSI	NAMA TK-PPEG	NILAI RKM (Rp) (2024)
1	Awang Baru	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Berkat Bersama	Rp53.000.000
2	Awang	Hulu Sungai Tengah		Awang Jaya	Rp53.000.000
3	Telang	Hulu Sungai Tengah		Telang Berkah	Rp53.000.000
4	Batalas	Tapin		TK-PPEG Maju Baimbai	Rp53.000.000
5	Baringin B	Tapin		Padat Karya	Rp53.000.000
6	Marampiau Hilir	Tapin		Rakat Mupakat	Rp53.000.000
7	Marampiau	Tapin		Sepakat Bersama	Rp53.000.000
8	Baringin A	Tapin		Pemburu Berkah	Rp53.000.000
9	Tandui	Tapin		Tandui Bersama	Rp53.000.000
10	Lawahan	Tapin		Berkat Sholawat	Rp53.000.000
11	Hamparaya	Balangan		Tawilong Berkah	Rp53.000.000
12	Timbun Tulang	Balangan		Karya Muda	Rp53.000.000
13	Sabintulung	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Gambut Sabintulung Berjaya	Rp52.000.000
14	Puan Cepak	Kutai Kartanegara		Puan Cepak Masyarakat Mandiri	Rp52.000.000
15	Liang Buaya	Kutai Kartanegara		Kedang Rantau Etam Berjaya	Rp52.000.000
16	Tuana Tuha	Kutai Kartanegara		Telok Meraja Sakti	Rp52.000.000
17	Liang	Kutai Kartanegara		Liang Sejahtera Bersama	Rp52.000.000
18	Sonomartini	Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	Tani Agro Lestari	Rp52.000.000
19	Teluk Binjai	Labuhanbatu Utara		Binjai Lestari	Rp52.000.000
20	Bagan Bilah	Labuhanbatu		Berkah Abadi	Rp52.000.000
21	Meranti Paham	Labuhanbatu		Meranti Jaya	Rp52.000.000
22	Cinta Makmur	Labuhanbatu		Perintis Desa	Rp52.000.000
23	Selat Beting	Labuhanbatu		Selat Beting Hijau Lestari	Rp52.000.000
24	Tanjung Mulia	Labuhanbatu Selatan		Karya Mulia	Rp52.000.000
25	Teluk Panji II	Labuhanbatu Selatan		Panji Rukun	Rp52.000.000
26	Teluk Panji III	Labuhanbatu Selatan		Semangat Baru	Rp52.000.000
27	UPT Singkungan SP1	Mandailing Natal		Singkuang Jaya	Rp52.000.000
28	UPT Singkungan SP2	Mandailing Natal		Harapan Kita	Rp52.000.000
29	Pasar 1 Singkuang	Mandailing Natal		Sumber Jaya	Rp52.000.000
30	Campaloga	Mamuju	Sulawesi Barat	Pemuda Tani	Rp232.500.000
31	Rante Mario	Mamuju		Sumber Jaya	Rp232.500.000
32	Sandana	Mamuju		Bina Mandiri	Rp232.500.000
33	Leling	Mamuju		Karya Bersama	Rp232.500.000

NO	DESA 2024	KABUPATEN	PROVINSI	NAMA TK-PPEG	NILAI RKM (Rp) (2024)
34	Sumber Makmur	Banyuasin	Sumatera Selatan	Sri Lestari	Rp300.000.000
35	Harapan Jaya	PALI		Harapan Baru	Rp200.000.000
36	Betung Selatan	PALI		Berkat Yakini II	Rp200.000.000
37	Betung	PALI		Abbe Jaya	Rp200.000.000
38	Daya Utama	Banyuasin		Jaya Bersama	Rp300.000.000
39	Karang Baru	Banyuasin		Karang Mandiri	Rp52.000.000
40	Kuala Puntian	Banyuasin		Kualo Sejahtera	Rp52.000.000
41	Sumber Mulya	Merauke	Papua Selatan	Mitra Sejati	Rp200.000.000
42	Sumber Rejeki	Merauke		Berkah Tani	Rp200.000.000
43	Jaya Makmur	Merauke		Mekar Jaya	Rp200.000.000
44	Medasari	Tulang Bawang	Lampung	Maju Katon	Rp52.000.000
45	Wono Agung	Tulang Bawang		Rukun Sejahtera	Rp52.000.000
46	Sidang Way Puji	Mesuji		Maju Bersama	Rp232.500.000
47	Sidang Muara Jaya	Mesuji		Ridho Jaya	Rp232.500.000
48	Sidang Sido Rayahu	Mesujii		Rahayu Maju	Rp232.500.000
49	Sungai Sidang	Mesuji		Minergy	Rp232.500.000
50	Puguk	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Puguk Sejahtera	Rp120.000.000
51	Pasak Piang	Kubu Raya		Mandiri Gemilang	Rp120.000.000
52	Sungai Enau	Kubu Raya		Cahaya Lestari	Rp120.000.000
53	Sungai Asam	Kubu Raya		Setia Jaya	Rp120.000.000
54	Sungai Raya Dalam	Kubu Raya		Petani Mandiri	Rp100.000.000
55	Parit Baru	Kubu Raya		Karya Pejuang Gambut	Rp100.000.000
56	Peniraman	Mempawah		Sejahtera Jaya	Rp120.000.000
57	Sebatih	Landak		Gambut Jaya	Rp100.000.000
58	Pahauman	Landak		Arokn'g Kawah	Rp100.000.000
59	Serindang	Sambas		Usaha Bersama	Rp100.000.000
60	Bentunai	Sambas		Kokban Mandiri	Rp100.000.000

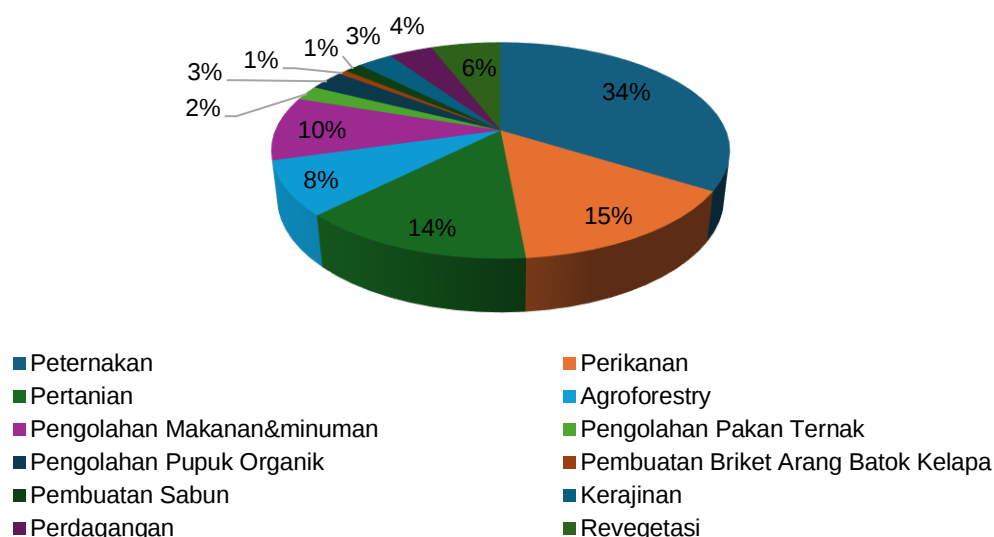
2.6.4. Karakteristik DMPG

Dari 60 desa intervensi tahun 2024, terdapat 40 desa baru dan selebihnya adalah desa-desa yang telah di-intervensi setahun sampai 2 tahun yang lalu



Dalam setiap DMPG, dibentuk kelompok masyarakat yang dinamakan TKPPEG. Jumlah anggota (termasuk pengurus) dalam setiap kelompok bervariasi, begitu pula keterlibatan perempuan dan laki-laki bervariasi (pembahasan lebih lanjut di sub-bab capaian kelompok kerja pengarusutamaan gender).

Apabila dilihat kegiatan-kegiatan yang diajukan TKPPEG dalam, relatif terdapat banyak variasi kegiatan. Ada RKM yang mencakup 1 kegiatan, namun ada juga yang mengusulkan 5 kegiatan. Dari keseluruhan kegiatan yang mencapai sekitar 136 kegiatan, jika dikelompokkan, terdapat sekitar 12 kelompok kegiatan.



Hal ini sedikit banyak memberikan gambaran akan potensi yang relatif besar dari berbagai desa yang diintervensi dengan Program DMPG. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KLHK, dan berbagai stakeholder utama di Tingkat Daerah untuk mengembangkan peluang dari berbagai kekayaan potensi masyarakat di Tingkat tapak.

Sebagaimana diketahui, salah satu isu utama dalam pengendalian kerusakan ekosistem hutan dan lahan, termasuk di dalamnya ekosistem gambut, yaitu kebakaran. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian kebakaran di tahun 2024 cenderung berkurang. Pada tahun 2024 kejadian kebakaran terdapat pada 6 desa dari total 60 desa. Akan tetapi hal ini tentu memerlukan pendataan yang lebih sistematis, misalnya mengenai sebab maupun intensitas kebakarannya.

No.	Provinsi	Jumlah DMPG	Kejadian Kebakaran (sebelum th. 2024)	Kejadian Kebakaran pada Desa DMPG Th. 2024	Jumlah Kejadian Kebakaran Th. 2024/total desa
1	Lampung	6	-	-	-
2	Sumsel	7	✓	-	-
3	Sumut	12	✓	✓	4 desa
4	Kaltim	5	✓	✓	1 desa
5	Kalbar	11	✓	-	-
6	Kalsel	12	✓	✓	1 desa
7	Sulbar	4	-	-	-
8	Papua Selatan	3	-	-	-

Selain itu, dari tingkat tapak diperoleh informasi dari tim pendamping bahwa secara umum pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran telah cukup memadai. Meskipun demikian edukasi terhadap masyarakat dan juga pengawasan, tentu perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan dan ekosistem hutan/lahan dan gambut, baik alami maupun budidaya, aman dari ancaman kebakaran. Pemerintah daerah sampai ke tingkat desa diharapkan dapat lebih memberikan perhatian dan menindaklanjuti hal ini.

2.6.5. Tantangan, Kendala, dan Saran Pelaksanaan Fasilitas

Sebuah literatur menyebutkan bahwa inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat akan direspon berbeda-beda oleh anggota masyarakat. Sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki kesediaan untuk berubah (*readiness to change*) yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam masyarakat memiliki kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama.

Dalam proses Pemantauan dan Evaluasi, Tim Kelompok Kerja DMPG Dit. PKEG KLHK, menjumpai hal-hal sebagai berikut di beberapa tempat.

- a. Rendahnya kapasitas beberapa FM
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat
- c. *Mindset* umum bahwa bantuan adalah kegiatan 'proyek sesaat'
- d. Rendahnya ide kreatif dan semangat dalam melaksanakan kegiatan.
- e. Keterbatasan ragam keahlian masyarakat untuk menunjang prioritas usaha kelompok.
- f. Rendahnya kemampuan melakukan komunikasi efektif dan mengelola media sosial untuk mendukung kegiatan.
- g. Kurangnya peran Lembaga Desa sebagai *support system* DMPG

Pada triwulan IV ini, beberapa kendala dalam pelaksanaan diantaranya sebagai berikut.

1. Adanya perubahan komposisi anggaran ikut mempengaruhi ruang lingkup kegiatan. Pada Triwulan ke-4, tidak semua Provinsi yang direncanakan untuk kunjungan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan.
2. Proses pencairan anggaran dan hal-hal terkait administratifnya, merupakan kegiatan yang membutuhkan alokasi waktu yang tidak sedikit dan dirasa kurang efisien, antara lain karena beberapa perubahan persyaratan administrasi.

Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang didapat diperoleh beberapa masukan, di antaranya:

1. Merumuskan indikator keberlanjutan DMPG
2. Merumuskan dengan jelas pengelolaan antara DMPG 'baru' dan DMPG 'lama'
3. Mengkoordinasikan dan mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan DMPG, khususnya dari sisi pengembangan pasar produk-produk lokal DMPG
4. Mengembangkan Forum atau *Mini event* atau workshop yang lebih focus pada pengembangan DMPG termasuk dari sisi kewirausahaan.

2.6.6. Success Story DMPG

DMPG Desa Antibar, Kabupaten Mempawah

Program DMPG dilaksanakan pada tahun 2023, dengan program unggulan masyarakatnya adalah budidaya tanaman jahe putih. Budidaya dilakukan pada lahan seluas 1,25 hektar. Budidaya memerlukan waktu 10 bulan dimulai dengan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan. Sampai dengan bulan Oktober 2024, telah dilakukan 1 kali panen pada sebagian lahan dengan hasil panen jahe seberat 4 ton. Total potensi keseluruhan lahan adalah 12 ton. Penen dilakukan bergilir agar siklus budidaya dan panen tetap terjaga.



Saat ini, hasil panen jahe telah diekspor ke Malaysia dengan harga Rp. 32.000/kg sehingga diperoleh hasil penjualan jahe adalah Rp.128.000.000. Hasil yang didapatkan digunakan untuk penyiapan lahan kembali, upah pekerja (masyarakat desa), dan kebutuhan lain untuk pengembangan budidaya jahe tersebut. Rencana ke depannya adalah perluasan lahan untuk budidaya jahe sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Antibar.

DMPG Desa Kuala Mandor A, Kabupaten Kubu Raya

Program DMPG di Desa Kuala Mandor A memiliki program unggulan budidaya madu kelulut. Program dilaksanakan pada lahan masyarakat tepatnya dibawah pohon sawit dikarenakan agar mendapatkan teduhan dan pohon di sekitar tempat budidaya sehingga madu yang dihasilkan bisa maksimal. Saat ini telah dibudidayakan madu di 90 sarang. Setiap sarang mampu menghasilkan sekitar 250 ml untuk sekali panen. Panen dilakukan setiap akhir bulan. Madu yang dihasilkan memiliki rasa manis-asam yang memiliki aroma dan rasa seperti mengandung sari buah di dalamnya, pada bulan September – November madu memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan bulan Desember – Agustus.



Saat ini hasil produksi madu dikemas dalam ukuran 500 ml dan dipasarkan melalui jaringan di sekitar desa mereka. Harga untuk 1 botolnya berkisar Rp.50.000. Untuk produksi secara besar belum mampu dilakukan karena hasil yang diperoleh belum banyak dan bisa memenuhi permintaan. Rencana ke

depannya adalah mengembangkan budidaya madu kelulut ini di areal yang lebih luas dengan lebih banyak sarang sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak dan mampu dipasarkan untuk pasar yang lebih besar dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Bidan Senior, Penggerak DMPG Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan

Walaupun usia relatif tidak muda lagi, tidak menjadi penghalang bagi wanita satu ini untuk terus berkarya dan bekerja demi kemajuan kampung tempat tinggalnya. Sebagai penduduk transmigran asal Jawa, Bidan Suryani mampu beradaptasi dan menjadi bagian dari komunitas masyarakat di distrik (sebutan untuk Desa) Kurik, Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan.



Pada Tahun 2022 Kampung (Desa) Sumber Mulya terpilih menjadi salah satu Desa yang diintervensi Program DMPG. Melalui kelompok TKPPEG Kharisma Sejati, sang Ketua Bidan Suryani, membuktikan bahwa perempuan bisa berkarya dan berkontribusi untuk perlindungan ekosistem gambut.



Semua anggota Tim Kharisma Sejati adalah wanita. Menyadari bahwa kampungnya dipilih sebagai Desa binaan dalam program Pemerintah, TKPPEG Kharisma Sejati tidak menyia-niyakan kesempatan tersebut. Bersama tim pendamping teknis dari perguruan tinggi setempat yaitu Universitas Musamus dan Fasilitator Masyarakat (FM) yang melakukan asistensi di lapangan, Tim Kharisma Sejati menyusun dan mengajukan rencana kerja masyarakat (RKM) untuk pengembangan ternak ayam kampung, budidaya tanaman cabai dan petatas (ubi jalar). Antusiasme 7 orang wanita personal Kharisma Sejati tampak melalui kekompakkan dan kesungguhan mereka dalam merealisasikan RKM-nya.

Selama mengikuti Program, Tim Kharisma Sejati telah berhasil panen cabai sebanyak 200 – 300 kg di tahun pertama, ditambah keripik ubi, pisang, dan singkong. Selain itu, budidaya ayam yang semula 200 ekor, kemudian berkembang menjadi lebih dari 400 ekor. Sebagian diantaranya dan beberapa elah berhasil dijual dan menambah pendapatan kelompok.

Tim KLHK melihat langsung lokasi ternak ayam kampung dan lahan perkebunan tanaman cabai dan ubi jalarnya. Sampai tahun 2024, yaitu pada tahun ke-3 intervensi Program DMPG, aktivitas Bidan Suryani dan kawan-kawan masih berlanjut.

Semangat Bidan Suryani yang ditularkan kepada anggota TKPPEG serta dukungan tim pendamping, FM dan perangkat desa menjadi faktor penentu keberhasilan Kharisma Sejati dalam implementasi DMPG di Distrik Kurik.

DMPG Desa Teluk Panji III, Budidaya Lele sambil Bangun Sekat Kanal untuk Membasahi Ekosistem Gambut

Desa Teluk Panji III merupakan salah satu desa plasma PT. Abdi Budi Mulia yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Seluruh wilayah Desa adalah lahan gambut. Ancaman kebakaran di musim kemarau dan banjir saat musim hujan kerap menghampiri desa tersebut setiap tahun. Tahun 2021 desa ini mendapatkan kesempatan bergabung menjadi salah satu desa DMPG. Selama 3 tahun, TKPPEG Semangat Baru DMPG Desa Teluk Panji III diberikan wawasan mengenai pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut seperti Rewetting, Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekonomi. Tim Semangat Baru beranggotakan 11 orang dan 4 di antaranya adalah wanita.

Pada tahun 2021 Tim Semangat Baru RKM pengembangan ternak sapi sebanyak 4 ekor, penanaman pohon pinang dan pembangunan 5 unit sekat kanal. Pada tahun kedua, Tim Semangat Baru melakukan budidaya ikan lele menggunakan kolam terpal plastik sebanyak 4 kolam dan penanaman jahe merah. Pada tahun ketiga, kolam budidaya lele bertambah. Selain itu Tim Semangat Baru mencoba budidaya ternak kambing sebanyak 10 ekor. Jadi dalam 3 tahun, Tim Semangat Baru telah berhasil memiliki 14 kolam lele, ternak kambing sebanyak 25 ekor dan telah ikut membangun 11 unit sekat kanal. Sekat kanal merupakan infrastruktur untuk pembasahan lahan gambut.



Pendapatan masyarakat mulai terlihat bertambah. Berdasarkan evaluasi tim pendamping, inisiasi kegiatan perekonomian yang dilakukan Tim Semangat Baru terlihat meningkatkan nilai ekonomi dalam kelompok sebesar 7%. Aktivitas TKPPEG Semangat Baru rupanya menimbulkan keingintahuan masyarakat

lainnya. Khususnya soal budidaya ikan lele dan ternak kambing. Masyarakat lainnya, di luar anggota, tertarik untuk mencoba. Tidak hanya itu, interaksi dan komunikasi sosial terjadi pula antar pemangku kepentingan. Perangkat desa mengapresiasi yang dilakukan Tim Semangat Baru dan menambah bantuan untuk pengembangan budidaya lele kepada masyarakat.

2.7. Kelompok Kerja Pemulihan Ekosistem Gambut

2.7.1. Dasar Hukum Pemulihan Ekosistem Gambut

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri
- Peraturan Direktur Jenderal PPKL Nomor 5 Tahun 2018 tentang Juknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Bagian Usaha dan Kegiatan
- Peraturan Direktur Jenderal PPKL Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Pemulihan Ekosistem Gambut bagi Usaha

2.7.2. Capaian Pemulihan - Kumulatif 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Pemulihan Ekosistem Gambut memberikan mandat kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan di areal ekosistem gambut untuk melaksanakan pemulihan. Pemilihan ekosistem gambut di lapangan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut, yang meliputi tatacara restorasi hidrologis melalui pemasangan sekat kanal (dengan pelimpasan atau tanpa pelimpasan), stasiun pemantauan curah hujan, sumur pemantauan Tinggi Muka Air Tanah manual, dan alat pemantau Tinggi Muka Air Tanah otomatis (*data logger*), pemulihan vegetasi yang dilaksanakan dengan rehabilitasi, revegetasi, dan suksesi alami.

Capaian pemulihan ekosistem gambut di areal konsesi sampai dengan bulan Desember 2024 diuraikan dalam Tabel berikut.

RINCIAN PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT DI AREAL KONSESI
PER BULAN DESEMBER 2024

	PBPH		Perkebunan		Total	
Jumlah Perusahaan	73		328		401	
Luas Pemulihan Ekosistem Gambut	2.466.804,23	Ha	1.692.040,40	Ha	4.158.898,63	Ha
Jumlah TP TMAT	4.148	unit	5.952	unit	10.100	unit
Jumlah Stasiun Curah Hujan	239	unit	724	unit	963	unit
Jumlah Sekat kanal Eksisting	9.865	unit	25.656	unit	35,521	unit
Luas Rehabilitasi Vegetasi	191.270,84	Ha	-	Ha	191.270,84	Ha
Luas Rehabilitasi Vegetasi Areal Bekas Terbakar	27.230,35	Ha	11.513,29	Ha	38.743,64	Ha

2.8. Kelompok Kerja Sekat Kanal

2.8.1. Dasar Hukum Kelompok Kerja Sekat Kanal

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

2.8.2. Dasar dan Lingkup Kegiatan Sekat Kanal

Upaya pembangunan infrastruktur hidrologis dilakukan dengan cara restorasi (tata kelola air) dengan membuat penyekatan saluran dan parit, serta reforestasi melalui pemilihan jenis tanaman yang adaptif yang dapat hidup di lahan basah untuk membantu agar lahan gambut tetap lembab dan selalu dalam keadaan basah, sehingga mencegah terjadinya penurunan/ degradasi dan kebakaran. Karena melalui tata kelola air yang benar akan menghambat laju penurunan/subsidence lahan gambut.

Prinsip dasar pemulihan fungsi ekosistem gambut dilakukan dengan pembasahan gambut, rehabilitasi vegetasi, dan peningkatan perikehidupan masyarakatnya (sosial, budaya, dan ekonomi) atau dengan kata lain “*rewetting, revegetation, and improve local community livelihood.*” Oleh karena itu, kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut disinkronisasi dengan kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut.



Salah satu infrastruktur perbaikan tata kelola air adalah pembangunan sekat kanal, yaitu untuk memperbaiki dan menutup kebocoran-kebocoran air di lahan gambut sehingga ekosistem gambut tetap basah dan mencegah resiko kekeringan yang menyebabkan kebakaran dan penurunan permukaan lahan (*land subsidence*).

Jumlah dan desain sekat kanal (dengan atau tanpa *spill way*) yang akan dibangun disesuaikan kondisi tingkat kerusakan lahan gambut dan kanal yang telah terlanjur dibangun memotong kontur, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Tahapan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut melalui pembangunan sekat kanal dilaksanakan dengan tahapan mulai dari perencanaan melalui kegiatan survei lapangan, penyusunan DED dan RAB, serta pembangunan sekat kanal dengan melibatkan masyarakat lokal.

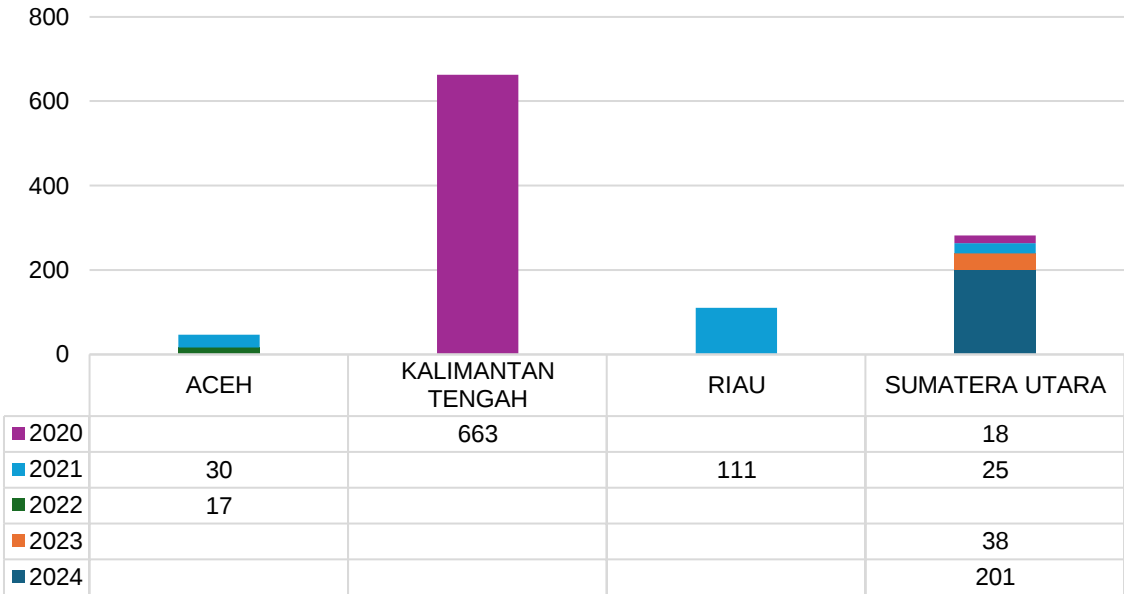
2.8.3. Capaian Pembagunan Sekat Kanal 2020 - 2024

Dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Direktorat PKEG telah berhasil membangun 902 unit sekat kanal di lahan masyarakat dengan perkiraan luasan terbasahi adalah 42.479 Ha. Pada tahun 2024 Direktorat PKEG berhasil membangun 201 sekat kanal baru dengan perkiraan luas pembahasan adalah 6.030 Ha, sehingga secara kumulatif sekat kanal di lahan masyarakat menjadi 1.103 unit dan luas pembasahan adalah 48.509,7 Ha.

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	Jumlah Sekat Kanal (Unit)	Luasan Terbasahi (Ha)	Tahun Pembuatan
ACEH	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Padang Payang	KHG Krueng Teumiyee - Krueng Tadu	5	100	2021
				KHG Krueng Teumiyee - Krueng Tadu	3	60	2022
		Kuala Baru	Kuala Baro	KHG Krueng Meureubo - Krueng Matee	3	60	2022
			Kuala Baru	KHG Krueng Meureubo - Krueng Matee	5	100	2021
	Aceh Jaya	Teunom	Tanoh Anou	KHG Krueng On - Krueng Pneunom	5	100	2021
			Batee Roo	KHG Krueng Pango - Krueng On	6	120	2022
		Panga	Keude Panga	KHG Krueng Pango - Krueng On	5	100	2021
	Aceh Barat	Johan Pahlawan	Leuhan	KHG Krueng Gubon - Krueng Meureubo	5	100	2021
				KHG Krueng Gubon - Krueng Meureubo	2	40	2022
		Arogan Lambalek	Keub	KHG Krueng Wonki - Krueng Gubon	5	100	2021
RIAU	Indragiri Hilir	Kempas	Bayas Jaya		4	120	2021
			Sungai Rabbit		5	150	2021
			Kerta Jaya		4	120	2021
		Gaung Anak Serka	Rambaian		9	270	2021
		Gaung	Simpang Gaung		10	300	2021
			Teluk Kabung		9	270	2021
	Pelalawan	Teluk Meranti	Teluk Meranti		10	300	2021
			Pulau Muda		10	300	2021
		Kerumutan	Mak Teduh		10	300	2021
			Kerumutan		10	300	2021
	Indragiri Hulu	Rengat Barat	Redang		10	300	2021
		Tebing Tinggi Timur	Tanjung Sari		10	300	2021
		Kuala Cenaku	Pulau Jumat		10	300	2021
SUMATERA UTARA	Labuhan Batu Utara	Kualuh Leidong	Air Hitam		5	85	2020
			Kelapa Sebatang		4	68	2020
			Pangkalan Lunang	KHG Sungai Asahan - Sungai Leidong	5	100	2021
		Kuala Hulu	Sonomartani	KHG Sungai Leidong – Sungai Kuala	16	480	2024
		Kuala Hilir	Teluk Binjai	KHG Sungai Leidong – Sungai Kuala	26	780	2024
	Asahan	Sei Kapayang	Pertahanan		9	153	2020
	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji II	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	5	100	2021
			Teluk Panji II	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	5	150	2023
			Teluk Panji III	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	5	100	2021
				KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	6	180	2023
				KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	5	150	2024
			Tanjung Mulia	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	17	510	2024
	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar I Singkuang	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	5	100	2021
				KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	8	240	2024
			Tabuyung	KHG Batang Singkuang - Nainjan Nu Godang	5	100	2021
				KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	6	180	2024
			UPT Singkuang SP 1	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	5	135	2023
				KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	14	420	2024
			UPT Singkuang SP 2	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	10	305	2023
				KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	14	420	2024
	Labuhan Batu	Panai Tengah	Sei Nahodaris	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	5	140	2023
			Bagan Bilah	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	7	195	2023
				KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	25	750	2024
			Sei Tawar	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	14	420	2024

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	Jumlah Sekat Kanal (Unit)	Luasan Terbasahi (Ha)	Tahun Pembuatan
			Meranti Paham	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	18	540	2024
			Selat Beting	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	8	240	2024
		Panai Hulu	Cinta Makmur	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	18	540	2024
	Tapanuli Tengah	Kolang	Makarti Nauli	KHG Aek Sordang - Aek Kalang	5	150	2024
			Rawa Makmur	KHG Aek Sordang - Aek Kalang	7	210	2024
KALIMANTAN TENGAH	Kapuas	Mentangai	Mentangai Hulu		272	15.617	2020
	Pulau Pisau	Jabiren Raya	Tumbang Nusa		220	14.979,80	2020
	Barito Selatan				95	3.240	2020
	Palangka Raya				76	2.461,90	2020
* JUMLAH					1.103	48.509,7	

Sebaran Sekat Kanal di 4 Provinsi



Adapun rekapitulasi sebaran lokasi dan biaya kegiatan pembangunan sekat kanal tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Biaya (Rp)	Jumlah Sekat Kanal (unit)
Sumatera Utara	Labuhanbatu	Panai Hilir	Sei Tawar	310.354.000	14
		Panai Tengah	Bagan Bilah	600.406.000	25
		Panai Tengah	Meranti Paham	380.756.000	18
		Panai Tengah	Selat Beting	226.794.000	8
		Panai Hulu	Cinta Makmur	410.489.000	18
	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar 1 Singkuang	218.979.000	8
		Muara Batang Gadis	UPT Singkuang SP1	356.428.000	14
		Muara Batang Gadis	UPT Singkuang SP2	333.343.000	14
		Muara Batang Gadis	UPT Tabuyung	140.903.000	6
	Tapanuli Tengah	Kolang	Makarti Nauli	130.145.000	5
		Kolang	Rawa Makmur	239.579.000	7
	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hulu	Sonomartani	388.129.000	16
		Kualuh Hulu	Teluk Binjai	682.251.000	26
	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji III	126.870.000	5
		Kampung Rakyat	Tanjung Mulia	490.465.000	17
Jumlah	5 Kabupaten	7 Kecamatan	15 Desa	5.035.891.000	201 Unit

2.9. Kelompok Kerja Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah

2.9.1. Dasar Hukum Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengukuran Muka Air Tanah Gambut
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
- Peraturan Direktur Jenderal PPKL Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan TMTAT dan Subsistensi di Lahan Masyarakat
- Keputusan Dirjen PPKL Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kriteria Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perkebunan di Ekosistem Gambut

2.9.2. SiMATAG

SiMATAG-0,4m (Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter) adalah sistem informasi pengelolaan data muka air tanah gambut. SiMATAG-0,4m diluncurkan pada acara Asia-Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Incheon-Korea Selatan, dalam Stream-5, tanggal 18 Juni 2019. Sistem ini dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMTAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat.

Database tersebut mengelola data pemantauan dari 10.771 titik pengamatan Tinggi Muka Air Tanah (TMTAT) yang tersebar di seluruh Indonesia dan diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gawai (mobile application based). Informasi dari database tersebut utamanya digunakan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pelaksanaan tata kelola air perusahaan dengan indikator data pemantauan tinggi muka air tanah (TMTAT) $\leq 0,4$ meter. Selain itu SiMATAG digunakan pula sebagai early warning system untuk mendeteksi daerah gambut yang kering dan rawan terbakar, terutama di areal milik masyarakat.

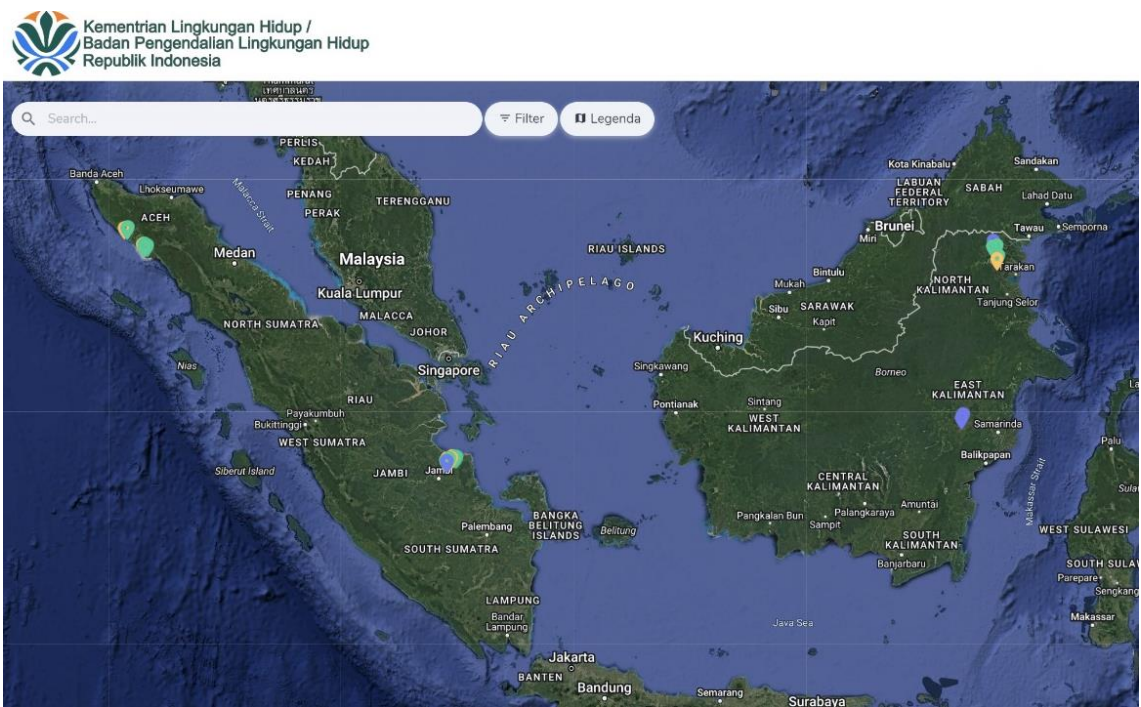
2.9.3. Stasiun Pemantauan TMTAT di Areal Masyarakat

Sampai saat ini, Direktorat PKEG memiliki/mengelola 36 stasiun eksisting dan sedang membangun 11 stasiun baru dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Stasiun	Provinsi	Kabupaten	Desa	Anggaran Pengadaan	Tahun	Koor X	Koor Y
1	GIZ SUPA_ST-01	Aceh	Aceh Barat	Keub	GIZ SUPA	2023	96,00273	4,28836
2	GIZ SUPA_ST-02	Aceh	Aceh Barat	Beurawang	GIZ SUPA	2023	96,07594	4,29985
3	GIZ SUPA_ST-03	Aceh	Aceh Barat	Pange	GIZ SUPA	2023	96,06861	4,29106
4	GIZ SUPA_ST-04	Aceh	Aceh Barat	Kuta Padang	GIZ SUPA	2023	96,06666	4,27887

No	Kode Stasiun	Provinsi	Kabupaten	Desa	Anggaran Pengadaan	Tahun	Koor X	Koor Y
5	GIZ SUPA_ST-05	Aceh	Nagan Raya	Kayee Uno	GIZ SUPA	2023	96,46164	3,91462
6	GIZ SUPA_ST-06	Aceh	Nagan Raya	Lueng Keubeu Jagat	GIZ SUPA	2023	96,43512	3,88989
7	GIZ SUPA_ST-07	Aceh	Nagan Raya	Makarti Jaya	GIZ SUPA	2023	96,48985	3,90696
8	GIZ SUPA_ST-08	Aceh	Nagan Raya	Pulo Kruet	GIZ SUPA	2023	96,49076	3,88507
9	GIZ SUPA_ST-09	Aceh	Nagan Raya	Sumber Bakti	GIZ SUPA	2023	96,48494	3,85268
10	GIZ SUPA_ST-10	Aceh	Nagan Raya	Blang Luah	GIZ SUPA	2023	96,54679	3,85471
11	SMPEI_ST-01	Riau	Indragiri Hilir	Rambaian	GEF5 - SMPEI	2022	103,14283	0,20050
12	SMPEI_ST-02	Riau	Indragiri Hilir	Kerta Jaya	GEF5 - SMPEI	2022	102,81005	0,46027
13	SMPEI_ST-03	Riau	Indragiri Hulu	Tanjung Sari	GEF5 - SMPEI	2022	102,71694	0,42361
14	SMPEI_ST-04	Riau	Indragiri Hulu	Redang	GEF5 - SMPEI	2022	102,42278	0,29417
15	SMPEI_ST-05	Riau	Pelalawan	Kerumutan	GEF5 - SMPEI	2022	102,38000	0,04556
16	SMPEI_ST-06	Riau	Pelalawan	Teluk Meranti	GEF5 - SMPEI	2022	102,56639	0,14917
17	KIFC_ST-01	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Jati Mulyo	KIFC	2021	103,93118	-1,22679
18	KIFC_ST-02	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Jati Mulyo	KIFC	2021	103,94520	-1,25896
19	KIFC_ST-03	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Rantau Indah	KIFC	2021	103,94889	-1,22071
20	KIFC_ST-04	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Catur Rahayu	KIFC	2021	103,91199	-1,26797
21	KIFC_ST-05	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Catur Rahayu	KIFC	2021	103,88474	-1,28753
22	KIFC_ST-06	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Catur Rahayu	KIFC	2021	103,86501	-1,29751
23	KIFC_ST-07	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Koto Kandis Dendang	KIFC	2021	103,99432	-1,25130
24	KIFC_ST-08	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Koto Kandis Dendang	KIFC	2021	104,02262	-1,25950
25	KIFC_ST-09	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Rawasari	KIFC	2021	104,04628	-1,25762
26	KIFC_ST-10	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Teluk Dawan	KIFC	2021	103,80790	-1,30400
27	KIFC_ST-11	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Rukam	KIFC	2021	103,77925	-1,34601
28	KIFC_ST-12	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Rukam	KIFC	2021	103,79423	-1,35895
29	GIZ PROPEAT_ST-07	Kalimantan Timur	Kutai Barat	Kampung Minta	GIZ PROPEAT	2023	116,25894	-0,31192
30	GIZ PROPEAT_ST-08	Kalimantan Timur	Kutai Barat	Muara Enggelam	GIZ PROPEAT	2023	116,31000	-0,22000
31	GIZ PROPEAT_ST-02	Kalimantan Utara	Nunukan	Lubakan	GIZ PROPEAT	2023	117,11192	3,87062
32	GIZ PROPEAT_ST-03	Kalimantan Utara	Nunukan	Manuk Bungkul	GIZ PROPEAT	2023	117,00083	3,84925
33	GIZ PROPEAT_ST-04	Kalimantan Utara	Nunukan	Atap	GIZ PROPEAT	2023	117,08042	3,86283
34	GIZ PROPEAT_ST-06	Kalimantan Utara	Nunukan	Pembeliangan	GIZ PROPEAT	2023	117,01657	3,97068

No	Kode Stasiun	Provinsi	Kabupaten	Desa	Anggaran Pengadaan	Tahun	Koor X	Koor Y
35	GIZ PROPEAT_ST-01	Kalimantan Utara	Tana Tidung	Sengkong	GIZ PROPEAT	2023	117,1546	3,61288
36	GIZ PROPEAT_ST-05	Kalimantan Utara	Tana Tidung	Bebatu	GIZ PROPEAT	2023	117,11444	3,53584
37	IMPLI_ST-01	Riau	Siak	Dayun	GEF6 - IMPLI	2024	102,338367	0,87081
38	IMPLI_ST-02	Riau	Siak	Rawa Mekar Jaya	GEF6 - IMPLI	2024	102,33833	0,87078
39	IMPLI_ST-03	Riau	Bengkalis	Temiang	GEF6 - IMPLI	2024	101,92536	1,4722616
40	IMPLI_ST-04	Riau	Bengkalis	Tasik Serai	GEF6 - IMPLI	2024	101,925385	1,4722533
41	IMPLI_ST-05	Jambi	Muaro Jambi	Tanjung	GEF6 - IMPLI	2024	103,97540	1,42231
42	IMPLI_ST-06	Jambi	Muaro Jambi	Gedong Karya	GEF6 - IMPLI	2024	104,05516	1,35589
43	IMPLI_ST-07	Jambi	Muaro Jambi	Jebus	GEF6 - IMPLI	2024	103,98565	1,39381
44	IMPLI_ST-08	Jambi	Muaro Jambi	Sungai Aur	GEF6 - IMPLI	2024	104,07314	1,33758
45	IMPLI_ST-09	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Muara Merang	GEF6 - IMPLI	2024	104,10118	1,17594
46	IMPLI_ST-10	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Muara Medak	GEF6 - IMPLI	2024	103,96076	1,85419
47	IMPLI_ST-11	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Muara Medak (2)	GEF6 - IMPLI	2024	104,06383	1,81669



posisi 47 stasiun pada tangkapan layar dari situs <https://pkgppkl.menlhk.go.id:88/app-simatag/>

2.10. Kelompok Kerja PROPER Gambut

2.10.1. Dasar Hukum PROPER Gambut

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 267)
- Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 119 Tahun 2024 tentang Kriteria Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perkebunan di Ekosistem Gambut

2.10.2. Aspek Penilaian PROPER Gambut

Penilaian pada aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai kriteria dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut menggunakan kriteria penilaian

Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 119 Tahun 2024 tentang Kriteria Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perkebunan di Ekosistem Gambut.

Kriteria penilaian pada Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut terdiri atas:

- a. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut;
- b. Legalitas Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut;
- c. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut;
- d. Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut; dan
- e. Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Penilaian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang secara faktual berada di lahan Gambut dan telah diusahakan dilakukan pada kelima aspek tersebut sedangkan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang secara faktual berada di lahan non Gambut hanya dilakukan pada kriteria Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut dan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

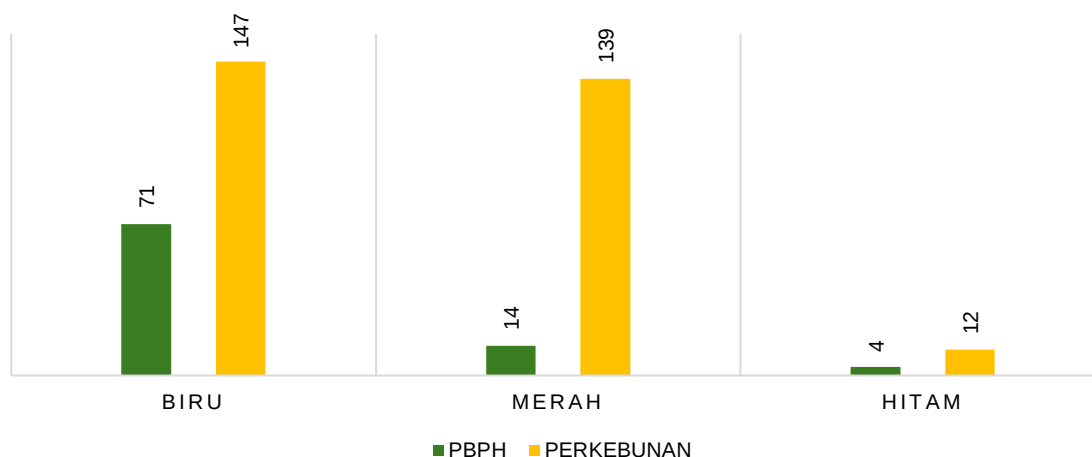
Sebagai catatan, PROPER Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perkebunan di Ekosistem Gambut baru pertama kali dilakukan sehingga dinilai perlu diberikan kebijakan TAAT pada penilaian. Kebijakan penilaian tersebut adalah untuk usaha/dan atau kegiatan yang:

- a) Telah memiliki instalasi pengolahan air limbah, atau
- b) Memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah, atau sedang mengajukan Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah namun belum selesai prosesnya;

2.10.3. Hasil Evaluasi PROPER Gambut

PROPER Gambut diikuti oleh **400 konsesi**, yang mana sejumlah 13 konsesi dianggap tidak layak untuk dinilai / **kurang persyaratan**, sehingga penilaian PROPER pada periode Juli 2023 s/d Juni 2024 dilakukan pada **387** (Tiga ratus Delapan Puluh Tujuh) perusahaan yang **terdaftar** memiliki akun SIMPEL, dengan rincian pada sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebanyak 89 perusahaan dan sektor perkebunan sebanyak 298 perusahaan. Hasil akhir penilaian Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagai berikut:

- sebanyak **218** perusahaan (56%) mendapat peringkat **BIRU** (TAAT), jumlah tersebut terdiri atas 71 perusahaan PBPH dan 147 perusahaan perkebunan.
- sebanyak **153** perusahaan (40%) mendapat peringkat **MERAH** (TIDAK TAAT) karena belum memenuhi aspek ketaatan, jumlah tersebut terdiri atas 14 perusahaan PBPH dan 139 perusahaan perkebunan;
- sebanyak **16** perusahaan mendapat peringkat **HITAM** (TIDAK TAAT), jumlah tersebut terdiri atas 4 perusahaan PBPH dan 12 perusahaan perkebunan;



2.11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

2.11.1. Dasar Hukum Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2.11.2. Program Kegiatan Pengarusutamaan Gender

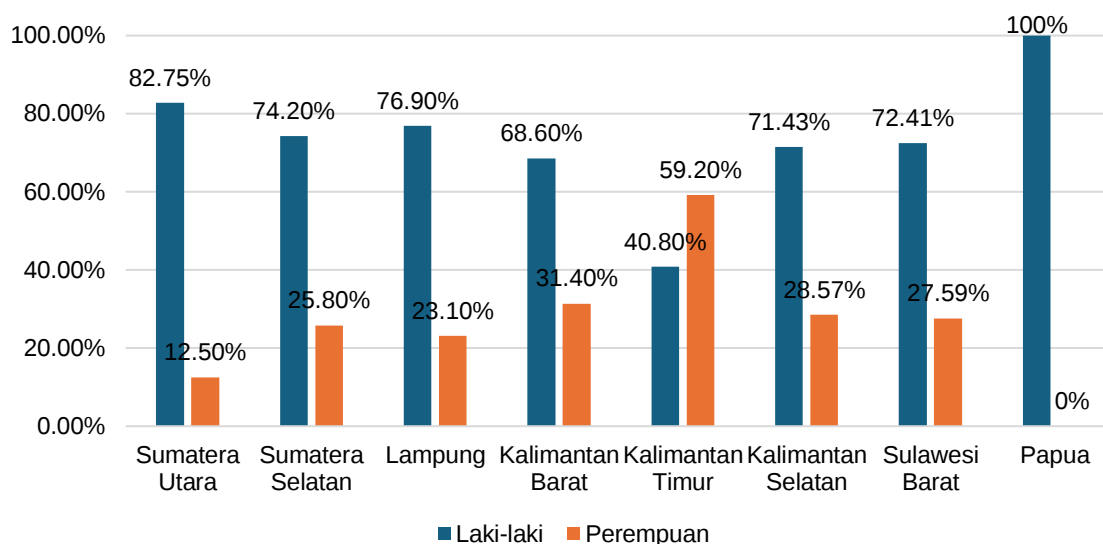
Implementasi pelaksanaan PUG di Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut diwujudkan melalui Program Desa Mandiri Peduli Gambut, Kegiatan DMPG dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua dengan target 60 (enam puluh) desa, Adapun kegiatannya terdiri dari:

- Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan DMPG di 8 Provinsi;
- Rekrutmen Fasilitator Masyarakat;
- Pelatihan fasilitator;
- Transect Walk dan Pengumpulan data;
- Pembentukan Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TKPPEG);
- Penyusunan Dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS), penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- Ekspos IMAS dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- Implementasi Rencana kerja Masyarakat

Dalam setiap tahapan kegiatan DMPG tersebut diatas, laki-laki dan perempuan mengambil peran aktif untuk mendukung kegiatan baik dari segi kebijakan maupun sumber daya. Adanya sinergi yang kuat dan komitmen dari semua pihak, diharapkan rencana kegiatan masyarakat terwujud dengan baik dan berkelanjutan.

2.11.3. Hasil Pengarusutamaan Gender

Telah disusunnya Rekapitulasi data keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam dalam keanggotaan Tim Pelaksana kegiatan DMPG di 8 Provinsi, Tabel Analisis *Gender Pathway* (GAP) dan Data Terpilah dalam pelaksanaan program DMPG sebagai bukti bahwa kegiatan program DMPG telah responsif gender.

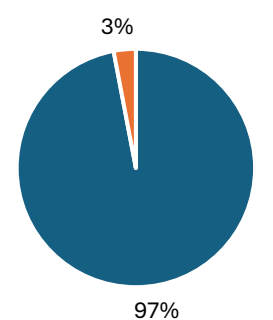


No	Provinsi	Total Jumlah Anggota	Jumlah Keterlibatan		Presentasi Kegiatan	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sumatera Utara	29	24	3	82,75%	12,50%
2	Sumatera Selatan	124	92	32	74,20%	25,80%
3	Lampung	52	40	12	76,90%	23,10%
4	Kalimantan Barat	124	85	39	68,60%	31,40%
5	Kalimantan Timur	84	30	50	40,80%	59,20%
6	Kalimantan Selatan	70	50	20	71,43%	28,57%
7	Sulawesi Barat	58	42	16	72,41%	27,59%
8	Papua	45	45	0	100%	0%

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam keanggotaan TKPPEG (Tim kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) dengan jumlah prosentase tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 35,71% dan Kalimantan Barat 31,45% dibandingkan dengan Provinsi lainnya, sedangkan di Provinsi Papua belum melibatkan perempuan didalam keanggotaan Tim Kerjanya.

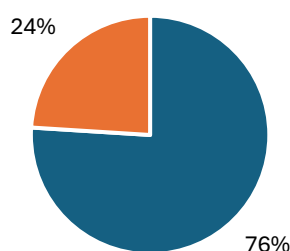
Keterlibatan jumlah perempuan dalam kepenguruan TKPPEG sebagai ketua hanya 3%: sebagai bendahara TKPPEG sebesar 24%, dan sebagai sekretaris TKPPEG 35%, sebagaimana diagram terlampir.

persentase gender ketua TKPPEG



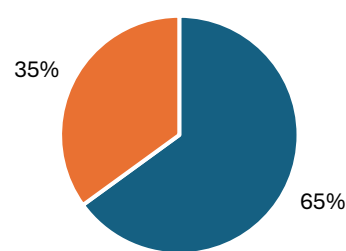
■ laki-laki ■ perempuan

persentase gender bendahara TKPPEG



■ laki-laki ■ perempuan

persentase gender sekretaris TKPPEG



■ laki-laki ■ perempuan

2.12. NSPK

Pada tahun 2024 Direktorat PKEG dilibatkan dalam perumusan muatan pada revisi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun muatan yang diberikan perihal metode perhitungan IKEG dan komponen penyusun pada Gambut Lestari.

Di tahun 2025 telah dilakukan pula analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2017. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa masa berlaku peraturan tersebut sudah lebih dari lima tahun dan diperlukan kajian perihal relevansi dengan kebutuhan masa sekarang dan efektifitas implementasi.

Adapun dari kajian analisis dan evaluasi tersebut diperoleh temuan bahwa:

- Diperlukan penguatan peran aktif pemerintah daerah perihal pengaturan tentang areal pemulihan, pemantauan tinggi muka air tanah di areal penggunaan lain yang tidak dibebani izin.
- Diperlukan instrumentasi *“reward & punishment”* guna memaksa perlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem gambut.

Adapun temuan spesifik pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2017 yang perlu dikaji lebih lanjut adalah:

- Mekanisme pemutakhiran batas KHG dan Fungsi Ekosistem Gambut (skala 1:50.000);
- Mekanisme penambahan KHG baru (sebagaimana pernah terjadi pada KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura) dan perubahan Fungsi Ekosistem Gambut berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Pemerintah Daerah maupun pemegang izin usaha dan/atau kegiatan terkait keberadaan ekosistem gambut di wilayahnya;
- Metodologi dan ketentuan teknis dalam pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut
- Mekanisme bagi pelaksanaan inventarisasi ekosistem gambut di areal usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan oleh KLH/BPLH
- Mekanisme bagi usaha dan/atau kegiatan yg belum melaksanakan kewajiban inventarisasi dapat dilakukan melalui mekanisme PNBPN atau pada saat pengurusan Persetujuan Lingkungan
- Khusus untuk Program Strategis Nasional dan Proyek Prioritas dalam hal percepatan verifikasi lapangan hasil inventarisasi ekosistem Gambut (skala 1:50.000) dapat menggunakan mekanisme PNBPN atau ketentuan baku sesuai regulasi peraturan.

Adapun pula temuan spesifik pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017 yang perlu dikaji lebih lanjut adalah:

- Pelaksanaan pemantauan tinggi muka air tanah oleh pemilik usaha/kegiatan yang mana perlu diseragamkan metode, kualitas data, frekuensi pengukuran, dan tata cara pelaporannya
- Perlu dikaji lebih lanjut perihal kesiapan pemerintah (pusat dan daerah) dalam implementasi pemantauan tinggi muka air tanah secara *real time*.

2.13. Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri

2.13.1. GIZ SUPA

Profil Proyek

Tujuan umum dari kegiatan *Sustainable Use Peatland and Haze Mitigation in ASEAN* (SUPA) ini adalah: Untuk mempromosikan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di ASEAN melalui tindakan kolektif dan untuk meningkatkan kerja sama untuk mendukung dan mempertahankan mata pencaharian lokal, mengurangi risiko kebakaran dan kabut asap terkait dan berkontribusi pada pengelolaan lingkungan global.

Keluaran dari proyek ini adalah Metode dan konsep yang teruji dan terbukti, dari kegiatan area percontohan di Indonesia telah dikembangkan dan tersedia untuk negara-negara anggota ASEAN (AMS). Semua keluaran yang disebutkan di atas harus dicapai oleh, tetapi tidak terbatas pada, keluaran dan/atau kegiatan berikut

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Aceh
- Implementasi “Program Desa Mandiri Peduli Gambut” di 10 desa.

Capaian Proyek

- i. Keluaran 1. Implementasi Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 10 desa:
 - Pelatihan fasilitator desa, pembentukan & pelatihan TKPPEG, penyusunan RKM, ekspose RKM
 - Implementasi RKM berupa pembangunan demplot, penanaman tanaman pertanian dan kehutanan, pelatihan pengolahan gambut berkelanjutan
 - Pemasangan automated water logger, water management, sekat kanal
 - pengadaan alat penanggulangan kebakaran termasuk pompa air
- ii. Keluaran 2. Finalisasi dokumen RPPEG Provinsi Aceh
 - Fasilitasi diskusi final dokumen RPPEG Provinsi dengan KLHK dan ahli.
- iii. Keluaran 3. Penyusunan dokumen RPPEG Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya
 - Pembentukan dan pelatihan tim penyusun
 - Penyusunan draft-1 dokumen RPPEG Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya
- iv. Keluaran 4. Peningkatan kapasitas
 - 250 masyarakat desa dan aparatur negara mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan gambut lestari (penanganan kebakaran, finance & administrasi, pelatihan TKPPEG)

2.13.2. KIFC

Proyek Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar di Provinsi Jambi Kerja Sama Indonesia – Korea dilaksanakan berdasarkan *Letter of Arrangement on Restoration of Burnt Peatland in Jambi* yang ditandatangani pada 31 Agustus 2020 di Jakarta, Indonesia dan 9 September 2020 di Daejeon, Korea Selatan.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 2015 dimana Ekosistem Gambut menjadi salah satu areal yang terdampak. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang restorasi lahan gambut. Proyek ini merupakan kerjasama antara Korea Forest Service Republik Korea dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam restorasi lahan gambut bekas terbakar di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sekitarnya serta berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

Proyek ini dilaksanakan di Hutan Lindung Gambut Londerang (HLG), Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jangka waktu proyek 9 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2023, dan telah diperpanjang sampai dengan Desember 2024. Dalam jangka waktu tersebut, kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Revitaliasasi ekonomi masyarakat melalui Program Desa Mandiri Peduli Gambut pada 10 desa di sekitar HLG Londerang;
2. Revegetasi areal lahan gambut bekas terbakar di HLG Londerang seluas 200 hektar;
3. Restorasi fungsi hidrologis lahan gambut di areal Masyarakat di sekitar HLG Londerang melalui pembangunan sekat kanal sebanyak 19 unit;
4. Pembangunan Kenali Peatland Education Center di Hutan Kenali Jambi;
5. Instalasi alat pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) Gambut otomatis (water data logger) sebanyak 12 unit, beserta sistem aplikasinya;
6. Peningkatan kapasitas bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada masyarakat di 10 (sepuluh) desa (DMPG) sekitar HLG Londerang; dan
7. Promosi forum nasional dan internasional.

Dokumentasi kegiatan tersebut diatas, terlampir sebagai berikut:



Revitaliasasi ekonomi masyarakat melalui Program DMPG



Revegetasi areal lahan gambut bekas terbakar di HLG Londerang



Pembangunan Sekat Kanal dan Pemasangan FDRS



Pembangunan Kenali Peatland Education Center di Hutan Kenali Jambi



Instalasi Alat Pemantauan TMAT Gambut otomatis (*data logger*)



Pelatihan bidang PPEG kepada masyarakat



Promosi forum nasional dan internasional

2.13.3. GEF 6 - IMPLI

Deskripsi

Ekosistem gambut memiliki peran strategis karena menyediakan berbagai jasa lingkungan seperti memitigasi emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati flora dan fauna, mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tinggal di lahan gambut, meregulasi air dan sebagainya. Namun, degradasi dan eksploitasi yang melebihi daya dukung ekosistem gambut bisa mengancam keberlanjutannya sehingga diperlukan upaya untuk memperbaiki ekosistem gambut yang rusak, melindungi dan mengelola ekosistem gambut yang masih baik dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Proyek Integrated Management of Peatland Landscape in Indonesia (IMPLI) bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dengan outcome utama untuk memperkuat kerangka kerja dan meningkatkan kapasitas nasional, pengelolaan KHG prioritas secara terintegrasi dan berkelanjutan dan mempromosikan teknologi yang inovatif dan pemasaran produk dari ekosistem gambut.

Sumber pendanaan / funding

Proyek IMPLI mendapatkan pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF 6) melalui International Fund for Agricultural Development (IFAD). Proyek IMPLI secara resmi mulai beroperasi ditandai dengan perjanjian keuangan (Financing Agreement/FA) pada 22 Juli 2020. Periode efektif pelaksanaan proyek adalah 5 tahun 2 bulan (Juli 2020-30 September 2025). Berdasarkan PDR, proyek IMPLI direncanakan akan secara resmi berakhir enam bulan setelah seluruh aktivitas lapangan berakhir (31 Maret 2026). Namun dalam National Steering Committee Meeting 2024 IMPLI direkomendasikan untuk mendapatkan perpanjangan waktu dengan skenario yang akan didiskusikan lebih lanjut di internal KLH. Keseluruhan kegiatan proyek IMPLI direncanakan selesai dalam jangka waktu 5 tahun dimulai pada tahun 2020 dan didanai dari dana Hibah Luar Negeri (HLN) senilai USD 4.895.872 dengan dana pendamping dari pemerintah senilai USD 22.371.960. Hingga 31 Desember 2024, IFAD sudah menyalurkan dana sebesar 3.065.035 USD atau 63% dari total dana hibah. Pada tahun 2024, realisasi keuangan proyek IMPLI adalah 99.82% dengan nilai 1.197.493,41 USD atau setara dengan Rp 18.835.867.687,00.

Highlight program IMPLI di 2024

Kegiatan yang dilaksanakan IMPLI pada tahun 2024 antara lain :

- Fasilitasi penyusunan RPPEG di Bengkalis, Siak, Muaro Jambi, Musi Banyuasin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Mendukung KLHK dalam berperan aktif di tingkat regional/internasional
- Menyusun studi metodologi perhitungan CO2 dari perubahan TMAT
- Inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut skala 1:50.000
- DMPG

- Pengarusutamaan gender dalam kegiatan IMPLI khususnya DMPG
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan TMAT (Tinggi Muka Air Tanah)

Dalam memperkuat kerangka kerja dan peningkatan kapasitas nasional maka IMPLI mendorong rencana aksi nasional, penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten hingga tapak sehingga perlindungan dan pengelolaan gambut yang berkelanjutan ini dapat diadopsi dan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah mulai dari pusat hingga desa yang salah satunya berupa dukungan penyusunan Rencana Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) di kabupaten Bengkalis, Siak, Muaro Jambi dan Musi Banyuasin. Selain ke empat kabupaten tersebut, berdasarkan hasil rekomendasi *National Steering Committee* (NSC) maka IMPLI juga akan mendukung pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk penyusunan RPPEG-nya mengingat kabupaten ini sebagian wilayahnya juga berada dalam dua KHG yang menjadi target IMPLI yaitu KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut, KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil.



Gambar. Sosialisasi rencana penyusunan RPPEG di Kab.Musi Banyuasin.

IMPLI melalui KLHK juga secara aktif mendukung pengarusutamaan pengelolaan gambut yang berkelanjutan serta berperan aktif dalam berbagai forum koordinasi multi stakeholders di forum-forum internasional diantaranya the National Peatland Steering Committee (NPSC) yang memfasilitasi dialog kebijakan antar negara di tingkat ASEAN, The 25th Meeting of the Technical Working Group and the Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution, the 9th ASEAN Task Force Peatland (ATFP), the ASEAN Forum on Peatland Biodiversity and COP 29.. Terkait upaya penurunan emisi IMPLI memfasilitasi penyusunan metodologi perhitungan emisi gas rumah kaca berbasis tinggi muka air tanah (TMAT) untuk menghitung baseline emisi dengan Tier 2.

Tahun 2024 juga ditandai dengan terselesaikannya penyusunan baseline (Gambar 2), inventarisasi dan pemetaan hingga skala 1:50.000 sembilan KHG yang menjadi target proyek IMPLI yaitu KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil. KHG Sungai Siak Kecil-Sungai Siak, KHG Sungai Siak-Sungai Kampar, KHG Sungai Batanghari-Sungai Air Hitam Laut, KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil, KHG Sungai Merang-Sungai Ngirawan, KHG Sungai Merang-Sungai Ngirawan, KHG Sungai Ngirawan-Sungai Sembilang, KHG Sungai

Sembilang-Sungai Lalan dan KHG Sungai Burnai-Sungai Sibumbang. Inventarisasi dan pemetaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa peta yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan ekosistem gambut memiliki kedetilan dan akurasi yang cukup tinggi. Hasil dari pemetaan dan inventarisasi KHG hingga skala 1:50.000 selanjutnya menjadi data dasar dalam penyusunan RPPEG.



Gambar. Kegiatan lapangan dalam pengukuran *baseline* untuk keanekaragaman hayati di Prov. Riau

Pengelolaan KHG tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat lokal sebagai komponen penting dalam ekosistem. Untuk itu masyarakat lokal dilibatkan secara aktif untuk mengelola ekosistem gambut melalui pembentukan Tim Kerja-Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG). Pada tahun 2024 IMPLI menyalurkan dana RKM total senilai Rp 3.050.000.000,00 ke tiga belas TK-PPEG binaan yang tersebar di kabupaten Siak, Bengkalis, Muaro Jambi, Musi banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI) untuk kegiatan penggemukan dan perkembangbiakan sapi, budidaya lebah madu, penggemukan kambing etawa, budidaya ayam kampung, depot air minum isi ulang, perikanan darat, dan demplot paludikultur serta agrosilvofisheries (Gambar 3). Agar tujuan RKM bisa tepat sasaran maka IMPLI memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan pemetaan desa partisipatif, identifikasi masalah (IMAS), penguatan kelembagaan TK-PPEG. Penguatan kelembagaan TK-PPEG dalam mengelola RKM juga terus dilakukan melalui berbagai pembinaan teknis sesuai dengan RKM yang diajukan oleh masing-masing desa.



Gambar. Beberapa kegiatan RKM yang diusulkan oleh masyarakat dan didanai oleh IMPLI meliputi budidaya madu di Desa Kepayang, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan yang saat ini sudah bisa dipanen (A), kegiatan penanaman pinang batara di demplot Tanjung Menang, Kab. OKI, Prov. Sumatera Selatan (B), kegiatan budidaya kambing etawa di desa Sungai Aur, Kab.Kumpeh, Prov. Jambi (C), dan kegiatan budidaya sapi Bali di desa Muara Medak, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan (D).

Dalam berkegiatan, IMPLI selalu melibatkan dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di tapak untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan mendapatkan dukungan dari pemerintah lokal, lembaga swadaya, academia, private sector, dan pemangku kepentingan yang lain. Salah satu bentuk yang paling nyata adalah dukungan dari pemerintah desa terhadap RKM dalam bentuk lahan, jalan menuju demplot, serta sarana pendukung lain yang di tahun 2024 senilai Rp 477.430.000,00.



Gambar. Ibu-ibu dan remaja putri menanam bibit hortikultura di demplot desa Dayun, Siak (A), Bu Acil sedang memanen kangkung di demplot paludikultur desa Rawa Mekar Jaya (B), dan para ibu anggota TK-PPEG desa Jebus sedang beraktivitas memeriksa ayam kampung yang merupakan program RKM Desa Jebus (C).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan landasan dalam mengimplementasikan PUG dalam berbagai bentuk pembangunan nasional. Proyek IMPLI turut mengintegrasikan PUG dalam berbagai kegiatan. Sebanyak 12 dari 13 desa intervensi proyek IMPLI telah melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan RKM (Gambar 4). Secara keseluruhan, persentase jumlah laki-laki sebesar 74,31%, sedangkan jumlah perempuan sebesar 25,69% dalam kegiatan RKM. Meskipun jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan keterlibatan perempuan tetap berperan penting dalam berbagai kegiatan RKM. Sebagai contoh, anggota perempuan dari TK-PPEG Desa Jebus memprakarsai model bagi hasil dari usaha peternakan ayam. Model bagi hasil ini memastikan pembagian keuntungan yang adil berdasarkan peran masing-masing individu dalam struktur organisasi TK-PPEG. Hal ini menyoroti peran penting kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan operasi bisnis serta mendorong pendekatan kolaboratif dan adil untuk keberhasilan program atau kegiatan.

Tantangan dan peluang di tahun 2025

Proyek IMPLI akan menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2025, seperti perubahan struktural di dalam KLHK yang selanjutnya menjadi kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, pergantian para kepala daerah, sinkronisasi data dan informasi, serta keterbatasan waktu dalam mencapai target proyek. Selain itu dalam implementasi juga terdapat tantangan medan di lapangan yang berada di remote area dan merupakan home range dari harimau sumatera (5A, B), cuaca, medan di lapangan yang berada di remote area dan merupakan home range dari harimau sumatera dan gajah juga memerlukan strategi implementasi kegiatan yang lebih baik di tahun 2025. Untuk menyikapinya maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi di lapangan.



Gambar. Jejak kaki harimau di dekat desa intervensi IMPLI (A), harimau dilaporkan masuk ke perkampungan warga (B), kondisi medan yang sulit saat musim penghujan di desa Temiang, Kab. Bengkalis (C).

IMPLI akan memanfaatkan sejumlah peluang untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Swasta merupakan salah satu stakeholder penting di lokasi target IMPLI sehingga IMPLI akan melibatkan sektor swasta dalam berbagai kegiatan IMPLI, seperti pemasaran produk masyarakat, penguatan kapasitas TK-PPEG, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan dukungan kegiatan RKM. Penggunaan SIPPEG secara meluas oleh para pemangku kepentingan untuk deteksi dini kebakaran dan perencanaan pengelolaan gambut juga menjadi salah satu yang akan didorong oleh IMPLI di tahun 2025. Proyek IMPLI juga akan memfasilitasi terjadinya transfer pengetahuan dalam mengelola gambut secara terintegrasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan terbaik antar TK-PPEG IMPLI maupun dengan kelompok petani pengelola gambut yang lain di luar IMPLI. Pada tahun 2025, IMPLI juga akan mendorong terjadinya coherence policy dimana para pemangku kepentingan di areal target IMPLI bisa menyepakati, dan bersedia melakukan sinkronisasi perencanaan pengelolaan gambut antar kabupaten yang berbagi satu kesatuan hidrologis gambut (KHG). IMPLI juga akan terus melanjutkan dan mengawal pemerintah kabupaten di wilayah target dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) untuk memastikan management pengelolaan gambut yang berkelanjutan dan terintegrasi akan diadopsi.

2.13.4. GIZ PROPEAT

Profil

Melalui Nota Dinas nomor ND.19/PPKL/SETPPKL/PKL.4.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, Direktur Jenderal PPKL telah melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Laporan Kemajuan GIZ Propeat dan Permohonan Kerja Sama antara KLHK dan GIZ dalam proyek Peatland Management and Rehabilitation in East and North Kalimantan (PROPEAT) pada tahun 2019 – 2023 dengan pendanaan sebesar 6 juta Euro.

Proyek PROPEAT memiliki 5 indikator yaitu :

1. Tersusunnya Rencana Pemulihan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berkelanjutan
2. Penyusunan bahan pedoman pemanfaatan fungsi lindung ekosistem gambut berkelanjutan
3. Dalam dua bentuk pengelolaan lahan (kayu ataupun non kayu), terdapat 3 pengalaman dan hasil penelitian terkait tata guna lahan terintegrasi yang diimplementasikan
4. Tiga dari lima perencanaan perhutanan sosial yang diusulkan telah diimplementasikan
5. Tiga institusi kehutanan (KPH) melaksanakan panduan pengarusutamaan jender dari Kementerian LHK dalam proses perencanaan tata guna lahan.

Tujuan

Proyek PROPEAT ini bertujuan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Prioritas utama kegiatan yaitu mendukung proses pengumpulan data dasar sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada saat ini proyek tersebut sedang dalam tahap penyelesaian secara administrasi, termasuk serah terima aset.

Berdasarkan analisis manfaat, PROPEAT telah mendukung berbagai capaian perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut di tingkat Nasional dan Sub Nasional antara lain:

- Mendukung KLHK dalam menyelesaikan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, juga mengoordinasikan potensi proyek GCF/GIZ untuk mendukung penyelesaian inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mendukung langkah-langkah pengembangan kapasitas (pelatihan langsung, pembinaan, dll) di tingkat KHG, kabupaten dan provinsi untuk mengintegrasikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ke dalam rencana pembangunan (RPJMD, RPPLH Daerah, RTRW Provinsi dan Kabupaten, dan rencana Pembangunan daerah yang relevan).
- Mendukung implementasi program dan kegiatan dalam RPPEG, yang relevan dengan lanskap KHG yang integratif (termasuk pengelolaan

kebakaran) pada KHG terpilih dalam mencapai target FOLU NET SINK 2030;

- Mendukung pemangku kepentingan lokal pada KHG dan tingkat kabupaten dalam mengakses mekanisme pendanaan yang ada dan yang akan datang (Perdagangan Karbon, Pendanaan Nasional, Sistem Registrasi Nasional, donor lain, KfW (Bank Pembangunan Jerman), dll.)
- Mendukung kementerian dalam mengembangkan dan menyebarkan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan Ekosistem Gambut yang berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan;
- Mendukung terjalannya kerja sama south to south , ITPC, ataupun kegiatan lainnya.

Capaian

Berikut beberapa capaian proyek GIZ PROPEAT:

- Inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada 14 KHG di Kalimantan Timur dan 13 KHG di Kalimantan Utara;
- Fasilitasi penyusunan naskah akademis RPPEG Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Kabupaten Nunukan, Tanah Tidung, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau;
- Pembangunan stasiun pemantauan TMAT di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Pembuatan demplot untuk meningkatkan penghidupan lokal masyarakat;
- Kajian untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Ekosistem Gambut yang berkelanjutan
- Penyusunan bahan kajian pengintegrasian pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove/estuari.
- Pengembangan kegiatan percontohan agrosilvofishery atau palludiculture di fungsi budidaya Ekosistem Gambut secara berkelanjutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi di 3 lokasi.

2.13.5. GEF 7 - COPLI

Profil

COPLI merupakan proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pendanaan yang berasal dari GEF-7. Tujuan COPLI adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan penghidupan melalui penguatan kerangka kelembagaan dan konservasi ekosistem lahan gambut berbasis masyarakat di Indonesia. Konsep COPLI antara lain:

- Komponen-1: Penguatan kapasitas dan rencana yang dirumuskan dan diadopsi, didukung oleh sumber daya tambahan untuk perlindungan lahan gambut dan peningkatan pengelolaan di tingkat nasional dan provinsi sasaran.
- Komponen-2: Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di lanskap lahan gambut yang ditargetkan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta
- Komponen-3: Peningkatan pertukaran pengetahuan dan komunikasi serta pemantauan keanekaragaman hayati lahan gambut

Adapun target Lokasi pelaksanaan proyek COPLI antara lain:

- Provinsi Kalimantan Barat dengan 2 Lanskap: 558.182 Ha (42% Kawasan Nilai Konservasi Tinggi untuk Keanekaragaman Hayati):
- Lanskap Lahan Gambut Danau Sentarum – Kabupaten Kapuas Hulu (Utara): 248.632 ha
- Lanskap Lahan Gambut Gunung Palung – Sungai Putri – Kabupaten Ketapang & Kayong Utara (Selatan): 309.550 ha

Capaian

Sampai dengan tahun 2024, progres pelaksanaan COPLI antara lain:

- Persiapan Financial Agreement (FA) Antara Implementing Agency (IFAD) dan Executing Agency (KLHK) pada Q1-2024
- Mengembangkan dokumen dasar/mendasar (Pedoman Pelaksanaan Proyek, dana awal hingga proyek)
- Proyek permulaan untuk GEF7 CoPLI pada Q3-2024 (TBC)

2.13.6. GIZ PROMANGROPEAT

Profil Proyek

GIZ PROPEAT adalah sebuah inisiatif kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut serta lahan basah, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. GIZ PROPEAT dinilai telah sukses dilaksanakan namun nampaknya masih terdapat beberapa hal besar yang dapat dicapai lebih jauh sehingga Pemerintah Jerman kembali menawarkan kerja sama baru kepada Pemerintah Indonesia dengan judul “GIZ PROMANGROPEAT” dengan lokus pengelolaan areal gambut dan mangrove di Kalimantan.

Melalui Nota Dinas nomor ND.319/SETPPKL/PPKEG/PKL.4.1/B/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, Direktur Jenderal PPKL telah melaporkan kepada Sekjen KLHK perihal Rencana Kerja Sama Teknis Pemerintah Indonesia dan Jerman di Bidang Pengelolaan Gambut Lestari.

Sebagai tindak lanjut, Menteri LHK telah memberikan arahan langsung kepada Direktorat PKEG dan GIZ Office Indonesia untuk menindaklanjuti rencana kerja sama teknis Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman periode 2024-2026 dengan pendanaan sebesar 4.500.000 Euro.

Pemerintah Jerman telah memberikan lampu hijau untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama teknis dimaksud melalui surat Country Director GIZ Indonesia and ASEAN No.10/ProMangrovePeat/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Tujuan

Adapun telah dirumuskan konsep overall workplan dengan rincian sebagai berikut:

- Output 1 - KHG terpilih di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dikelola sesuai dengan RPPEG untuk berkontribusi pada pencapaian FOLU Net Sink 2030
 - Indikator 1.1 - Kegiatan terpilih dari rencana yang valid dilaksanakan secara terkoordinasi di 4 KHG.
 - Indikator 1.2 - 1.000 orang, setidaknya 20% di antaranya perempuan, yang telah berhasil mengikuti pelatihan tentang topik utama pengelolaan lahan gambut, masing masing mengonfirmasi dengan contoh konkret pengelolaan KHG yang lebih berkelanjutan.
- Output 2 - Kerangka hukum administratif termasuk pedoman perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Utara, Timur, Selatan, dan Tengah diperkuat
 - Indikator 2.1 - Inventarisasi karakteristik ekosistem gambut hingga 1.515.824 hektar dan terintegrasi dengan peta fungsi ekosistem gambut.
 - Indikator 2.2 - Program/Kegiatan RPPEG yang relevan terintegrasi dengan setidaknya 15 perencanaan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender di tingkat Nasional dan Sub-Nasional di area intervensi.

- Indikator 2.3 - Identifikasi dan/atau inventarisasi karakteristik ekosistem gambut di luar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ditetapkan.
- Output 3 - Teknologi inovatif, penelitian aksi (terapan), dan pengetahuan tentang ekosistem gambut serta ekosistem terkait lainnya disebarluaskan
 - Indikator 3.1 - Pengetahuan, inovasi, praktik terbaik, dan data yang terdokumentasi tentang konservasi ekosistem gambut dipublikasikan dan dipresentasikan oleh organisasi mitra di 4 acara nasional /internasional.
 - Indikator 3.2 - Dua (2) pusat informasi/pendidikan berfungsi dengan informasi dan bahan edukatif yang relevan untuk ekosistem gambut.

2.13.7. Conference of the Parties (COP-29), Baku - Azerbaijan

Paviliun Thailand, 19 November 2024

Sesi ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dari berbagai pihak terkait pendanaan dan praktek berkelanjutan terkait ketahanan iklim dari pertanian dan bio circular - ekonomi hijau. Secara paralel, Kerangka Kerja Investasi ASEAN untuk Pengelolaan Lahan Berkelanjutan Bebas Asap (AIF-HFSLM) akan dibahas. Kerangka kerja tsb menampilkan upaya regional untuk memerangi kabut asap lintas batas dan mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Acara kolaboratif ini menyoroti peran mekanisme keuangan dalam mencapai tujuan iklim dan mendorong kemitraan regional dalam mencapai tujuan iklim dan membina kemitraan untuk keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Salah satunya adalah dalam sektor pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Dalam sesi ini Indonesia menyampaikan pembelajaran terkait peran pemerintah dalam pengelolaan gambut berkelanjutan.

Talkshow *Advancements in Carbon Measurement Through Peat Ground Water Level Management (Enhancing Peatland Conservation)*, 19 November 2024

Sesi ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan metodologi pengukuran emisi karbon terhadap perubahan tinggi muka air tanah di lahan gambut dari pemangku kepentingan terkait dan dukungan dalam penentuan metode berbasis tinggi muka air tanah untuk penilaian CO₂.

Metodologi yang diusulkan memberikan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menghitung emisi CO₂ berbasis data. Tantangan yang akan dihadapi adalah Pemodelan tinggi muka air tanah dan emisi membutuhkan lebih banyak data lintas zona iklim dan kategori gambut dan Keterbatasan penggunaan penginderaan jauh untuk memantau tinggi muka air tanah dan emisi.

Pentingnya penguatan kerja sama lintas sektoral dan integrasi data untuk keberhasilan implementasi metodologi ini (Pemerintah, Masyarakat, dan Usaha/Kegiatan). Disampaikan juga Fokus jangka panjang pengelolaan gambut berkelanjutan yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan Bilateral dengan IFAD tentang *Peatland Portfolio*, 20 November 2024

Terkait dengan Project IMPLI yang akan berakhir pada tahun 2025, masih terdapat alokasi anggaran sekitar US\$ 2 juta yang belum digunakan, IFAD mengusulkan untuk memperpanjang durasi project IMPLI hingga 2027.

Terkait CoPLI GEF7, IFAD telah menerima persetujuan dari Presiden IFAD pada bulan September 2024 dan sudah mempersiapkan perjanjian keuangan (FA). Mempertimbangkan pada pertengahan bulan Oktober 2024, terjadi perubahan struktur kabinet baru, maka disarankan agar IFAD dan KLH memulai pendekatan dan melanjutkan FA yang akan diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2025.

Dari pertemuan tersebut dihasilkan pula potensi kerjasama baru. IFAD dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mengembangkan Restorasi Ekosistem Danau di Indonesia melalui Pendekatan Tata Kelola, Bentang Alam, dan Masyarakat Terpadu (LAKES), yang akan didanai sebesar USD 7,1 juta oleh GEF8 di Indonesia.



IFAD sedang memfinalisasi proposal yang akan diajukan ke GEF-Sec pada bulan Januari 2025. Salah satu strateginya adalah untuk meningkatkan area lahan basah (Danau & daerah tangkapan airnya) dengan kunci utama pembangunan pada Pangan - Energi & Air.

Talkshow *Collaborative Approaches for Climate Resilience and Carbon Sequestration*, 21 November 2024

Sesi ini bertujuan untuk Berbagi pengalaman keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Pada sesi ini Indonesia menegaskan kembali sangat Berkomitmen dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam tujuan global seperti pengendalian perubahan iklim, mengendalikan kerusakan ekosistem gambut, dan juga pelestarian kehati.

Pemaparan PT. Astra Agro Lestari-Sektor Industri Minyak Sawit dalam penerapan Methane Capture untuk memastikan limbah POME yang dihasilkan dalam proses produksi;

Pengalaman PT. Pertamina Sektor Industri Pengolahan Minyak Bumi menjaga keberlangsungan kelestarian dan fungsi dari ekosistem gambut dalam peatland

water treatment yang berusaha membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air baku di sekitar lokasi usaha;

Apresiasi dari UNEP pada Pengelolaan Gambut di Indonesia dan dukungan Program UNEP untuk memastikan seluruh program lingkungan yang telah disepakati dapat diimplementasikan oleh seluruh pihak di seluruh negara.

Official Side Event – UNFCCC Ruang Side Event II - 21 November 2024

Sesi pertama dimulai oleh peluncuran *The Global Peatland Hotspot Atlas: The State of the World's Peatlands in Maps*, yang diinisiasi oleh *Global Peatland initiative* (GPI). Atlas ini merupakan pemutakhiran dari hasil Kajian Lahan Gambut Global dan Peta Lahan Gambut Global 2.0 yang diterbitkan pada tahun 2022. Atlas ini menampilkan peta titik panas yang telah diperbarui dan didesain ulang.

Atlas ini mencakup berbagai lapisan tematik, termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan spesies, kawasan lindung, lahan gambut pegunungan dan permafrost, lahan gambut kering dan sub-kering, drainase dan degradasi, emisi gas rumah kaca, infrastruktur lalu lintas dan urbanisasi, pertanian, industrialisasi (seperti pertambangan, minyak, dan gas), banjir, penurunan permukaan tanah, kebakaran, dll.



Atlas ini bertujuan untuk mengevaluasi status lahan gambut saat ini di seluruh dunia dan menyoroti ancaman yang dihadapi dari urbanisasi, industrialisasi, perubahan tata guna lahan, dan perubahan iklim.

Sesi selanjutnya yaitu berbagi pengalaman dari perwakilan negara, yang dihadiri oleh tiga orang panelist dari semula lima yaitu Menteri Jerman, Menteri Malaysia dan Direktur PKEG Indonesia.



Acara ini berupaya menjembatani diskusi dalam kerangka kerja internasional Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dan Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah, dengan menekankan bahwa keberhasilan dalam satu konvensi berkaitan dengan konvensi lainnya.

Sesi ini akan menyoroti pentingnya integrasi, menampilkan alat dan data yang tersedia, dan menekankan kebutuhan mendesak akan solusi keuangan yang terukur untuk mendukung aksi lahan gambut yang mengatasi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memastikan keamanan air.

Para panelis berbagi upaya yang sudah dilakukan dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, menyoroti inisiatif yang telah berhasil dan pendekatan kolaboratif yang dapat menginspirasi aksi global lebih lanjut.

2.13.8. Pilot Project dengan Pemerintah Jepang

Profil Proyek

Kalimantan Tengah memiliki luas lahan gambut yang sangat besar. Lahan gambut tersebut menyimpan cadangan karbon, air dan potensi ekonomi yang besar pula, namun pengelolaannya seringkali tidak berkelanjutan. Proyek ambisius pengelolaan lahan gambut satu juta hektar (proyek PLG) yang diinisiasi pada tahun 1995 sampai 1998 awalnya diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya berakhir dengan kegagalan total. Terganggunya fungsi hidrologis air dan kebakaran hutan & lahan yang sering terjadi di wilayah ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, emisi gas rumah kaca yang tinggi, serta dampak negatif terhadap masyarakat setempat.

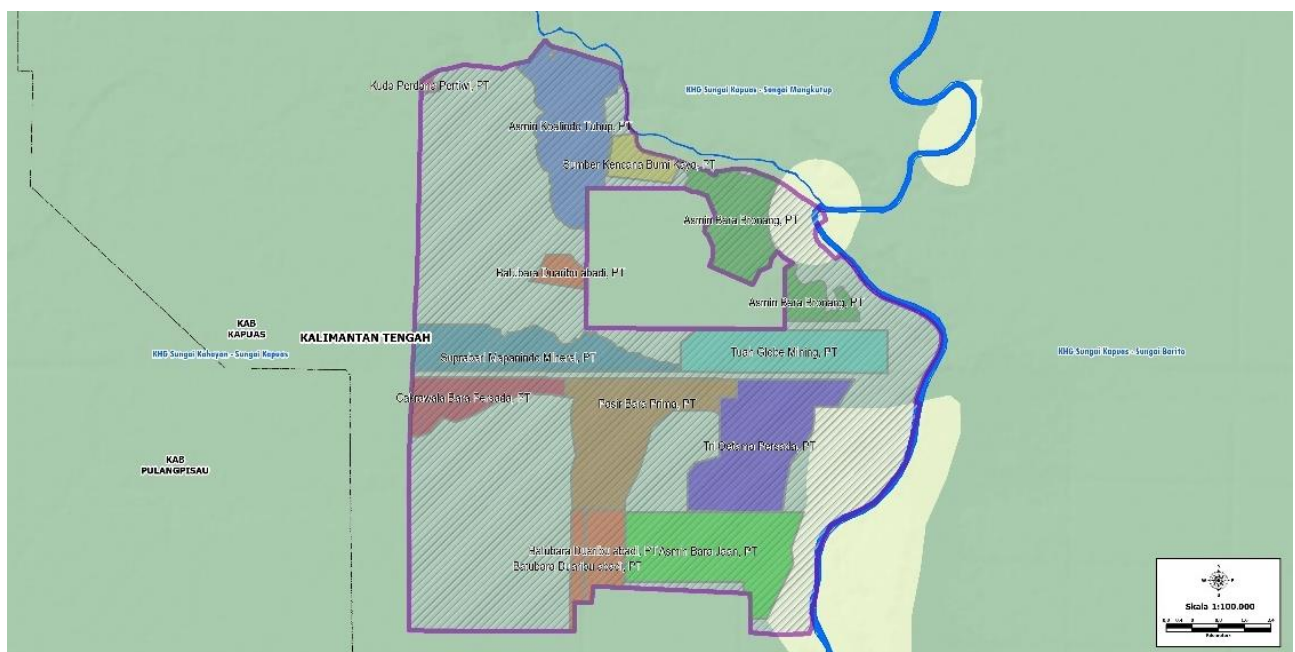
Pemerintah Jepang sebelumnya telah cukup lama melakukan penelitian dan kajian terhadap potensi pengelolaan lahan gambut di Kalimantan (dengan melakukan kegiatan budidaya kayu lapis & *agroforestry* secara terkendali dan berkelanjutan), dan tertarik untuk melakukan hal serupa di areal eks PLG. Melalui surat tanggal 2 Agustus 1996 dan 19 September 2024 pihak Sumitomo Forestry menyampaikan proposal proyek yang mana telah ditanggapi secara baik oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adapun kemudian Direktur Jenderal PPKL ditugaskan untuk melaksanakan kajian dan studi kelayakan perihal kerja sama tersebut.

Tindak Lanjut

Melalui Nota Dinas nomor ND.203/PPKL/PKEG/PKL.0.0/13/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, Direktur Jenderal PPKL telah melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup perihal kemajuan Kegiatan *Pilot Project* Restorasi dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dengan intisari sebagai berikut:

1. Dasar perjanjian Kerja Sama “Pilot Project Restorasi dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah” adalah MoU antara KHLK dan MoE Jepang, yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia - Siti Nurbaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang – Akihiro Nishimura pada tanggal 30 Agustus 2022. Mempertimbangkan substansi gambut belum termasuk dalam MoU tersebut, maka MoU di-adendum melalui *exchange letter* berdasarkan surat dari Menteri Lingkungan Hidup Jepang tanggal 26 Juli 2024 dan surat balasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia tanggal 6 Agustus 2024.
2. Tindak lanjut dari MoU tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal PPKL, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan PT. Sumitomo Forestry Indonesia (PT. SFI) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 di Jakarta sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2.

3. PT. SFI sedang melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran 2025 (AWPB).
4. PT. SFI dengan pendampingan supervisi dari Direktorat PKEG, dan Kelompok Kerja Teknik Restorasi BRGM melakukan survei lapangan untuk pemutakhiran data topografi, citra udara, dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut. Survei pertama dilakukan pada tanggal 4 s.d. 20 Oktober 2024 lalu dan survei lanjutan pada tanggal 3 November s.d. 20 Desember 2024.
5. Dari hasil survey tersebut, teridentifikasi bahwa sebagian areal *pilot project* beririsan dengan beberapa areal rehabilitasi DAS IPPKH.
6. Terhadap temuan seperti disampaikan dalam butir (5), Dit. PKEG melaksanakan respon sebagai berikut :
 - a. Melalui Surat Undangan Rapat Koordinasi Nomor UN.325/PKEG/PPKEG/PKL.0.1/B/10/2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan catatan & hasil pertemuan sebagai berikut:
 - Rapat dihadiri oleh perwakilan Dit. KTA – Ditjen. PDASRH, Dit, RPKHPWPH - Ditjen. PKTL, Dit. BUPH – Ditjen PHL, Kelompok Kerja Teknik Restorasi – BRGM, PT Sumitomo Forestry Indonesia, dan UPT KPHL Kapuas Kahayan.
 - Dit. KTA mengkonfirmasi bahwa areal *pilot project* Areal Pilot Project yang seluas ± 18.894 Ha berpotongan dengan areal rehabilitasi DAS 11 pemegang PPKH yakni seluas ± 8.298 Ha. Sisa areal *pilot project* yang berada di luar areal Rehabilitasi DAS adalah ± 10.596 Ha.



Gambar. Sebaran Areal Rehabilitasi DAS para 11 pemegang IPPKH di Areal Pilot Project

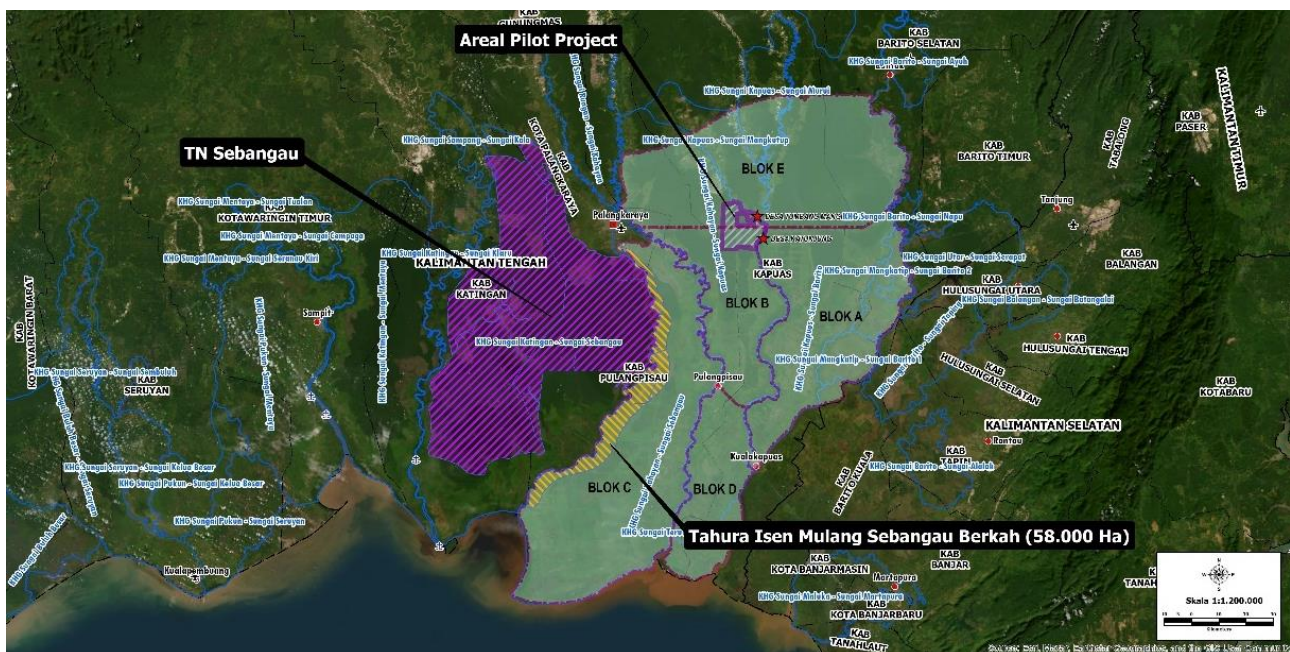
No	Nama IPPKH	SK RDAS	Tanggal RDAS	Luas (Ha)
1	Asmin Bara Bronang, PT	6296/Menhut-V/RHL/2014	20/10/2014	837
2	Asmin Bara Jaan, PT	4321/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/8/2017	16/08/2017	1.186
3	Asmin Koalindo Tuhup, PT	8132 Tahun 2024	04/06/2024	1.049
4	Batubara Duaribu Abadi, PT	649 Tahun 2024	31/01/2024	120
	Batubara Duaribu Abadi, PT	4132/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/6/2018	22/06/2018	421
5	Cakrawala Bara Persada, PT	4391/Menlhk-PDASHL/KTA/2015	21/09/2015	468
6	Kuda Perdana Pertiwi, PT	8098 Tahun 2024	04/06/2024	21
7	Pasir Bara Prima, PT	4393/Menlhk-PDASHL/KTA/2015	21/09/2015	1.130
8	Sumber Kencana Bumi Kaya, PT	8119 Tahun 2024	04/06/2024	211
9	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	3554/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/5/2018	28/05/2018	842
10	Tri Oetama Persada, PT	4394/Menlhk-PDASHL/KTA/2015	21/09/2015	1.202
11	Tuah Globe Mining, PT	3881/Menhut-PDASHL/KTA/2015	03/08/2015	809
Total Areal Rehab DAS				8.298
Areal Pilot Project non Rehab DAS				10.596
Total				18.894

b. Melalui Surat Undangan Rapat Nomor S.343/PKEG/PPKEG/PKL.4.5/B/2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan pada hari Senin, 11 November 2024 dengan catatan & hasil pertemuan sebagai berikut:

- Rapat dihadiri oleh perwakilan Dit. KTA – Ditjen. PDASRH, Kelompok Kerja Teknik Restorasi – BRGM, PT Sumitomo Forestry Indonesia, UPT KPHL Kapuas Kahayan, dan 11 Pemegang PPKH Areal Rehabitasi DAS.
- Kewajiban rehabilitasi berupa penanaman pohon diberikan mandatnya spesifik kepada nama tiap-tiap pemegang PPKH sehingga kewajiban tersebut tidak dapat digugurkan / digantikan oleh pihak lain dan mesti dikerjakan sesuai Surat Keputusan Penetapan Lokasi Penanaman Rehabilitasi DAS. Dengan demikian, PT. SFI tidak dapat melakukan kegiatan penanaman

pohon di areal *pilot project* yang beririsan dengan areal rehabilitasi DAS tersebut.

- PT. SFI kurang menghendaki kesimpulan tersebut karena kegiatan utama yang diinginkan pada *pilot project* adalah revegetasi.
- c. Pada surat nomor S.390/KTA/RPPKH/DAS.6.1/B/11/2024 tanggal 12 November 2024, Direktur Konservasi Tanah dan Air secara resmi menyampaikan data dan copy SK Penetapan Rehabilitasi DAS.
- d. Kepala UPT KPHL Kapuas Kahayan berkirim surat kepada PT.SFI dengan nomor 522.2/UPT.VIII/DISHUT tanggal 26 November 2024. Kepala UPT KPHL menyampaikan bahwa: (1) agar PT. Sumitomo Forestry Indonesia untuk tidak melakukan kegiatan lapangan di areal Rehabilitasi DAS PT. Tuah Global Mining, dan (2) menyarankan agar kegiatan *pilot project* direlokasi ke areal Tahura Sebangau (Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah).
- e. Tahura Sebangau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga opsi relokasi mungkin membutuhkan penyusunan perjanjian kerja sama baru antara Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan PT. SFI. Sampai saat ini PT. SFI belum melakukan feasibility study perihal kelayakan relokasi tersebut.



Gambar. Lokasi Areal Pilot Project dan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah

PENUTUP

1. Kesimpulan

Direktorat PKEG telah berhasil mencapai target meningkatnya **indeks kualitas ekosistem gambut** sebesar **103,08%** dari target tahun 2024. Direktorat PKEG telah mampu mencapai keseluruhan perjanjian **kinerja** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **100,31%** (terdapat dua kegiatan yang melebihi 100%, yakni sasaran IKEG dan SPIP). Adapun pula capaian **penyerapan anggaran** Direktorat PKEG adalah **99,80%** yakni Rp44.460.096.918 dari anggaran (APBN + Hibah) sebesar Rp44.547.583.000.

2. Kendala

Selama tahun 2024 direktorat PKEG dihadapkan dengan empat acara besar (Festival PPKL, Success Story Pengelolaan Gambut, Festival LIKE 2, Jambore DMPG) sehingga menghambat tempo kerja karena membutuhkan konsentrasi anggaran, waktu, dan SDM yang tidak sedikit. Keberadaan *event* / acara besar memang diperlukan sebagai ajang tunjuk jati diri capaian direktorat dan wahana forum pertemuan para pakar & *stakeholder* di bidang pengelolaan ekosistem gambut, namun kiranya empat acara besar dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama dinilai tidak efektif dan dapat mengganggu pekerjaan utama.

3. Tindak Lanjut

Keempat acara tersebut berhasil dilakukan meskipun memang terdapat beberapa pekerjaan utama yang pelaksanaannya menjadi tertunda.